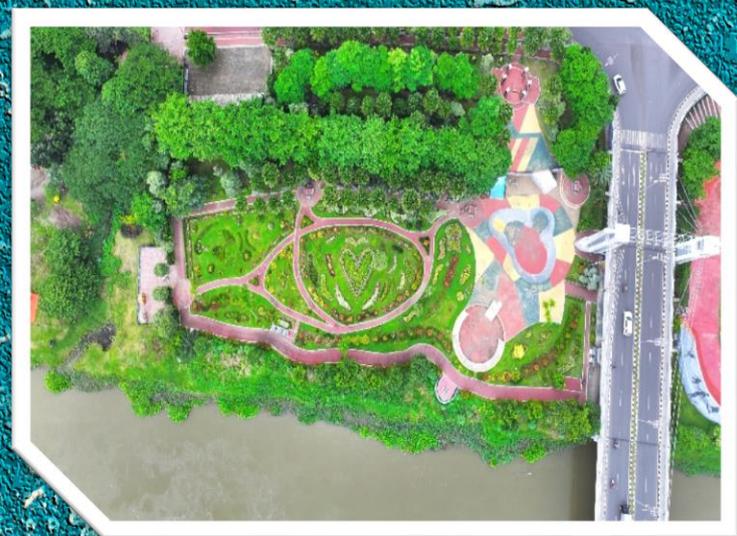
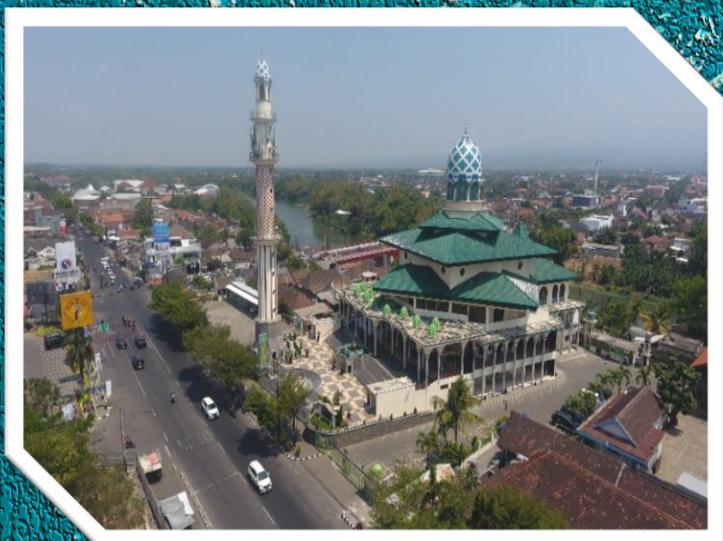




**PEMERINTAHAN  
KOTA KEDIRI**



**LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2024**



## LAMBANG KOTA KEDIRI

Berdasarkan Surat Keputusan DPRD sementara Kota Besar Kediri tgl. 30-3-1952 No. 22/DPRD-S/52 dan tgl. 21-IX-1953 No. 16/DPRD-S/53 yang menetapkan suatu lambang (Wapen) untuk Daerah Kota Besar Kediri, dan Surat Keputusan tersebut telah disahkan oleh Surat Keputusan Presiden RI No. 127/1954 dimuat dalam Berita Negara tahun 1954 No. 57.





## 1. Makna Lambang

Tertera dalam lambang:

1. Buto Locoyo
2. Perisai
3. Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo)
4. Bunga Melati
5. Padi dan Kapas
6. Dewi Kilisuci
7. Pita "Djojo ing Bojo"
8. Sayap berbulu 17 dan 8 dan ekor berbulu 4 dan 5

### Penjelasan:

- a. **Buto locoyo (Ki Ageng Dhoho)** patih yang setia, teguh dan jujur dari Sri Aji Joyoboyo, penjaga Kota Kediri, lambang Kesetiaan, Keteguhan dan Kejujuran.
- b. **Perisai**, lambang Pertahanan;
- c. **Macan Putih (Sri Aji Joyoboyo)** Raja Pujangga ahli nujum ternama dari Kediri, lambang Waspada;
- d. **Bunga Melati**, bunga nasional (Bunga Pusaka Indonesia) berdaun lima lambang Pancasila;
- e. **Padi dan Kapas**, lambang Kemakmuran;
- f. **Dewi Kilisuci** namanya sesuai dengan jiwanya. Ia bertapa untuk kepentingan saudaranya yang diberi haknya untuk memimpin rakyatnya (dia lapar untuk orang lain), lambang tidak mementingkan diri sendiri;
- g. **Pita "Djojo ing Bojo"** adalah bahan pengikat atau mempersatukan, lambang Persatuan;
- h. **Sayap dan ekor** berbulu 17, 8, 4 dan 5 atau 17-8-1945, lambang Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia
- i. **Warna** Dengan Keberanian, Kesucian, dan Penderitaan dapat tercapai hasil yang gilang gemilang.
- j. **Lambang** Kediri tetap Waspada dan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan Keberanian, Kesucian, Keteguhan dan tidak takut Penderitaan untuk mencapai hasil yang Gilang Gemilang (Aman dan Makmur).





## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2024 tepat pada waktunya. Laporan ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024 ini disusun untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebagai bahan evaluasi serta pertimbangan bagi Pemerintahan Pusat maupun Pemerintah Kota Kediri dalam pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di waktu yang akan datang dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan masyarakat. Regulasi penyusunan LPPD yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan menyajikan capaian kinerja makro, IKK hasil (outcome) urusan Pemerintahan wajib dan pilihan, IKK fungsi penunjang urusan Pemerintahan, serta substansi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan laporan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2024 ini adalah tahun keempat periode kedua dimana Pemerintah Kota Kediri telah memperkenalkan “Harmoni Kediri *The Service City*” sebagai sebuah brand Kota Kediri dimana *tagline* tersebut diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan mengakar di seluruh elemen Pemerintah Kota Kediri sehingga siap memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholders internal maupun eksternal demi mewujudkan kesejahteraan, kemajuan dan kemakmuran masyarakat di Kota Kediri.

Kami menyadari bahwa selama penyelenggaraan pemerintahan ini tidak luput dari kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun, munculnya inovasi serta rekomendasi dari Pemerintah maupun masyarakat senantiasa kami harapkan. Semuanya demi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Kediri



ke depan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan zaman dan perkembangan masyarakat sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel.

Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas bantuan dan kerjasamanya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Akhir kata kami berharap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang telah disusun ini dapat dijadikan motivasi serta komitmen bersama untuk meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah di Kota Kediri agar kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Kota Kediri dapat terwujud. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan pada kita semua dalam mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan Negara. Aamiin ya.

Kediri, 28 Maret 2025



**VINANDA PRAMESWATI, S.H.M.Kn.**



<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Penjelasan Umum .....	2
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) .....	31
<b>BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>	
<b>DAERAH</b> .....	<b>39</b>
2.1 2.1 Capaian Kinerja Makro .....	39
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia.....	39
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	42
2.1.3 Angka Pengangguran .....	42
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi .....	43
2.1.5 Pendapatan Per Kapita.....	44
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini) .....	46
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .....	47
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil .....	49
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan .....	65
2.3 Capaian Kinerja .....	65
2.3.1 Skala Capaian Kinerja .....	65
2.3.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan.....	66
2.3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	73
2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi .....	82
2.3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).....	95
2.3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	109
2.3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya .....	143
2.3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. ....	149



### BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

218

### BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

<b>MINIMAL</b> .....	<b>241</b>
4.1      Urusan Pendidikan .....	241
<u>4.1.1</u> 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar .....	241
<u>4.1.2</u> Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah....	241
<u>4.1.3</u> Realisasi .....	241
<u>4.1.4</u> Alokasi Anggaran .....	246
<u>4.1.5</u> Dukungan Personil.....	247
<u>4.1.6</u> Permasalahan dan Solusi.....	247
4.2      Urusan Kesehatan .....	248
<u>4.2.1</u> Jenis Pelayanan Dasar .....	248
<u>4.2.2</u> Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah....	249
<u>4.2.3</u> Realisasi .....	250
<u>4.2.4</u> Alokasi Anggaran .....	265
<u>4.2.5</u> Dukungan Personil.....	265
<u>4.2.6</u> Permasalahan dan Solusi.....	266
4.3      Urusan Pekerjaan Umum .....	276
<u>4.3.1</u> Jenis Pelayanan Dasar .....	276
<u>4.3.2</u> Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah....	276
<u>4.3.3</u> Realisasi .....	276
<u>4.3.4</u> Alokasi Anggaran .....	281
<u>4.3.5</u> Dukungan Personil.....	282
<u>4.3.6</u> Permasalahan dan Solusi.....	282
4.4      Urusan Perumahan Rakyat .....	283
<u>4.4.1</u> Jenis Pelayanan Dasar .....	283
<u>4.4.2</u> Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah....	284



4.4.3	Realisasi .....	284
4.4.4	Alokasi Anggaran .....	305
4.4.5	Dukungan Personil.....	306
4.4.6	Permasalahan dan Solusi.....	306
4.5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	307
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	307
4.5.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah.....	307
4.5.3	Realisasi .....	308
4.5.4	Alokasi Anggaran .....	316
4.5.5	Dukungan Personil.....	316
4.5.6	Permasalahan dan Solusi.....	317
<b>10.</b>	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) .....</b>	<b>317</b>
4.6	Urusan Sosial .....	319
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar .....	319
4.6.2	Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah....	319
4.6.3	Realisasi .....	319
4.6.4	Alokasi Anggaran .....	335
4.6.5	Dukungan Personil.....	335
4.6.6	Permasalahan dan Solusi.....	336
4.7	Program dan Kegiatan .....	338
4.7.1	Urusan Pendidikan.....	338
4.7.2	Urusan Kesehatan .....	349
	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>365</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kediri Tahun 2024 yang merupakan penjabaran tahunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2020-2024.

Tuntutan terhadap peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah semakin besar. Pemerintah mengeluarkan berbagai aturan tentang akuntabilitas pada bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran maupun pelaporan. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa kepala daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Berdasarkan amanat Pasal 70 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan digunakan sebagai bahan evaluasi pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, apabila Kepala Daerah tidak menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) akan dikenai sanksi

Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, Pemerintah Kota Kediri menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 yang memuat tentang Kinerja Makro, IKK hasil (*outcome*) urusan wajib dan pilihan, serta IKK fungsi penunjang urusan Pemerintahan.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), penilaian, perumusan kebijakan, dan pembinaan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala



Daerah menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan ini disusun dengan pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### 1.1.1 Penjelasan Umum

#### a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Sebagai sebuah wilayah pemerintahan daerah, Kota Kediri dibentuk dan ditetapkan sebagai Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)

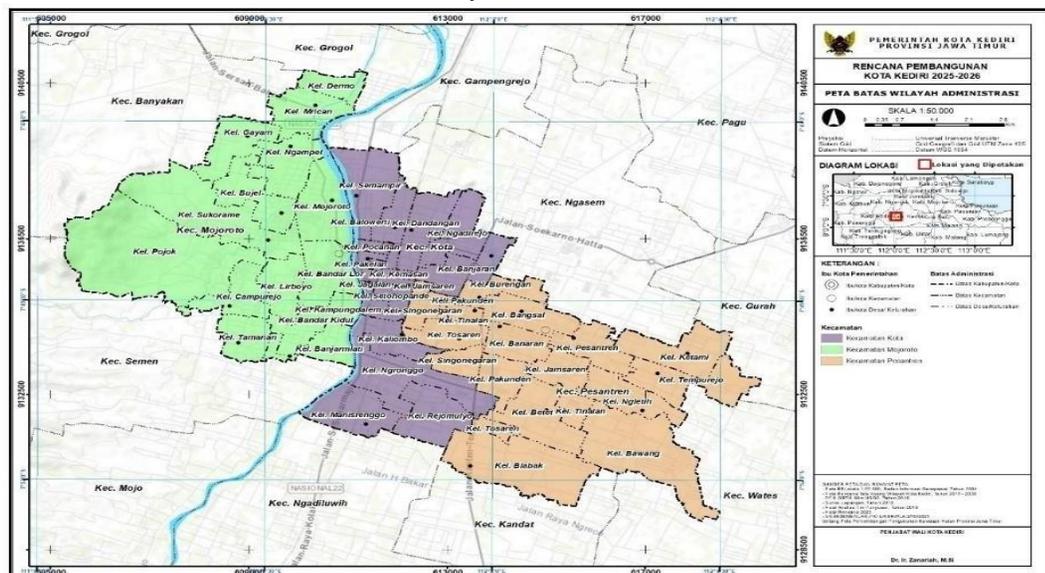
#### b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis, Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara  $111^{\circ}57'$ - $112^{\circ}04'$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}46'$ - $7^{\circ}52'$  Lintang Selatan dengan luas 67,1995 km<sup>2</sup>. Dari aspek topografi, Kota Kediri terletak pada ketinggian rata-rata 67 m di atas permukaan laut, dengan tingkat kemiringan 0-40%. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota dan

Kecamatan Pesantren, dengan luasan masing - masing kecamatan adalah Kecamatan Mojojoto sebesar 26,9335 km<sup>2</sup> terdiri dari 14 kelurahan, Kecamatan Kota sebesar 15,9501 Km<sup>2</sup> terdiri dari 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren sebesar 24,3159 Km<sup>2</sup> terdiri dari 15 kelurahan, total terdiri dari 46 Kelurahan, berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen
- Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec. Grogol

Gambar 1.1  
Peta Wilayah Kota Kediri



Sumber: RPD Kota Kediri Tahun 2025-2026

Kondisi topografi wilayah Kota Kediri relatif datar, yaitu dengan ketinggian rata-rata 71 meter di atas permukaan laut dan sebagian besar merupakan dataran rendah dengan kemiringan antara 0- 2% seluas 5,737 Ha atau 90,49%. Mayoritas ketinggian wilayah Kota Kediri (80,17%) berada pada 63m sampai 100m dari permukaan laut yang terletak sepanjang sisi kiri dan kanan Kali Brantas. Ketinggian antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang dengan ketinggian 300 mdpl dan Gunung Klotok 672 mdpl di bagian barat Kecamatan Mojojoto. Untuk Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan 0-2%. Untuk Kecamatan Pesantren kondisi topografi wilayah relatif datar,



yaitu pada kemiringan antara 0 s/d 15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl.

Sungai Brantas mengalir dari selatan ke utara sepanjang 7 Km, memisahkan wilayah Kota Kediri. Wilayah barat sungai menjadi wilayah Kecamatan Mojoroto, sedangkan timur sungai terdiri dari Kecamatan Pesantren dan Kecamatan Kota.

Secara Geologi Kota Kediri terbagi atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto memiliki endapan alluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur. Pada wilayah Kecamatan Kota, jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batumannya termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Jenis tanah di wilayah Kota Kediri adalah alluvial coklat kelabu dan mediteran.

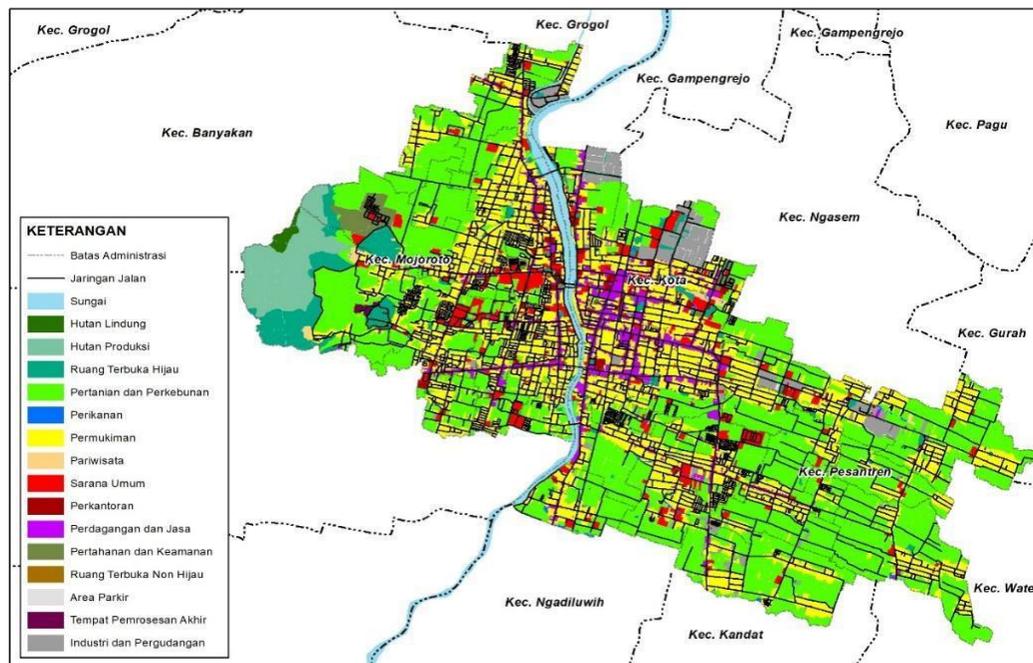
Keberadaan Sungai Brantas yang berada di tengah-tengah kota Kediri, mengalir dari arah selatan ke arah utara. Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai yang mengalir menuju Sungai Brantas. Sungai tersebut antara lain :

1. Sungai Kresek sepanjang 5,87 km Kecamatan Pesantren;
2. Sungai Parang 3,00 km Kecamatan Mojoroto;
3. Sungai Kedak 5,84 km Kecamatan Mojoroto;
4. Sungai Ngampel 1,38 km Kecamatan Mojoroto;
5. Sungai Tawang 7,46 km Kecamatan Kota; dan
6. Sungai Bruno 1,93 km Kecamatan Mojoroto

Penggunaan lahan di wilayah Kota Kediri cenderung mengikuti pola yang berkembang secara linier mengikuti jalan-jalan utama kota.



Gambar 1.2  
Penggunaan Lahan Kota Kediri



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri

Penggunaan Lahan di Kota Kediri bisa dilihat lebih jelas menurut Kecamatan dimana 63% dari Total Lahan di Kecamatan Kota dimanfaatkan untuk perkantoran, perdagangan jasa, industri, permukiman dan wisata kota, sedangkan sisanya untuk pemanfaatan Persawahan, Fasilitas umum dan sosial serta lahan kosong . Untuk Kecamatan Mojoroto pemanfaatan lahan masih didominasi oleh Persawahan, tanah Kosong dan Hutan sebesar 67,48% sedangkan 32,52% digunakan untuk pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta permukiman. Untuk Kecamatan Pesantren, dominasi penggunaan lahannya sama dengan Kecamatan Mojoroto yaitu sebesar 58,81% dan untuk sisanya dimanfaatkan untuk perkantoran, industri, home industri, permukiman serta pertanian.

### c. Jumlah Penduduk

Modal Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam pembangunan. Pemerintah daerah berkewajiban untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Pembangunan yang berwawasan kependudukan



akan berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan

Secara administratif, penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 tercatat berjumlah 301.424 jiwa, mengalami kenaikan sebesar 2.732 jiwa atau naik 0,90 % jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 298.692 jiwa. Kenaikan jumlah tersebut disebabkan karena perpindahan penduduk dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Dengan luas wilayah sebesar 67,1995/Km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 sebesar 4.486 jiwa/Km<sup>2</sup>. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Kota sebesar 5.681 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Mojoroto sebesar 4.349 jiwa/km<sup>2</sup> dan Kecamatan Pesantren sebesar 3.878 jiwa/km<sup>2</sup>. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan aktivitas perekonomian akibat kegiatan perdagangan dan jasa dan sebagai pusat pelayanan di Kecamatan Kota menyebabkan terjadinya pertumbuhan penduduk karena mobilitas penduduk, selain pertumbuhan secara alami.

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri pada tahun 2024 lebih kecil dari penduduk berjenis kelamin perempuan, dengan komposisi 149,638 jiwa penduduk laki-laki (49,6%) dan 151,741 jiwa penduduk perempuan (50,4%). Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1  
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

NO	USIA	MOJOROTO			KOTA			PESANTREN			JUMLAH			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	0 - 4	3.739	3.548	7.287	2.731	2.566	5.297	2.957	2.745	5.702	9.427	8.859	18.286	6,07
2	5 - 9	4.424	4.206	8.630	3.247	3.197	6.444	3.515	3.279	6.794	11.186	10.682	21.868	7,25
3	10 - 14	5.102	4.760	9.862	3.831	3.522	7.353	3.954	3.739	7.693	12.887	12.021	24.908	8,26
4	15 - 19	4.984	4.918	9.902	3.641	3.349	6.990	3.762	3.778	7.540	12.387	12.045	24.432	8,11
5	20 - 24	4.785	4.725	9.510	3.597	3.488	7.085	3.826	3.746	7.572	12.208	11.959	24.167	8,02
6	25 - 29	4.237	4.306	8.543	3.338	3.302	6.640	3.433	3.392	6.825	11.008	11.000	22.008	7,30
7	30 - 34	4.109	4.011	8.120	3.047	3.053	6.100	3.127	3.138	6.265	10.283	10.202	20.485	6,80
8	35 - 39	4.039	4.090	8.129	3.156	3.136	6.292	3.103	3.107	6.210	10.298	10.333	20.631	6,84
9	40 - 44	4.986	4.941	9.927	3.903	3.800	7.703	3.882	3.955	7.837	12.771	12.696	25.467	8,45
10	45 - 49	4.428	4.326	8.754	3.376	3.276	6.652	3.617	3.458	7.075	11.421	11.060	22.481	7,46



11	50 - 54	3.852	3.759	7.611	2.921	2.925	5.846	3.116	3.060	6.176	9.889	9.744	19.633	6,51
12	55 - 59	3.358	3.654	7.012	2.559	2.928	5.487	2.816	2.909	5.725	8.733	9.491	18.224	6,05
13	60 - 64	2.412	2.825	5.237	1.968	2.520	4.488	1.979	2.308	4.287	6.359	7.653	14.012	4,65
14	65 - 69	1.852	2.137	3.989	1.708	2.104	3.812	1.522	1.729	3.251	5.082	5.970	11.052	3,67
15	70 - 74	1.067	1.257	2.324	998	1.292	2.290	946	1.039	1.985	3.011	3.588	6.599	2,19
16	> 74	998	1.613	2.611	860	1.557	2.417	875	1.268	2.143	2.733	4.438	7.171	2,38
Total		58.372	59.076	117.448	44.881	46.015	90.896	46.430	46.650	93.080	149.683	151.741	301.424	100,00

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri 2024

Pada Tabel 1.1 dan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Kota Kediri masih didominasi oleh penduduk usia produktif yakni usia 15 tahun hingga 64 tahun sebanyak 211.540 jiwa atau sekitar 70,19% dari total jumlah penduduk. Kota Kediri saat ini mengalami bonus demografi atau jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding usia non produktif, dimana hal tersebut merupakan modal dalam pembangunan, sehingga dalam memaksimalkannya Pemerintah Kota Kediri telah bekerjasama dengan beberapa pihak swasta guna membuka peluang investasi sehingga membuka lapangan pekerjaan.

Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, penduduk Kota Kediri didominasi oleh tingkat Pendidikan SLTA/ sederajat sebanyak 90.247 jiwa atau sebesar 29,94% dari jumlah penduduk di Kota Kediri. Pemerintah Kota Kediri terus meningkatkan tingkat Pendidikan penduduk sebagai upaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Kediri yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Adapun komposisi penduduk Kota Kediri berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.2. berikut:

Tabel 1.2  
Komposisi Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	MOJOROTO			KOTA			PESANTREN			JUMLAH			%
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	TIDAK/BELUM SEKOLAH	10.941	10.603	21.544	8.388	8.021	16.409	9.004	8.608	17.612	28.333	27.232	55.565	18,43
2	BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	5.939	5.863	11.802	4.498	4.369	8.867	4.638	4.519	9.157	15.075	14.751	29.826	9,90
3	TAMAT SD/SEDERAJAT	7.332	9.038	16.370	4.646	6.233	10.879	6.765	8.086	14.851	18.743	23.357	42.100	13,97
4	SLTP/SEDERAJAT	8.314	8.309	16.623	6.547	6.721	13.268	7.169	7.244	14.413	22.030	22.274	44.304	14,70
5	SLTA/SEDERAJAT	18.407	16.422	34.829	14.840	13.737	28.577	14.089	12.752	26.841	47.336	42.911	90.247	29,94
6	DIPLOMA I/II	303	493	796	257	400	657	215	351	566	775	1.244	2.019	0,67
7	AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	855	1.377	2.232	764	1.033	1.797	618	903	1.521	2.237	3.313	5.550	1,84



8	DIPLOMA IV/ STRATA I	5.726	6.490	12.216	4.528	5.177	9.705	3.648	3.939	7.587	13.902	15.606	29.508	9,79
9	STRATA II	540	466	1.006	386	307	693	270	238	508	1.196	1.011	2.207	0,73
10	STRATA III	15	15	30	27	17	44	14	10	24	56	42	98	0,03
<b>TOTAL</b>		<b>58.372</b>	<b>59.076</b>	<b>117.448</b>	<b>44.881</b>	<b>46.015</b>	<b>90.896</b>	<b>46.430</b>	<b>46.650</b>	<b>93.080</b>	<b>149.683</b>	<b>151.741</b>	<b>301.424</b>	<b>100</b>

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri 2024

Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kediri antara tahun 2019 sampai dengan 2024 adalah sekitar 0,028 per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 0,014, sementara pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020 sebesar -0,009.

Selain disebabkan oleh terjadi perpindahan penduduk dan selisih antara jumlah kelahiran dan kematian. Pertumbuhan negatif tersebut juga disebabkan adanya perbaikan administrasi kependudukan. Tingkat pertumbuhan penduduk Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3  
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kota Kediri Tahun 2019 - 2024

Uraian	Tahun					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk	294.950	292.262	292.597	294.692	298.820	301.424
Tingkat Pertumbuhan Penduduk	0,007	-0,009	0,001	0,007	0,014	0,008

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri

Jumlah penduduk usia kerja Kota Kediri pada tahun 2024 sebanyak 209,338 jiwa atau sekitar 69.44% dari total jumlah penduduk, sedangkan jumlah angkatan kerja pada tahun 2024 sebanyak 166.321 orang atau sekitar 55,17 % dari jumlah penduduk. Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2024 mencapai 71,83 %. Kondisi ketenagakerjaan Kota Kediri tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut. tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4  
Kondisi Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Penduduk usia produktif	221.642	232.489	208.559	209.388	212.192
2	Angkatan Kerja	152.265	156.591	163.821	166.321	165.918
3	Tingkat Partisipatif Angkatan Kerja (TPAK) (%)	66,00	67,35	69,93	71,83	70,74



No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
4	Pencari Kerja Terdaftar	668	528	761	808	1002
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6.21	6.37	4,38	4,06	3.91
6	Upah Minimum Kota (UMK) (Rp)	2.060.924,76	2.085.924,76	2.118.116,63	2.415.362,00	2.572.361,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri diolah

Tingkat pengangguran terbuka Kota Kediri tahun 2024 sebesar 3,91%, turun dari tahun 2023 sebesar 4,06%. Pengurangan TPT tersebut menunjukkan keberhasilan program pengurangan TPT melalui pelatihan kerja dan pemberian bantuan modal oleh pemerintah Kota Kediri. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja, upah minimum Kota Kediri dinaikkan dari Rp. 2.415.362,00 menjadi Rp. 2.572.361,00

#### d. Jumlah kecamatan dan kelurahan

Secara administratif wilayah Kota Kediri terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Kecamatan Mojoroto terdiri atas 14 kelurahan, Kecamatan Kota 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren 15 kelurahan. Secara keseluruhan di Kota Kediri terdapat 46 kelurahan.

Tabel 1.5  
Data Kecamatan dan Kelurahan

Kecamatan Mojoroto		Kecamatan Kota		Kecamatan Pesantren	
1	Bujel	1	Banjaran	1	Bangsals
2	Banjarmlati	2	Balowerti	2	Banaran
3	Bandar Kidul	3	Dandangan	3	Bawang
4	Bandar Lor	4	Jagalan	4	Betet
5	Campurejo	5	Kaliombo	5	Blabak
6	Dermo	6	Kampung Dalem	6	Burengan
7	Gayam	7	Kemasan	7	Jamsaren
8	Lirboyo	8	Manisrenggo	8	Ketami
9	Mrican	9	Ngadirejo	9	Ngletih
10	Mojoroto	10	Ngronggo	10	Pakunden
11	Ngampel	11	Pakelan	11	Pesantren
12	Pojok	12	Pocanan	12	Singonegaran



Kecamatan Mojojoto		Kecamatan Kota		Kecamatan Pesantren	
13	Sukorame	13	Rejomulyo	13	Tempurejo
14	Tamanan	14	Ringin Anom	14	Tinalan
		15	Semampir	15	Tosaren
		16	Setono Gedong		
		17	Setono Pande		

**e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri, jumlah perangkat daerah adalah 28 (Dua Puluh Delapan) Perangkat Daerah terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Dinas terdiri dari 17 Dinas yaitu :
  - 4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - 4.2 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
  - 4.3 Dinas Perhubungan
  - 4.4 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
  - 4.5 Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
  - 4.6 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja
  - 4.7 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - 4.8 Dinas Kesehatan
  - 4.9 Dinas Pendidikan
  - 4.10 Dinas Sosial
  - 4.11 Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
  - 4.12 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
  - 4.13 Dinas Komunikasi dan Informatika



- 4.14 Dinas Perdagangan dan Perindustrian
- 4.15 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- 4.16 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 4.17 Satuan Polisi Pamong Praja
- 5. Badan terdiri dari 5 Badan, yaitu:
  - 5.1 Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 5.2 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 5.3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
  - 5.4 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
  - 5.5 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6. Kecamatan terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu :
  - 6.1 Kecamatan Mojoroto
  - 6.2 Kecamatan Kota
  - 6.3 Kecamatan Pesantren

Jumlah seluruh Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri Tahun 2024 berjumlah 4.381 orang. Struktur ASN ini menjadi modal dasar besar bagi pengembangan kinerja aparatur negara. Berbagai bentuk pelatihan sebenarnya sudah banyak dilakukan baik untuk tingkat pejabat maupun staf, tetapi orientasi pelatihan lebih banyak pada peningkatan kapasitas intelektual dan belum pada perubahan *mindset* birokrasi. Begitu pentingnya pelatihan perubahan *mindset* birokrasi, sehingga menjadi salah satu area perubahan dalam program reformasi birokrasi. *Mindset* aparatur birokrasi menjadi penentu tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berkualitas dalam rangka mewujudkan kualitas pelayanan publik yang prima. Berikut ini merupakan rincian data ASN menurut tingkat pendidikan di Kota Kediri :

Tabel 1.6  
Data Pegawai Pemerintah Kota Kediri Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	2023	2024
Sekolah Dasar (SD)	17	12
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	40	32



Sekolah Menengah Atas (SMA)	717	659
Diploma I/Akta I / DII	27	4
Diploma III/Akta III	563	607
Diploma IV/Akta IV / S1	2.456	2.567
S2/Pasca Sarjana	459	484
S3/Doktor/Ph.D -	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4 279</b>	<b>4 381</b>

Sumber: BKPSDM Kota Kediri, 2024

#### f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah

Pada perubahan anggaran tahun 2024, pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 5,32% dari Rp1.378.902.726.992,00 menjadi Rp1.452.213.119.779. Kenaikan pendapatan daerah tersebut berasal dari kenaikan PAD sebesar Rp11.325.664.958,00 dan kenaikan pendapatan transfer sebesar Rp61.984.727.829. Rincian perubahan pendapatan daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Komponen Pendapatan Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pendapatan Asli Daerah	341.655.946.093,00	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,14
Pendapatan Transfer	1.082.584.125.601,00	1.151.764.407.847,00	1.117.492.585.695,00	97,02
Lain-Lain Pendapatan	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.424.240.071.694,00</b>	<b>1.501.669.263.626,00</b>	<b>1.507.326.107.383,27</b>	<b>100,38</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Target pendapatan daerah tersebut terealisasi sebesar Rp1.507.326.107.383,27 atau 100,38%. Tidak semua komponen pendapatan daerah dapat terealisasi sesuai/melebihi target yang ditetapkan. Pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang semula direncanakan sebesar Rp. 341.655.946.093,00 terdapat perubahan menjadi Rp. 349.904.855.779,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 8.248.909.686,00. Kenaikan target objek PAD diuraikan sebagai berikut, Pajak Daerah naik sebesar Rp5.953.378.814,00, Retribusi Daerah turun sebesar Rp10.649.045.465,00, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan naik sebesar Rp425.037.484,00 dan Lain-Lain PAD yang Sah



naik sebesar Rp12.519.538.853,00. Rincian perubahan target dan realisasi PAD disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024**

Komponen Pendapatan Asli Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pajak Daerah	136.720.000.000,00	142.673.378.814,00	149.065.798.766,00	104,48
Retribusi Daerah	29.508.590.625,00	18.859.545.160,00	23.209.113.784,11	123,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.375.144.582,00	2.800.182.066,00	2.800.182.066,32	100,00
Lain-lain PAD yang Sah	173.052.210.886,00	185.571.749.739,00	214.758.427.071,84	115,73
<b>Jumlah</b>	<b>341.655.946.093,00</b>	<b>349.904.855.779,00</b>	<b>389.833.521.688,27</b>	<b>111,41</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 dari target sebesar Rp 349.904.855.779,00 terealisasi sebesar Rp389.833.521.688,27 atau 111,41%. Seluruh objek PAD terealisasi sesuai/lebih dari target yang ditetapkan.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang semula ditargetkan sebesar sebesar Rp. 1.082.584.125.601,00 terdapat perubahan menjadi sebesar Rp. 1.151.764.407.847,00 atau terdapat kenaikan sebesar Rp. 69.180.282.246,00. Rincian perubahan target dan realisasi Pendapatan Transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024**

Komponen Pendapatan Transfer	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	955.375.360.980,00	991.078.222.730,00	980.101.086.258,00	98,89
Pendapatan Transfer Antar Daerah	127.208.764.621,00	160.686.185.117,00	137.391.499.437,00	85,50
<b>Jumlah</b>	<b>1.082.584.125.601,00</b>	<b>1.151.764.407.847,00</b>	<b>1.117.492.585.695,00</b>	<b>97,02</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Dalam rangka mengalokasikan kenaikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan, Pemerintah Kota Kediri melakukan perubahan alokasi anggaran belanja tahun anggaran 2024. Belanja Daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp1.795.299.191.714,00 mengalami



peningkatan menjadi sebesar Rp1.891.393.326.713 atau naik sebesar Rp96.094.134.999,00. Peningkatan Belanja Daerah berasal dari kenaikan Belanja Operasi sebesar Rp43.434.113.945,89, Belanja Modal naik sebesar Rp57.830.171.053,11, Belanja Tidak Terduga berkurang sebesar Rp5.120.150.000,00 dan Belanja Transfer berkurang sebesar Rp50.000.000,00. Rincian perubahan anggaran dan realisasi Belanja Daerah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.10**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Komponen Belanja Daerah	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Operasi	1.603.506.279.016,00	1.646.940.392.961,89	1.400.659.943.318,00	85,05
Belanja Modal	179.097.487.198,00	236.927.658.251,11	152.123.432.240,00	64,21
Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	6.879.850.000,00	5.498.896.830,00	79,93
Belanja Transfer	695.425.500,00	645.425.500,00	584.520.300,00	90,56
<b>Jumlah</b>	<b>1.795.299.191.174,00</b>	<b>1.891.393.326.713,00</b>	<b>1.558.866.792.688,00</b>	<b>82,42</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Mengacu pada target yang ditetapkan pada perubahan APBD, Belanja Daerah terealisasi sebesar 82,42%. Persentase realisasi Belanja Daerah paling besar pada Belanja Transfer, diikuti Belanja Operasi, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal.

Belanja Operasi yang semula dianggarkan sebesar Rp1.603.506.279.016,00 terdapat perubahan anggaran menjadi sebesar Rp. 1.646.940.392.961,89 atau naik sebesar Rp43.434.113.945,89. Dari anggaran perubahan Rp. 1.646.940.392.961,89 tersebut terealisasi sebesar Rp. 1.400.659.943.318,00 atau 85,05%. Rincian perubahan anggaran dan realiasi Belanja Operasi disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.11**  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024**

Komponen Belanja Operasi	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Pegawai	725.292.844.506,00	673.757.843.211,00	588.328.664.564,00	87,32



Belanja Barang dan Jasa	737.347.197.990,00	831.020.425.130,89	680.634.468.992,00	81,90
Belanja Hibah	121.694.566.520,00	128.977.154.620,00	124.642.393.262,00	96,64
Belanja Bantuan Sosial	19.171.670.000,00	13.184.970.000,00	7.054.416.500,00	53,50
<b>Jumlah</b>	<b>1.603.506.279.016,00</b>	<b>1.646.940.392.961,89</b>	<b>1.400.659.943.318,00</b>	<b>85,05</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa presentase realisasi tertinggi dari Belanja Operasi adalah Belanja Hibah, diikuti Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Bantuan Sosial.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, Belanja Modal yang semula dianggarkan sebesar Rp179.097.487.198,00 mengalami perubahan sebesar Rp236.927.658.251,11 atau naik sebesar Rp57.830.171.053,11. Dari anggaran perubahan belanja modal sebesar Rp. Rp236.927.658.251,11 tersebut terealisasi sebesar Rp.152.123.432.240 atau 64,21%. Rincian perubahan anggaran dan realisasi belanja modal disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 1.12**  
**Perubahan Belanja Modal Tahun Anggaran 2024**

Komponen Belanja Modal	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.964.980.646,00	101.731.825.848,11	61.652.424.528,00	60,50
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	70.669.392.062,00	63.816.844.969,00	46.532.939.471,00	72,92
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	68.280.536.390,00	70.914.600.084,00	43.639.455.090,00	61,54
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	132.578.100,00	412.387.350,00	403.724.289,00	97,90
Belanja Modal Aset Lainnya		2.000.000,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>179.097.487.198,00</b>	<b>236.927.658.251,11</b>	<b>152.123.432.240,00</b>	<b>64,21%</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri



Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa presentase realisasi tertinggi dari belanja modal adalah belanja modal aset tetap lainnya, diikuti modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi dan belanja modal peralatan dan mesin.

Memperhatikan kondisi yang berkembang pada tahun 2024 Belanja Tidak Terduga juga mengalami perubahan. Anggaran dan realisasi belanja tidak terduga dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.13  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	6.879.850.000,00	5.498.896.830,00	79,93

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Sampai dengan akhir tahun 2024, belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp5.498.896.830,00 atau 79,93%. Realisasi belanja tersebut dipergunakan untuk pengembalian dana bantuan keuangan khusus sebesar Rp14.323.830,00 dan bantuan sosial tidak direncanakan sebesar Rp5.484.573.000,00.

Belanja transfer pada APBD tahun anggaran 2024 yang semula dianggarkan sebesar Rp.695.425.500,00 mengalami perubahan menjadi sebesar Rp645.425.500,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp50.000.000,00. Anggaran dan Realiasi belanja transfer dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.14  
**Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2024**

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
Belanja Bantuan	695.425.500,00	645.425.500,00	584.520.300,00	90,56

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Sampai dengan akhir tahun 2024, belanja transfer terealisasi sebesar 90,56%. Perubahan belanja daerah beserta realisasinya yang telah diuraikan diatas terdistribusi pada masing-masing perangkat daerah dengan rincian sebagaimana terlihat pada tabel berikut.



Tabel 1.15  
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Menurut Perangkat Daerah  
Tahun Anggaran 2024

No	Perangkat Daerah	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
1	Dinas Pendidikan	328.828.314.376,00	295.188.754.982,00	89,73
2	SMPN 1 Kediri	2.210.850.000,00	2.138.903.721,00	96,75
3	SMPN 2 Kediri	2.048.600.000,00	2.023.902.737,00	98,79
4	SMPN 3 Kediri	2.074.050.000,00	2.041.368.406,00	98,42
5	SMPN 4 Kediri	2.070.500.000,00	2.065.621.865,00	99,76
6	SMPN 5 Kediri	2.078.450.000,00	2.011.487.174,00	96,78
7	SMPN 6 Kediri	2.362.274.850,00	2.303.544.110,00	97,51
8	SMPN 7 Kediri	1.958.500.000,00	1.891.160.170,00	96,56
9	SMPN 8 Kediri	2.058.900.000,00	2.040.514.583,00	99,11
10	SMPN 9 Kediri	1.502.902.850,00	1.417.477.704,00	94,32
10	Dinas Kesehatan (termasuk RSUD Kilisuci)	169.556.914.424,00	142.227.867.814,00	83,88
11	Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran	355.081.213.271,00	254.495.265.448,00	71,67
12	Puskesmas Mrican	6.156.816.991,00	5.234.095.444,00	85,01
13	Puskesmas Campurejo	7.383.218.104,00	6.144.934.902,00	83,23
14	Puskesmas Sukorame	7.993.661.887,00	6.136.602.057,00	76,77
15	Puskesmas Kota Wilayah Utara	5.402.437.375,00	5.064.949.373,00	93,75
16	Puskesmas Kota Wilayah Selatan	6.665.207.602,00	6.023.876.012,00	90,38
17	Puskesmas Balowerti	8.376.693.588,00	7.606.435.678,00	90,80
18	Puskesmas Pesantren I	7.337.041.591,00	6.369.719.294,00	86,82
19	Puskesmas Pesantren II	7.855.540.091,00	7.432.921.937,00	94,62
20	Puskesmas Ngletih	7.517.369.816,00	6.842.813.220,00	91,03
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	135.123.273.151,00	95.608.431.156,00	70,76
22	Dinas Perumahan dan Kawasan	20.066.198.855	16.798.121.070	83,71



No	Perangkat Daerah	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
	Pemukiman			
23	Satuan Polisi Pamong Praja	23.899.852.007	19.696.953.265	82,39
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.321.231.578,00	2.890.234.804,00	82,41
25	Dinas Sosial	26.899.994.154,00	23.704.991.057,00	88,12
26	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	17.464.737.149	15.339.304.275	87,83
27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.343.279.959	14.063.125.301	91,66
28	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan	55.879.744.719	49.620.398.273,00	88,80
29	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.176.151.888	8.986.995.489	88,31
30	Dinas Perhubungan	38.794.065.405	35.888.284.465,00	92,51
31	Dinas Komunikasi dan Informatika	17.882.371.133	15.552.557.153	86,97
32	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja	47.873.320.921	45.192.575.306	94,40
33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.490.588.632	8.626.400.976,00	90,89
34	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	29.978.548.991	27.425.563.685	91,48
35	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.557.433.257	5.385.470.889	82,13
36	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	40.241.883.307	25.916.546.295	64,40



No	Perangkat Daerah	Setelah Perubahan	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
37	Sekretariat Daerah	77.122.346.685	68.570.991.886,00	88,91
38	Sekretariat DPRD	98.108.232.229	70.915.922.452,00	72,28
39	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	17.218.112.880	15.117.302.620	87,80
40	Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	40.288.212.986	37.292.674.254,00	92,56
41	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.524.583.388	11.246.651.827	89,80
42	Inspektorat	13.349.584.719	12.079.346.052,00	90,48
43	Kecamatan Mojoroto (termasuk kelurahan)	50.049.710.557	40.185.634.678	80,29
44	Kecamatan Kota (termasuk kelurahan)	62.656.878.647	40.185.634.678	64,14
45	Kecamatan Pesantren (termasuk kelurahan)	49.575.117.430	41.514.504.554	83,74
46	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.214.161.238	36.361.508.719,00	97,71
<b>Jumlah</b>		<b>1.891.393.326.713</b>	<b>1.558.866.792.688,00</b>	<b>82,42</b>

Sumber Data : BPPKAD Kota Kediri

Memperhatikan realisasi belanja per perangkat daerah tersebut diketahui bahwa tingkat realisasi seluruh belanja perangkat daerah tahun anggaran 2024 sebesar 82,42%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Kediri dapat melaksanakan program dan kegiatannya dengan baik.

Pada perubahan APBD tahun anggaran 2024, Penerimaan netto sebesar Rp. 389.724.063.087,00 meningkat sebesar Rp18.664.943.067,00 dari anggaran semula sebesar



Rp.371.059.120.020,00 dan terealisasi sebesar Rp389.724.063.087,00 atau 100%.

### 1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Pemerintah Kota Kediri menetapkan prioritas pembangunan pada RKPD tahun 2024 dengan mengacu pada prioritas Nasional yang tercantum dalam RKP 2024 dan prioritas Provinsi Jawa Timur yang tercantum pada RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Dalam menyusun prioritas dan sasaran pembangunan, Pemerintah Kota Kediri juga memperhatikan isu strategis pembangunan

#### a. Permasalahan strategis pemerintah daerah

Memperhatikan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, masih terdapat permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan melalui berbagai kebijakan dan program yang terencana, sinergis dan berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah di Pemerintah Kota Kediri berdasarkan RKPD 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Keberagaman suku, ras dan agama dalam masyarakat berpotensi menimbulkan konflik
- b. Kualitas infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan totoar mengalami penurunan akibat penggunaan setiap tahun
- c. Kualitas sarana-prasarana angkutan umum dan fasilitas jalan perlu ditingkatkan
- d. Gedung-gedung milik Pemerintah Kota Kediri rata-rata berusia melebihi umur ekonomis
- e. Lapangan kerja terbatas dan kompetensi tenaga kerja belum sesuai kebutuhan pasar kerja
- f. Kualitas sarana-prasarana sekolah masih belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran
- g. Perlunya peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan.
- h. Kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat masih kurang
- i. Penanganan stunting masih belum optimal dalam menekan angka balita stunting



- j. Usaha mikro kecil masih belum mampu bersaing secara optimal pada tingkat nasional
- k. Ekonomi kreatif belum tumbuh dengan optimal dalam mendukung struktur ekonomi daerah
- l. Kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung perekonomian perlu ditingkatkan
- m. Integrasi penanganan kemiskinan antar perangkat daerah belum maksimal
- n. Penurunan jumlah penduduk miskin masih relatif kecil
- o. Pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat belum optimal, tercermin dari peningkata indeks gini
- p. Kualitas tata kelola dan layanan publik perlu ditingkatkan
- q. Kualitas lingkungan hidup dan ketahan terhadap bencana perlu ditingkatkan

**b. Visi dan misi kepala daerah**

Visi adalah pernyataan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi organisasi yang ditetapkan mesti menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan. Berdasarkan kondisi obyektif daerah saat ini, dan tantangan yang dihadapi, maka visi pembangunan Kota Kediri tahun 2020 – 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 adalah:

**“KOTA KEDIRI UNGGUL DAN MAKMUR DALAM HARMONI”**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya sinergi yang dinamis antara masyarakat, Pemerintah Kota dan seluruh stakeholder’s dalam merealisasikan pembangunan Kota Kediri secara terpadu. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. **Kota Kediri Unggul:** merupakan gambaran sumber daya manusia dan layanan publik Kota Kediri yang berkualitas dan berdaya saing. Keunggulan Kota Kediri tidak hanya keunggulan komparatif, tetapi juga



keunggulan kompetitif.

2. **Kota Kediri Makmur:** Merupakan kondisi kehidupan individu dan masyarakat Kota Kediri yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dan merata kesejahteraannya secara lahir dan batin. Kota Kediri yang makmur mencerminkan masyarakatnya dapat menggapai cita-cita yang ideal, berpartisipasi dalam proses pembangunan secara kreatif, inovatif dan konstruktif dalam tata kehidupan yang aman, nyaman, tenteram, rukun dan damai.
3. **Kota Kediri Harmoni:** Kota Kediri yang harmoni mencerminkan kerukunan dan toleransi antar insan masyarakat serta keselarasan dengan alam lingkungan. Harmoni tercipta apabila terdapat keseimbangan antar unsur masyarakat, keguyuban atau kerukunan masyarakat dengan turut menghargai warisan budaya dan kelestarian alam.

Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Kediri yaitu “Kota Kediri Unggul dan Makmur dalam Harmoni”. maka dirumuskan 4 (empat) Misi Kota Kediri dalam mencapai Visi pembangunan Kota Kediri 2020 – 2024 yaitu sebagai berikut :

- Misi 1 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berintegritas berorientasi pada pelayanan prima dan teknologi informasi. Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi. Untuk mewujudkan tujuan ini, ditetapkan sasaran sebagai berikut:
1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih
  2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
  3. Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
  4. Meningkatnya penerapan *Smart City*
- Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing berbasis nilai agama dan budaya, memiliki tujuan:
1. Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, sebagai berikut:
    - a. Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat.



b. Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat.

Misi 3 : Memperkuat perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif yang berkeadilan, memiliki tujuan:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya produk domestik regional bruto
  - b. Meningkatkan produk-produk unggulan daerah
  - c. Meningkatnya ekonomi kreatif
  - d. Meningkatnya jumlah investasi
  - e. Meningkatnya kinerja BUMD
  - f. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
  - g. Meningkatnya daya tarik wisata
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, yaitu: Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka.

Misi 4 : Mewujudkan Kota Kediri yang aman, nyaman dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, misi ini memiliki tujuan:

1. Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, yaitu Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan. Tujuan ini dijabarkan ke dalam sasaran, sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang
  - b. Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan
  - c. Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana
  - d. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH



**c. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan**

Memperhatikan visi dan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kediri serta mengacu RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024, maka Prioritas Pembangunan Kota Kediri tahun 2024, adalah:

- a. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
- b. Pemerataan Pembangunan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan.
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
- d. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal.
- e. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar.
- f. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim.
- g. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik

Dalam rangka mendukung pembangunan Nasional dan Jawa Timur, maka prioritas pembangunan Kota Kediri telah disinergikan dan disinkronkan dengan Prioritas Nasional dan Jawa Timur. Prioritas pembangunan Kota Kediri tercermin dari tema pembangunan Kota Kediri Tahun 2024 yang selaras dengan tema pembangunan Nasional dan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

**Tabel 1.16**  
**Keterkaitan Tema Pembangunan**

DOKUMEN	TEMA
<p>RKP</p> 	<p>Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</p>
<p>RKPD PROVINSI JAWA TIMUR</p> 	<p>Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Transformasi Ekonomi Inklusif menuju Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak</p>



**RKPD KOTA KEDIRI**



Peningkatan Daya Saing Sumberdaya Manusia Dan  
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif

Program dan kegiatan prioritas RKPD Tahun 2024 diharapkan dapat mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Kediri 2020-2024. Program dan kegiatan prioritas tahun 2024 disinkronkan dan disinergikan dengan prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Timur. Sinkronisasi program dan kegiatan prioritas Kota Kediri dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :



**Tabel 1.17**  
**Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Jawa Timur, dan Kota Kediri**

PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mendorong peningkatan (a) porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional, (b) skor pola pangan harapan, serta (c) pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan; 2) Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian dengan mendorong peningkatan (a) rasio kewirausahaan nasional, (b) pertumbuhan PDB pertanian, (c) pertumbuhan PDB perikanan, (d) pertumbuhan PDB industri pengolahan, (e) kontribusi PDB industri pengolahan, (f) nilai devisa pariwisata, (g) kontribusi PDB pariwisata, (h) penyediaan lapangan kerja per tahun, (i) pertumbuhan investasi (PMTB), (j) pertumbuhan ekspor industri pengolahan, (k) pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa, serta (l) rasio perpajakan terhadap PDB.	1. Pemulihan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Sektor Sekunder dan Pariwisata	1. Pemulihan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	1) Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk unggulan daerah Mendorong peningkatan pertumbuhan pada lapangan usaha jasa dan industri pengolahan. 2) Meningkatnya ekonomi kreatif. Meningkatkan event-event wisata yang mendatangkan pengunjung dari luar kota. 3) Meningkatnya jumlah investasi. Meningkatkan kemudahan layanan perijinan dan iklim usaha yang kondusif. 4) Meningkatnya kinerja BUMD. Peningkatan kinerja PD. BPR Kota untuk menyalurkan Kredit dengan bunga rendah melalui program "Kurnia" serta peningkatan kinerja PD Pasar dalam peningkatan volume perdagangan di Kota Kediri.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto KTI, (b) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di KTI, serta (c) penurunan penduduk miskin KTI; 2) Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan mendorong (a) laju pertumbuhan PDRB KBI, (b) IPM di KBI, serta c) penurunan persentase penduduk miskin KBI. 3)	2. Penguatan Konektivitas Antar Wilayah dalam Upaya Pemerataan Hasil Pembangunan serta Peningkatan Layanan Infrastruktur	2. Pemerataan Pembangunan wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan	1) Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan. Peningkatan kenyamanan hunian melalui pembangunan skala Rukun Tetangga (RT) dan skala kelurahan dengan program Prodamas Plus.



PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan dengan (a) menjaga angka kelahiran total (Total Fertility Ratio/ TFR) dan (b) meningkatkan persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK);</li> <li>2) Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk dengan mendorong peningkatan (a) proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial, dan (b) proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah;</li> <li>3) Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan dengan (a) menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), (b) menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), (c) menurunkan prevalensi stunting pada balita, (d) menurunkan insidensi tuberkulosis, (e) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria, (f) meningkatkan jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta, (g) menurunkan prevalensi obesitas pada penduduk &gt;18 tahun, (h) menurunkan persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun, (i) nilai rata-rata hasil PISA (membaca, matematika, sains), (j) rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, dan (k) harapan lama sekolah;</li> <li>4) Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda melalui peningkatan (a) Indeks Perlindungan Anak (IPA), (b) Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);</li> <li>5) Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan dengan mendorong kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif.</li> <li>6) Meningkatnya produktivitas dan daya saing</li> </ol>	3. Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan	3. Peningkatan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat. Peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah dan menambah jumlah sekolah menengah pertama. Penyediaan bantuan sekolah dan angkutan gratis.</li> <li>2) Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat. Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan nasional (JKN) dan peningkatan kualitas layanan kesehatan.</li> <li>3) Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meningkatkan indeks pembangunan gender, kota layak anak, kota layak pemuda.</li> <li>4) Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka. Peningkatan perlindungan sosial dengan pemberian bantuan kebutuhan pokok, rehabilitasi rumah tidak layak huni, jaminan kesehatan dan pendidikan gratis serta bantuan pendidikan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja untuk menghadapi persaingan global.</li> </ol>



PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	<p>dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk word class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.kenaikan persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif;</p> <p>7) Meningkatnya produktivitas dan daya saing dengan peningkatan (a) persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas, (b) jumlah perguruan tinggi (PT) yang masuk word class university, (c) proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi, serta (d) peningkatan peringkat global innovation index.</p>			
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	<p>1) Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya dengan mendorong (a) peningkatan Indeks Capaian Revolusi Mental, dan (b) peningkatan aktualisasi nilai-nilai pancasila;</p> <p>2) Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan dengan peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan;</p> <p>3) Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial dengan mendorong optimalisasi capaian Indeks Pembangunan Masyarakat;</p> <p>4) enguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat dengan meningkatkan Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama;</p> <p>5) Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa dengan mengoptimalkan capaian (a) Indeks</p>	4. Peningkatan Kepedulian Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	4. Peningkatan Harmonisasi Sosial dan Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Lokal	<p>1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Peningkatan peran Forum Komunikasi Antar Umat Beragama untuk membangun harmonisasi soial.</p> <p>2) Meningkatnya daya tarik wisata Memajukan kebudayaan lokal serta event-event wisata untuk menarik wisatawan.</p>



PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	<p>Pembangunan Keluarga dan (b) median usia kawin pertama perempuan.</p> <p>6) Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif dengan mendorong pencapaian nilai budaya literasi;</p>			
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	<p>1) Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar dengan mendorong (a) peningkatan yang menempati hunia layak dan terjangkau, (b) penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010, (c) peningkatan persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif), dan (d) peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan air baku (kumulatif);</p> <p>2) Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar dengan mendorong (a) penurunan waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km), (b) peningkatan persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop). (c) peningkatan kondisi jalur Kereta Api (KA) sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2, dan (d) peningkatan persentase On Time Performance (OTP) transportasi udara;</p> <p>3) Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan dengan mendorong (a) kenaikan jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum masal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota) dan (b) peningkatan persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan;</p> <p>4) Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan dengan mendorong peningkatan (a) rasio elektrifikasi, (b) rata-rata Pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik (kWh/kapita) dan (c) penurunan emisi GK sektor energi</p>	5. Peningkatan Kemandirian Pangan dan Pengelolaan Sumber Daya Energi	5. Penguatan Infrastruktur Pendukung Perekonomian dan Pelayanan Dasar	1) Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai. Meningkatkan indeks infrastruktur, indeks pelayanan jalan, skor smart city.



PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPD PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPD KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	<p>(juta ton);</p> <p>5) Meningkatnya layanan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui peningkatan persentase populasi yang dijangkau oleh jaringan bergerak pita lebar (4G).</p>			
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	<p>1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan mendorong meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);</p> <p>2) Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim dengan mendorong penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total PDB;</p> <p>3) Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi GRK terhadap baseline dengan mendorong (a) persentase penurunan emisi GRK, dan (b) persentase penurunan intensitas emisi GRK.</p>	6. Peningkatan Ketahanan bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	6. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup dan Ketahanan Bencana serta Mitigasi Perubahan Iklim	<p>1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH. Meningkatkan IKLH dan pembangunan RTH Skala Kota (alunalun).</p> <p>2) Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana. Meningkatkan indeks ketahanan bencana.</p>
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik	<p>1) Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optima dengan meningkatkan (a) indeks demokrasi Indonesia, dan (b) tingkat kepercayaan masyarakat terhadap konten dan akses informasi publik terkait kebijakan dan program prioritas pemerintah;</p> <p>2) Optimalnya kebijakan luar negeri dengan meningkatkan indeks pengaruh dan peran Indonesia di dunia internasional;</p> <p>3) Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap dengan mendorong kenaikan indeks pembangunan hukum;</p> <p>4) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan mendorong kenaikan indeks pelayanan publik nasional;</p> <p>5) Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendorong</p>	7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur	7. Peningkatan Ketentraman, Ketertiban umum dan Peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat Kota Kediri	<p>1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat Meningkatkan kewaspadaan dan kebangsaan serta ketentraman dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada.</p> <p>2) Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.</p>



PRIORITAS RKP 2024		PRIORITAS RKPd PROVINSI JATIM 2024	PRIORITAS RKPd KOTA KEDIRI 2024	
PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN		PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTAKEDIRI	SASARAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
	peningkatan persentase luas wilayah NKRI yang dapat dijaga keutuhannya.			



### 1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, Pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka SPM tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria. Batasan pengertian SPM secara tekstual memang tidak berubah, yaitu bahwa SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran- ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis



dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Kediri menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

1. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat;
2. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur;
3. SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan



Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kota/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kota/Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kota/Kota;
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri

Dalam penerapan SPM dilaksanakan melalui 4 tahapan yaitu:

1. Pengumpulan Data,  
Pengumpulan data, yang meliputi jumlah identitas warga negara yang berhak menerima, jumlah barang dan jasa yang sudah tersedia dan yang dibutuhkan, jumlah sarana, prasarana dan sumber daya lain yang dibutuhkan. Pengumpulan data sesuai dengan standar teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100 persen dari target dan indikator kinerja pencapaian SPM setiap tahun. Hasil pengumpulan data diintegrasikan dengan SIPD.
2. Perhitungan kebutuhan  
Pemenuhan pelayanan dasar dalam tahap ini pemerintah daerah menghitung selisih ketersediaan barang dan jasa serta sarana, prasarana dengan jumlah warga penerima dan mutu SPM. Diutamakan masyarakat tidak mampu.
3. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar  
Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar yang meliputi jenis, mutu, dan penerima pelayanan dasar. Nantinya dalam proses perencanaan



ini akan di integrasi ke dokumen perencanaan pembangunan daerah (Dokrenda) yang kemudian memasuki proses penganggaran. Berdasarkan pasal 29 Permendagri nomor 59 tahun 2021 disebutkan bahwa pendanaan penerapan SPM bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota serta sumber lainnya yang meliputi dana transfer berupa DAK, dana bagi hasil, dana desa, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, hibah dan program tanggung jawab sosial perusahaan.

4. Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.

Pelaksanaan SPM dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan SPM dalam satu tahun anggaran, yang meliputi jenis belanja, objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja SPM.

Indikator penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100 %
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%

b. Urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan Kesehatan	100%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency</i> )	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
		INDIKATOR	TARGET
		<i>virus</i> ) yang mendapatkan layanan Kesehatan	

c. Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

d. Urusan Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100%



e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Linmas

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100%

f. Urusan Sosial

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR SPM	TARGET
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	100%



## BAB II

### CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

**Tabel 2.1**  
**Capaian Indikator Makro Kota Kediri Tahun 2023 - 2024**

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80.97	81.88	1.12
2	Angka Kemiskinan	7.15	6.51	-8.95
3	Angka Pengangguran	4.06	3.91	-3.69
4	Pertumbuhan Ekonomi	1.92	3.43	78.65
5	Pendapatan Perkapita	541.07	565.84	4.58
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.400	0.337	0.00

Sumber: BPS Kota Kediri (Kediri Dalam Angka Tahun 2025)

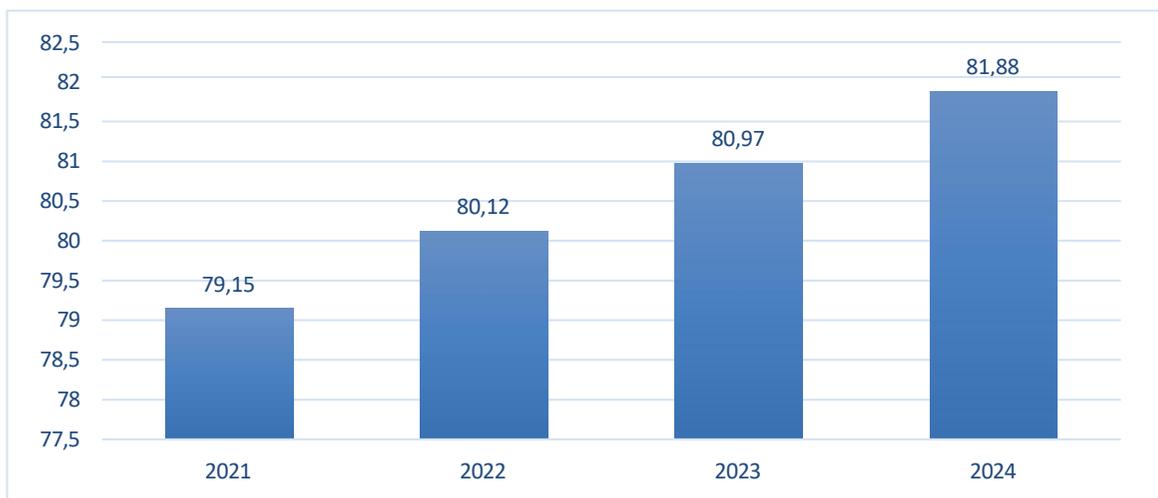
##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat menjelaskan bagaimana penduduk memperoleh akses hasil pembangunan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yang menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak.

Realisasi IPM Kota Kediri tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik 2.1, berikut:



**Grafik 2.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri**  
**Tahun 2021 – 2024**



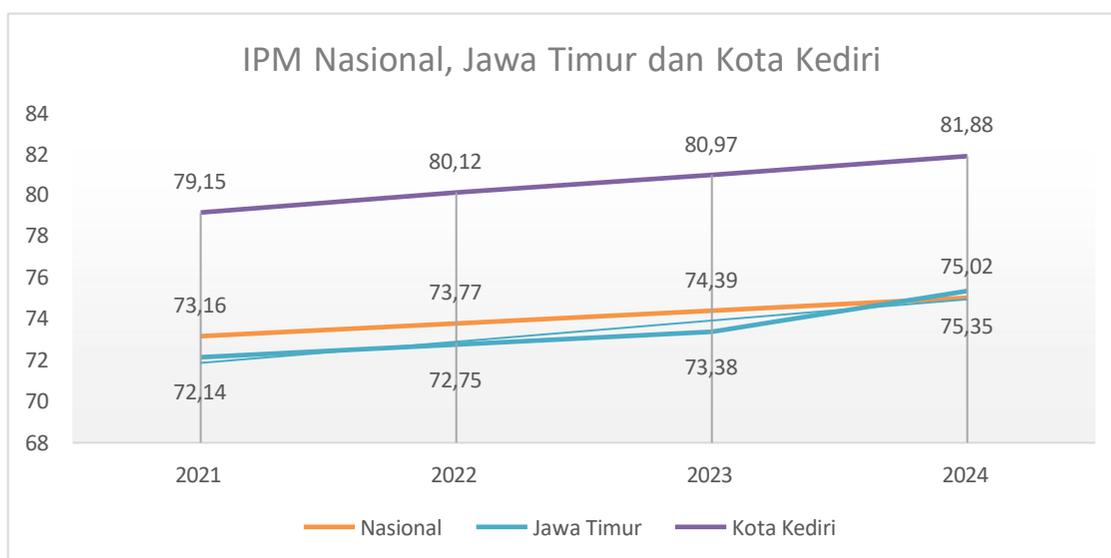
Sumber: BPS Kota Kediri (Kediri Dalam Angka Tahun 2025)

Dari grafik diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri pada tahun 2024 mencapai 81,88, meningkat 0,91 poin (1,12 persen) dibandingkan tahun sebelumnya (80,97). Selama 2021-2024, IPM Kota Kediri rata-rata meningkat sebesar 0,68 persen per tahun. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pertumbuhan IPM 2024 mengalami perlambatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama umur panjang dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,74 tahun, lebih lama 0,20 tahun dibandingkan dengan bayi yang lahir pada tahun 2023. (Sumber data umur harapan hidup saat lahir menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF)). Dari sisi pendidikan, pada tahun 2024 komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sebesar 15,71 tahun, lebih tinggi 0,26 persen dibanding tahun 2023 yaitu 15,45. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 mencapai 10,92 tahun, atau meningkat 0,23 persen dibanding tahun 2023. Indikator Pengeluaran per Kapita per Tahun pada tahun 2024 mencapai Rp13.670.000 atau meningkat 0,29 persen dibanding tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp13.276.000 per tahun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia. Nilai Indeks



Pembangunan Manusia dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah.

**Grafik 2.2**  
**Perkembangan Nilai IPM Kota Kediri Tahun 2021-2024**



Sumber : Data BPS Tahun 2024

**Tabel 2.2**  
**Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kota Kediri**  
**Terhadap Rata-rata Propinsi Jawa Timur Tahun 2021-2024**

Tahun	Kota Kediri	Provinsi Jawa Timur	Nasional	Propinsi Jawa Timur (poin)	
				IPM Tertinggi	IPM Terendah
2021	79.15	72.14	73.16	82.31	62.80
2022	80.12	72.75	73.77	82.74	63.39
2023	80.97	73.38	74.39	83.45	63.13
2024	81.88	75.35	75.02	84.69	66.72

Sumber: BPS

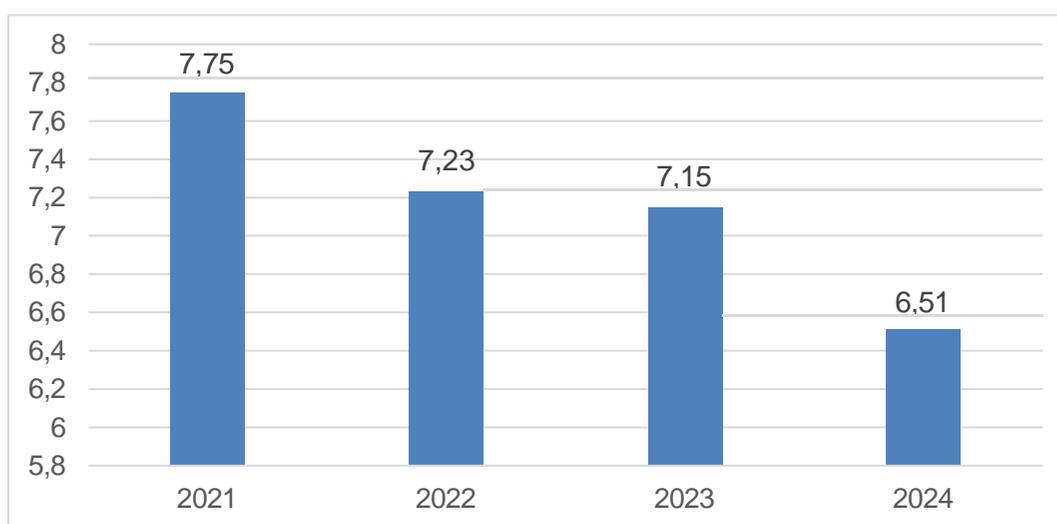
Dari tabel di atas IPM Kota Kediri menempati ranking 6 dari seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur. Angka IPM ini sekaligus selalu jauh di atas angka IPM Rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional sejak tahun 2017. Capaian kinerja ini menunjukkan bahwa pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai Misi ke-2 selalu menempati prioritas program dan kegiatan pemerintah daerah.



### 2.1.2 Angka Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Realisasi tingkat kemiskinan Kota Kediri tahun 2024 sebesar 6,51%, berkurang sebesar 0,64 poin dari tahun 2023 sebesar 7,15%. Gambaran realisasi Tingkat kemiskinan tahun 2020-2023 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3  
Tingkat Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2021 - 2024



Sumber: BPS Kota Kediri Tahun 2024

Dari grafik di atas, diketahui bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2021 sampai dengan 2024 cenderung menurun. Pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan berbagai program untuk menurunkan tingkat kemiskinan antara lain, bantuan sosial bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah tidak layak huni, program pemberdayaan masyarakat, penciptaan wirausaha baru, pelatihan kerja dan bantuan modal.

### 2.1.3 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan. Angka TPT diperoleh atas rilis dari Badan Pusat Statistik pada setiap tahunnya. Angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja yang menganggur dibanding jumlah angkatan kerja.

Sementara itu, dampak kesejahteraan sosial penurunan pertumbuhan ekonomi yaitu bidang ketenagakerjaan di Kota Kediri dapat dilihat dari data



indikator rasio kerja, TPT dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Data tersebut sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**  
**Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri**  
**Tahun 2023 - 2024**

No	Uraian	2023	2024
1	Jumlah Penduduk	298.820	301.424
2	Penduduk Usia Produktif	209.388	212.192
3	Angkatan Kerja	166.321	165.918
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	71,83	70,74
5	Pencari Kerja terdaftar	808	1002
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	3,91
7	Upah Minimum Kota (UMK) (Rp)	2.415.362,00	2.572.361,00
8	% TPT Jawa Timur	4,88	4,19
9	% TPT Nasional	5,32	4,91

Sumber: BPS Tahun 2024

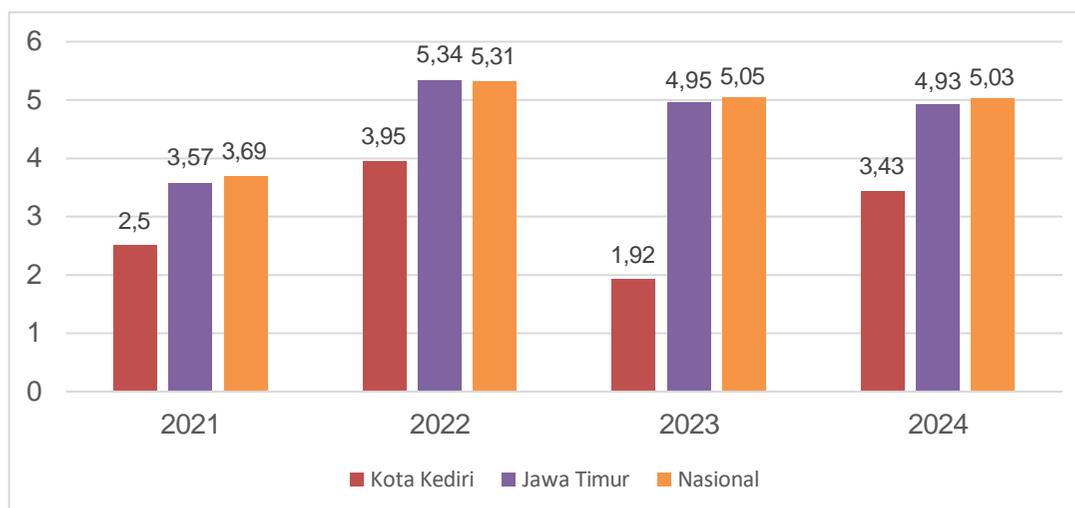
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kediri tahun 2024 sebesar 3,91%, berkurang dari tahun 2023 sebesar 4,06%. Pengurangan TPT tersebut menunjukkan keberhasilan program pengurangan TPT melalui pelatihan kerja dan pemberian bantuan modal oleh Pemerintah Kota Kediri. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja, upah minimum Kota Kediri dinaikkan dari Rp. 2.415.362,00 menjadi Rp. 2.572.361,00.

#### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat pada suatu daerah yang merupakan suatu proses perubahan perekonomian suatu daerah dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2024 lebih rendah dari tahun 2023. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun 2024 sebesar 3,43% bertambah dari tahun sebelumnya sebesar 1,51%. Bertambahnya pertumbuhan ekonomi tahun 2024 didominasi dari industri pengolahan terutama berasal dari industri pengolahan tembakau.



**Grafik 2.4**  
**Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2021 – 2024**



Sumber: BPS Kota Kediri Tahun 2024

Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Kediri tahun 2024 senilai 168.748,92 miliar rupiah. Kategori Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kota Kediri. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kota Kediri mencapai 79,64 persen. Pada peringkat kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 10,31 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 2,21 persen. Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2024 meningkat 3,43 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB tertinggi sebesar 10,43 persen adalah pada sektor transportasi dan pergudangan.

### 2.1.5 Pendapatan Per Kapita

PDRB per kapita merupakan sebuah indikator yang sangat dikenal, terutama oleh para peneliti dan pemerhati yang peduli terhadap masalah kesejahteraan masyarakat. PDRB per kapita adalah nilai nominal PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sehingga nilainya sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk, artinya bahwa jika pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari pada pertumbuhannya maka ada kecenderungan semakin kecil PDRB per kapita wilayah tersebut. Oleh sebab itu, laju



pertumbuhan penduduk idealnya tidak melebihi laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Secara makro ekonomi, semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah mengindikasikan semakin baik tingkat perekonomian masyarakat pada wilayah tersebut. Meskipun masih ada kekurangan, tetapi indikator ini sudah cukup memadai untuk menjelaskan potensi ekonomi suatu wilayah dan pengaruhnya terhadap tingkat kemakmuran penduduknya. Karena data PDRB dapat digunakan untuk melihat kemampuan atau potensi suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Pada umumnya PDRB per kapita disajikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), artinya nilai PDRB per kapita dihitung atas dasar harga tahun berjalan. Sehingga sangat dipengaruhi oleh total volume produksi dan harga barang/jasa pada tahun tersebut. Oleh sebab itu indikator ini tidak dapat langsung dijadikan rujukan atau kesimpulan terkait perkembangan tingkat kesejahteraan penduduk.

**Tabel 2.4**

**Tingkat Pendapatan Perkapita Penduduk PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kota Kediri (Juta Rupiah/Tahun)**

Tahun	Jumlah PDRB ADHK	Jumlah Penduduk	Pend. Perkapita (Rp/Tahun/Pdd)
2022	152.780.000.000	294.692	522.860.000
2023	159.740.000.000	298.820	541.070.000
2024	168.750.000.000	301.424	565.840.000

*Sumber: BPS (Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2025).*

Pendapatan perkapita penduduk Kota Kediri menunjukkan angka yang terus meningkat selama 3 (tiga) tahun terakhir 2022-2024 dengan rata-rata kenaikan 3,33% % per tahun. Tahun 2023 jumlah pendapatan perkapita sebesar Rp. 541.070.000 naik menjadi Rp. 565.840.000 pada tahun 2024. Indikator ini menunjukkan keberhasilan kebijakan Pemerintah Kota Kediri dalam menjaga stabilitas pertumbuhan sektor basis ekonomi Kota Kediri sehingga mampu memberikan pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang baik setiap tahun.



### 2.1.6 Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna), sehingga nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Indikator ini mencerminkan tingkat pemerataan pendapatan penduduk suatu wilayah. Memasuki tahun 2021 hingga 2023, ketimpangan pendapatan di Kota Kediri terus mengalami peningkatan. Indeks Gini naik dari 0,374 pada tahun 2021 menjadi 0,400 pada tahun 2023. Angka ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Kota Kediri berada di atas rata-rata ketimpangan di tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kondisi ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Kediri belum sepenuhnya inklusif, sehingga sebagian besar manfaat dari pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu. Fenomena ini berpotensi memicu permasalahan sosial jika tidak segera diatasi dengan kebijakan yang tepat.

Namun, pada tahun 2024 terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana Indeks Gini Kota Kediri menurun menjadi 0,337. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam distribusi pendapatan di kalangan masyarakat. Penurunan ketimpangan ini dapat diatributkan pada berbagai faktor seperti peningkatan akses terhadap lapangan kerja formal, program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang lebih berpihak pada pemerataan kesejahteraan. Program sosial yang lebih terarah dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan juga turut berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ini.

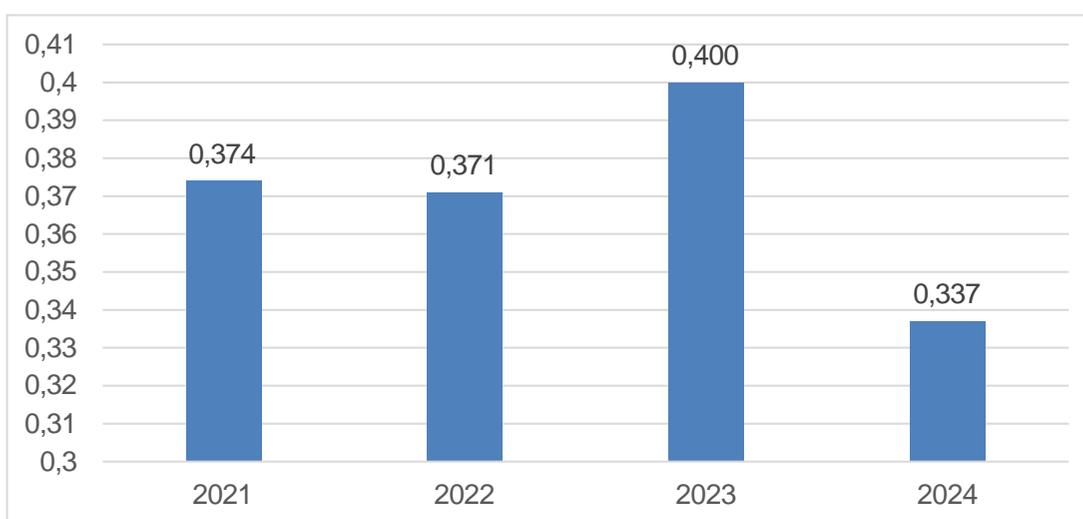
Meskipun terjadi penurunan pada tahun 2024, ketimpangan pendapatan tetap menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kota Kediri. Ketimpangan yang tinggi dapat berdampak negatif terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat kebijakan yang mendorong pemerataan, seperti peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan berkualitas, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses modal, serta kebijakan redistribusi pendapatan melalui pajak progresif dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

Dengan upaya yang berkelanjutan, diharapkan ketimpangan pendapatan di Kota Kediri dapat terus ditekan sehingga pertumbuhan ekonomi yang terjadi



benar-benar inklusif dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerataan kesejahteraan tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi Kota Kediri dalam jangka panjang. Pemerintah bersama masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.. Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada Grafik 2.5

**Grafik 2.5**  
**Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2021 – 2024**



Sumber: BPS (Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2025).

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai indeks gini pada tahun 2021 sampai dengan 2024 berada pada rentang 0,337–0,400, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kota Kediri berada pada tingkat ketimpangan sedang.

## 2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.



### 2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Urusan Pemerintahan Wajib</b>					
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	94,21 %	DINAS PENDIDIKAN
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100 %	DINAS PENDIDIKAN
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	100 %	DINAS PENDIDIKAN
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	DINAS PENDIDIKAN
2	Kesehatan	1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	5,32%	DINAS KESEHATAN
		2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	100 %	DINAS KESEHATAN
		3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %	DINAS KESEHATAN
		4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100 %	DINAS KESEHATAN
		5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %	DINAS KESEHATAN



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		6 Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		7 Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		8 Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		9 Persentase warga Negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		10 Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		11 Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		12 Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		13 Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
		14 Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100 %	DINAS KESEHATAN	
3	Pekerjaan Umum Dan	1 Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan	0 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
	<b>Penataan Ruang</b>	kab/Kota			Kepala Dinas
		2 Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota	0 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		3 Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	65,98 %	DINAS PUPR	
		4 Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten /Kota	73,69 %	DINAS PUPR	
		5 Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	DINAS PUPR	
		6 Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	100 %	DINAS PUPR	
		7 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten /Kota	84,68 %	DINAS PUPR	
		8 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	11,51 %	DINAS PUPR	
		9 Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100 %	DINAS PUPR	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
4	Perumahan Rakyat	1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten /Kota	0 %	DPKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		2 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kabupaten /Kota	0 %	DPKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		3 Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	7,68 %	DPKP	
		4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,41 %	DPKP	
		5 Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	87,59 %	DPKP	
5	Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	1 Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100 %	SATPOL PP	
		2 Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	88,46 %	SATPOL PP	
		3 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	72,60 %	BPBD	
		4 Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan	75,89%	BPBD	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		dan kesiapsiagaan terhadap bencana			
		5 Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	BPBD	
		6 Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93,33 %	SATPOL PP	
		7 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	11,06 Menit	SATPOL PP	
6	Sosial	1 Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	99,20 %	DINAS SOSIAL	
		2 Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	100 %	DINAS SOSIAL	
7	Tenaga Kerja	1 Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100 %	DINKOP UMTK	
		2 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	79,86 %	DINKOP UMTK	
		3 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	47.523.432,25	DINKOP UMTK	
		4 Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	100 %	DINKOP UMTK	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		5 Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan (Dalam Dan Luar Negeri) Melalui Mekanisme Layanan Antar Kerja Dalam Wilayah Kabupaten/Kota	69,16 %	DINKOP UMTK	
8	Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	1 Persentase ARG pada belanja langsung APBD	45,88 %	DP3AP2KB	
		2 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	100 %	DP3AP2KB	
		3 Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	9,22 %	DP3AP2KB	
9	Pangan	1 Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	95.464,09 %	DKPP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
10	Pertanahan	1 Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	0 %	DINAS PUPR	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		2 Persentase Penetapan Tanah Untuk Pembangunan Fasilitas Umum	0 %	DPM PTSP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		3 Tersedianya Lokasi Pembangunan Dalam Rangka Penanaman Modal	0 %	DPM PTSP	Surat Pernyataan



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
					Kepala Dinas
		4 Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0 %	DPKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		5 Tersedianya tanah untuk masyarakat	0 %	DPKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		6 Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0 %	DPKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
11	<b>Lingkungan Hidup</b>	1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	73,84 %	DLHKP	
		2 Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	99,05 %	DLHKP	
		3 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	0 %	DLHKP	Surat Pernyataan Kepala Dinas
12	<b>Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan</b>	1 Perekaman KTP Elektronik	99,81 %	DISPENDUKCAPIL	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
	<b>Sipil</b>				
		2 Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	99,96 %	DISPENDUKCAPIL	
		3 Kepemilikan akta kelahiran	99,94 %	DISPENDUKCAPIL	
		4 Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	82,60 %	DISPENDUKCAPIL	
13	<b>Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>	1 Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	0 %	BAGIAN PEMERINTAHAN	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
		2 Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	0 %	BAGIAN PEMERINTAHAN	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
14	<b>Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>	1 TFR (Angka Kelahiran Total)	0,69 %	DP3AP2KB	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		2 Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	68,53 %	DP3AP2KB	
		3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,96 %	DP3AP2KB	
15	Perhubungan	1 Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	0,67 %	DINAS PERHUBUNGAN	
		2 Kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota	0,51 %	DINAS PERHUBUNGAN	
16	Komunikasi dan Informatika	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %	DISKOMINFO	
		2 Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	53,57 %	DISKOMINFO	
		3 Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	DISKOMINFO	
17	Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	1 Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	41,25 %	DINKOP UMTK	
		2 Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	100 %	DINKOP UMTK	
18	Penanaman	1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten/Kota	15,38 %	DPM PTSP	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
	<b>Modal</b>				
19	<b>Kepemudaan Dan Olahraga</b>	1 Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	9,28 %	DISBUDPARPORA	
		2 Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	67,98 %	DISBUDPARPORA	
		3 Peningkatan Prestasi Olahraga	102 Medali/Penghargaan	DISBUDPARPORA	
20	<b>Statistik</b>	1 Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100 %	DISKOMINFO	
		2 Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100 %	DISKOMINFO	
21	<b>Persandian</b>	1 Tingkat keamanan informasi pemerintah	62,94 %	DISKOMINFO	
22	<b>Kebudayaan</b>	1 Terlestarikannya Cagar Budaya	100 %	DISBUDPARPORA	
23	<b>Perpustakaan</b>	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	99,34 %	DISARPUS	
		2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	51,21 %	DISARPUS	
24	<b>Kearsipan</b>	1 Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40	100	DISARPUS	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan			
		2 Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100	DISARPUS	
<b>Urusan Pilihan</b>					
1	<b>Kelautan Dan Perikanan</b>	1 Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	109,78 Ton	DKPP	
2	<b>Pariwisata</b>	1 Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-95.52 %	DISBUDPARPORA	
		2 Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	6,05 %	DISBUDPARPORA	
		3 Tingkat Hunian Akomodasi	43,96 %	DISBUDPARPORA	
		4 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,87 %	DISBUDPARPORA	
		5 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	0,12 %	DISBUDPARPORA	
3	<b>Pertanian</b>	1 Produktivitas pertanian per hektar per tahun	807,94 %	DKPP	
		2 Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit	-2,41 %		



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		Hewan Menular			
4	Kehutanan	1. Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura 2. Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga 3. Pemulihan ekosistem pada Tahura 4. Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	100	SEKRETARIAT DAERAH	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
5	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	100 %	SEKRETARIAT DAERAH	Surat Pernyataan Sekretaris Daerah
6	Perdagangan	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100 %	DISPERDAGIN	
		2 Persentase kinerja realisasi pupuk	72,76 %	DISPERDAGIN	
		3 Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70,53 %	DISPERDAGIN	
7	Perindustrian	1 Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di KabKota	43,83 %	DISPERDAGIN	
		2 Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	100 %	DISPERDAGIN	



No	Urusan pemerintahan	Indikator kinerja kunci hasil ( <i>outcome</i> )	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		3 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	96,14 %	DISPERDAGIN	
		4 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0 %	DISPERDAGIN	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		5 Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten//Kota	0 %	DISPERDAGIN	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		6 Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	100 %	DISPERDAGIN	
8	Transmigrasi		100 %	DINKOP UMTK	Surat Pernyataan Kepala Dinas



## 2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja kunci	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Perencanaan Keuangan	1 Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	13,64 %	BPPKAD	
		2 Rasio PAD	25,86 %	BPPKAD	
		3 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		4 Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	INSPEKTORAT	
		5 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	81,39 %	BPPKAD	
		6 Opini Laporan Keuangan	9 WTP	INSPEKTORAT	
2	Pengadaan	1 Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	0 %	BPBJ	Surat Pernyataan Kepala Dinas
		2 Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	90,83 %	BPBJ	
		3 Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	17,96 %	BPBJ	
		4 Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha	-4,48 %	BPBJ	



No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja kunci	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah			
3	Kepegawaian	1 Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	73,49 %	BKPSDM	
		2 Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	15,94 %	BKPSDM	
		3 Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	53,07 %	BKPSDM	
4	Manajemen Keuangan	1 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD (Melihat kredibilitas anggaran belanja dari perencanaan awal)	13,16 %	BPPKAD	
		2 Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (Melihat kredibilitas penerimaan pendapatan dari perencanaan awal)	14,10 %	BPPKAD	
		Assets Management 3 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) 3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) 4. Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	4 1. Ya 2. Ya 3. Ya 4. Ya	BPPKAD	
		4 Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun	21,58 %	BPPKAD	



No	Fungsi Penunjang	Indikator kinerja kunci	Capaian kinerja	Sumber data	Keterangan
		Sebelumnya			
5	Transparansi Dan Partisipasi Publik	1 Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	82,41 %	DISKOMINFO	
		2 Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100 %	DISKOMINFO	



## AKUNTABILITAS KINERJA

### 2.3 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Kediri selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Kediri yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Perubahan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Pemerintah Kota Kediri.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### 2.3.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :



**Tabel 3.14 Pengkategorian Capaian Kinerja**

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

### 2.3.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Kediri tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	84,67	109,96	Sangat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,80)	A (3,541)	93,18	Sangat Tinggi
		Indeks SPBE	3,66	3,89	106,28	Sangat Tinggi
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Profesionalitas ASN	90,07	90,35	100,31	Sangat Tinggi
		Nilai SAKIP	A (81,05)	72,49	89,44	Tinggi
		Skor EKPPD	3,58	N/A	N/A	N/A
		Level SPIP	4	3,207	80,18	Tinggi
		Jumlah WBK/WBBM	10	1	10,00	Sangat Rendah



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	24,00%	25,86%*	107,75	Sangat Tinggi
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	66,67%	54,26%	81,38	Tinggi
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100,00	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,2	81,88	100,84	Sangat Tinggi
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,80	100,00	Sangat Tinggi
		Indeks Minat Baca	81,50	81,49	99,99	Sangat Tinggi
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,00	75,94	101,25	Sangat Tinggi
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80	N/A	N/A	N/A
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 6,00	3,43	68,60	Sedang



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	daerah dan pengembangan ekonomi kreatif					
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T – 5,9 T	3,1 T	65,96	Rendah
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,00% - 6,00%	92,56%	1.851,2	Sangat Tinggi
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	1.400 M	1.477 M	105,50	Sangat Tinggi
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66,67%	100%	149,99	Sangat Tinggi
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	88	87,41	99,33	Sangat Tinggi
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.750.000	1.759.066	100,52	Sangat Tinggi
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Indeks Gini	0,350 – 0,390	0,337	103,71	Sangat Tinggi
		Tingkat Kemiskinan	6,90	6,51	105,65	Sangat Tinggi
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	20.304	19.240	105,53	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05%	3,91%	103,58	Sangat Tinggi
5.	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,56 (Sangat Tinggi)	4,56 (Sangat Tinggi)	100,00	Sangat Tinggi



No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	87	86,04	98,89	Sangat Tinggi
6.	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	80,50 (Baik)	81,02	100,65	Sangat Tinggi
6.1	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	83,50%	85,46%	102,35	Sangat Tinggi
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94,92%	95,53%	100,64	Sangat Tinggi
		Indeks Infrastruktur	88	87,41	99,32	Sangat Tinggi
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,50	64,10	Rendah
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,09	100,74	Sangat Tinggi
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	17,30	17,04	98,50	Sangat Tinggi

Sumber : Pemerintah Kota Kediri tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan 1 : “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi” didukung oleh 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:



- \* Capaian indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” sebesar 109,96% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 2 (dua) sasaran, yaitu :
    - 1.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Opini BPK dengan capaian sebesar 100,00% kategori sangat tinggi.
      - b. Indeks Profesionalitas ASN dengan capaian sebesar 100,31% kategori sangat tinggi.
      - c. Nilai SAKIP dengan capaian sebesar 89,44% kategori tinggi.
      - d. Skor EKPPD yang capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.
      - e. Level SPIP dengan capaian sebesar 80,18% kategori tinggi.
      - f. Jumlah WBK/WBBM dengan capaian sebesar 10,00% kategori sangat rendah.
    - 1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya kemandirian keuangan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Rasio kemandirian keuangan daerah dengan capaian sebesar 107,75% kategori sangat tinggi.
  - \* Capaian indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” sebesar 93,18% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :
    - 1.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A dengan capaian sebesar 81,38% kategori tinggi.
  - \* Capaian indikator tujuan “Skor Indeks SPBE” sebesar 106,28% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu:
    - 1.4 Sasaran 4 : “Meningkatnya penerapan Smart City” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Persentase implementasi Smart City dengan capaian sebesar 100,00% kategori sangat tinggi.
2. Tujuan 2 : “Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
- \* Capaian indikator tujuan “Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)” sebesar 100,84% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu :
    - 2.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Indeks Pendidikan dengan capaian sebesar 100,00% kategori sangat tinggi.
      - b. Indeks minat baca dengan capaian sebesar 99,99% kategori sangat tinggi.



- 2.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Angka harapan hidup dengan capaian sebesar 101,25% kategori sangat tinggi.
- 2.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang capaiannya belum dapat diukur karena belum tersaji data realisasi.
3. Tujuan 3 : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Capaian indikator tujuan “Pertumbuhan Ekonomi” sebesar 68,60% dengan kategori sedang. Indikator tujuan ini didukung oleh 6 (enam) sasaran, yaitu :
    - 3.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Nilai Peningkatan PDRB dengan capaian sebesar 65,96% kategori sangat rendah.
    - 3.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya ekonomi kreatif” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Pertumbuhan ekonomi kreatif dengan capaian sebesar 1.851,2% kategori sangat tinggi.
    - 3.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya jumlah investasi” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Nilai realisasi investasi dengan capaian sebesar 105,50% kategori sangat tinggi.
    - 3.4 Sasaran 4 : “Meningkatnya kinerja BUMD” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Persentase BUMD kondisi sehat dengan capaian sebesar 149,99% kategori sangat tinggi.
    - 3.5 Sasaran 5 : “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Indeks infrastruktur dengan capaian sebesar 99,33% kategori sangat tinggi.
    - 3.6 Sasaran 6 : “Meningkatnya daya tarik wisata” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Jumlah kunjungan wisata dengan capaian sebesar 100,52% kategori sangat tinggi.
4. Tujuan 4 : “Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan” didukung oleh 2 (dua) indikator tujuan, yaitu:



- \* Capaian indikator tujuan “Indeks Gini” sebesar 103,71% dengan kategori sangat tinggi.
- \* Capaian indikator tujuan “Tingkat kemiskinan” sebesar 105,65% dengan kategori sangat tinggi.  
Indikator tujuan “Indeks Gini” dan “Tingkat Kemiskinan” didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :
  - 4.1 Sasaran 1 : “Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
    - a. Jumlah penduduk miskin (jiwa) dengan capaian sebesar 105,53% kategori sangat tinggi.
    - b. Tingkat pengangguran terbuka dengan capaian sebesar 103,58% kategori sangat tinggi.
- 5. Tujuan 5 : “Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Capaian indikator tujuan “Indeks kerukunan antar umat beragama” sebesar 100,00% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :
    - 5.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Indeks ketentraman dan ketertiban dengan capaian sebesar 98,89% kategori sangat tinggi.
- 6. Tujuan 6 : “Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Capaian indikator tujuan “Indeks kota layak huni” sebesar 100,65% dengan kategori sangat tinggi. Indikator tujuan ini didukung oleh 4 (empat) sasaran, yaitu :
    - 6.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW dengan capaian sebesar 102,35% kategori sangat tinggi.
    - 6.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Persentase permukiman layak huni dengan capaian sebesar 100,64% kategori sangat tinggi.
      - b. Indeks infrastruktur dengan capaian sebesar 99,32% kategori sangat tinggi.
    - 6.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Indeks ketahanan daerah dengan capaian sebesar 64,10% kategori rendah.
    - 6.4 Sasaran 4 : “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:



- a. Indeks kualitas lingkungan hidup dengan capaian sebesar 100,74% kategori sangat tinggi.
- b. Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah dengan capaian sebesar 98,50% kategori sangat tinggi.

### 2.3.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	62,78	74,63	77,00	84,67	109,96
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,52	3,54	A (3,80)	A (3,541)	93,18
		Indeks SPBE	2,96	3,65	3,66	3,89	106,28
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN	89,84	89,90	90,07	90,35	100,31
		Nilai SAKIP	BB (73,32)	71,98	A (81,05)	72,49	89,44
		Skor EKPPD	2,70	3,2314	3,58	N/A	N/A
		Level SPIP	3	3,203	4	3,207	80,18
		Jumlah WBK/WBBM	1	1	10	1	10,00
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian	21,97%	23,76%	24,00%	25,86%*	107,75



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		keuangan daerah					
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	53,19%	62,76%	66,67%	54,26%	81,38
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100%	100%	100,00
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,12	80,97	81,2	81,88	100,84
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,78	0,79	0,80	0,80	100,00
		Indeks Minat Baca	79,70	81,40	81,50	81,49	99,99
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	74,34	74,67	75,00	75,94	101,25
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	94,53	94,53	95,80	N/A	N/A



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	3,95	1,92	5,00 – 6,00	3,43	68,60
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	3,4 T	1,729 T	4,7 T – 5,9 T	3,1 T	65,96
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	93,52%	89,51%	5,00% - 6,00%	92,56%	1.851,2
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	2.357,05 M	1.347 M	1.400 M	1.477 M	105,50
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66,66%	100,00%	66,67%	100,00%	149,99
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	82,87	85,63	88	87,41	99,33
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.329.737	1.695.361	1.750.000	1.759.066	100,52
4.	Meningkatnya pemerataan	Indeks Gini	0,371	0,400	0,350 – 0,390	0,337	103,71



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	7,23	7,15	6,90	6,51	105,65
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	21.150	21.030	20.304	19.240	105,53
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,38%	4,06%	4,05%	3,91%	103,58
5.	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,47	4,55	4,56 (Sangat Tinggi)	4,56 (Sangat Tinggi)	100,00
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	N/A	86,65	87	86,04	98,89
6.	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	79,37	79,83	80,50 (Baik)	81,02	100,65
6.1	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	83,28%	84,20%	83,50%	85,46%	102,35
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94,93%	95,26%	94,92%	95,53%	100,64
		Indeks Infrastruktur	82,87	85,63	88	87,41	99,32



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,76	0,77	0,78	0,50	64,10
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	72,33	66,54	66,60	67,09	100,74
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	16,99	17,03	17,30	17,04	98,50

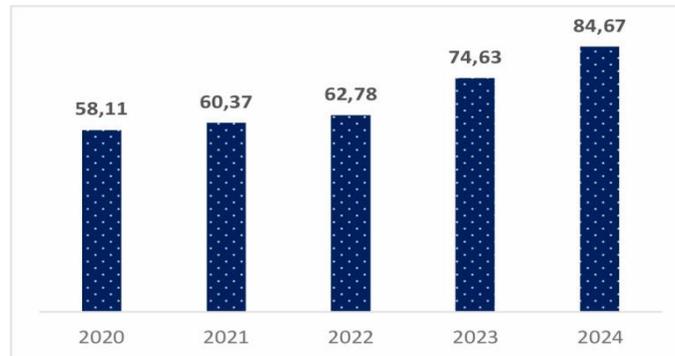
Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan 1 : “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi” didukung oleh 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

\* Realisasi indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 67,78 dan tahun 2024 sebesar 84,67, meningkat sebesar 10,04 poin dari tahun 2023 sebesar 74,63. Jika dibandingkan dengan target sebesar 77, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 109,96% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi indeks reformasi birokrasi tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



## Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber: *Bagian Organisasi, 2020-2024*

Lima tahun terakhir, realisasi indeks reformasi birokrasi terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa tata kelola pemerintah Kota Kediri semakin baik.

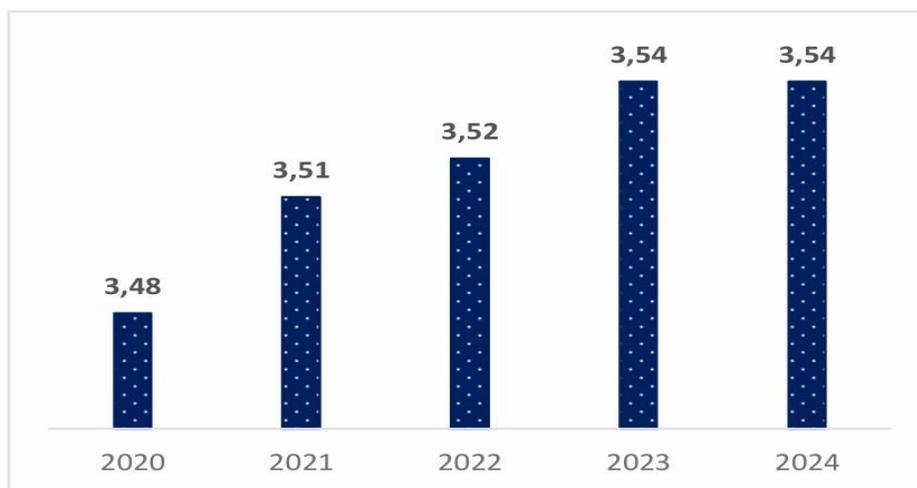
Indikator tujuan ini didukung oleh 2 (dua) sasaran, yaitu:

- 1.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Opini BPK sama dengan tahun sebelumnya.
  - b. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan sebesar 0,45 dari tahun sebelumnya.
  - c. Realisasi Nilai SAKIP mengalami penurunan sebesar 0,51 dari tahun sebelumnya.
  - d. Skor EKPPD tahun 2024 sampai saat ini belum tersedia data realisasi dari Kemendagri.
  - e. Realisasi Level SPIP mengalami peningkatan sebesar 0,004 dari tahun sebelumnya.
  - f. Realisasi Jumlah WBK/WBBM sama dengan tahun sebelumnya.
- 1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya kemandirian keuangan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Rasio kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan sebesar 2,1% dari tahun sebelumnya.



- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 3,52 dan tahun 2024 sebesar 3,541, meningkat sebesar 0,001 poin dari tahun 2023 sebesar 3,54. Jika dibandingkan dengan target sebesar 3,80, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 93,18% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi IKM tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kota Kediri  
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020-2024

Dari grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Kediri telah mencapai prestasi signifikan dalam peningkatan kualitas layanan publik.

Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :

- 1.3 Sasaran 3 :”Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A mengalami penurunan sebesar 8,5% dari tahun sebelumnya.

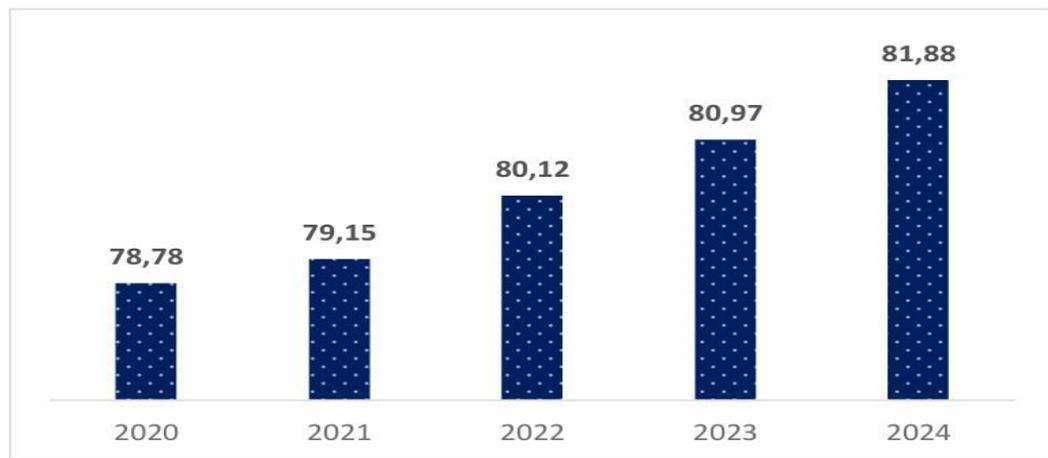
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks SPBE” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 2,96 dan tahun 2024 sebesar 3,89, meningkat sebesar 0,24 poin dari tahun 2023 sebesar 3,65. Jika dibandingkan dengan target sebesar 3,66, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 106,28% masuk dalam kategori Sangat Tinggi.

Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :



- 1.4. Sasaran 4:” Meningkatnya penerapan “*Smart City*” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :
  - a. Realisasi Persentase implementasi *Smart City* sama dengan tahun sebelumnya.
2. Tujuan 2 : “Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 80,12 dan tahun 2024 sebesar 81,88, meningkat sebesar 0,91 poin dari tahun 2023 sebesar 80,97. Jika dibandingkan dengan target sebesar 81,2, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,84% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi IPM tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri  
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020-2024

Peningkatan nilai IPM tersebut bermakna bahwa kesejahteraan masyarakat di Kota Kediri semakin meningkat dari tahun ke tahun.

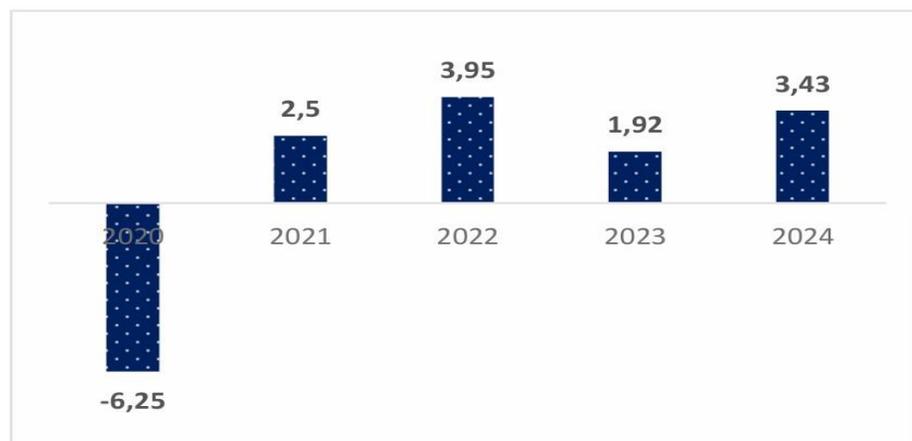
Indikator tujuan ini didukung oleh 3 (tiga) sasaran, yaitu :

- 2.1 Sasaran 1: “Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Indeks Pendidikan mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya.



- b. Realisasi Indeks Minat Baca mengalami peningkatan sebesar 0,09 dari tahun sebelumnya.
- 2.2 Sasaran 2: “Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan Masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Angka Harapan Hidup mengalami peningkatan sebesar 1,27 dari tahun sebelumnya.
- 2.3 Sasaran 3: “Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum disampaikan oleh Badan Pusat Statistik sehingga realisasi dan capaian belum dapat tersaji.
- 3. Tujuan 3 : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Realisasi indikator tujuan “Pertumbuhan Ekonomi” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 3,95 dan tahun 2024 sebesar 3,43, meningkat sebesar 0,51 poin dari tahun 2023 sebesar 1,92. Jika dibandingkan dengan target sebesar 5,00 – 6,00, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 68,60% masuk dalam kategori Sedang. Gambaran realisasi pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri  
Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020-2024



Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2024, antara lain: transportasi dan pergudangan tumbuh sebesar 10,43 persen, jasa lainnya tumbuh 8,58 persen, penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh sebesar 8,15 persen, jasa pendidikan tumbuh 8,13 persen, serta informasi dan komunikasi tumbuh sebesar 6,50 persen. Sedangkan industri pengolahan yang mendominasi PDRB Kota Kediri tahun 2024 sebesar 79,64 persen mengalami pertumbuhan sebesar 2,94 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa sektor usaha kecil menengah yang menjadi sasaran program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Indikator tujuan ini didukung oleh 6 (enam) sasaran, yaitu :

- 3.1 Sasaran 1: “Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Nilai Peningkatan PDRB mengalami peningkatan sebesar 1,371 T dari tahun sebelumnya.
- 3.2 Sasaran 2: “Meningkatnya ekonomi kreatif” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Pertumbuhan ekonomi kreatif mengalami peningkatan sebesar 3,05% dari tahun sebelumnya.
- 3.3 Sasaran 3: “Meningkatnya jumlah investasi” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Nilai realisasi investasi mengalami peningkatan sebesar 130 M dari tahun sebelumnya.
- 3.4 Sasaran 4: “Meningkatnya kinerja BUMD” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Persentase BUMD Kondisi Sehat sama dengan tahun sebelumnya.
- 3.5 Sasaran 5: “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Indeks infrastruktur mengalami peningkatan sebesar 1,78 dari tahun sebelumnya.



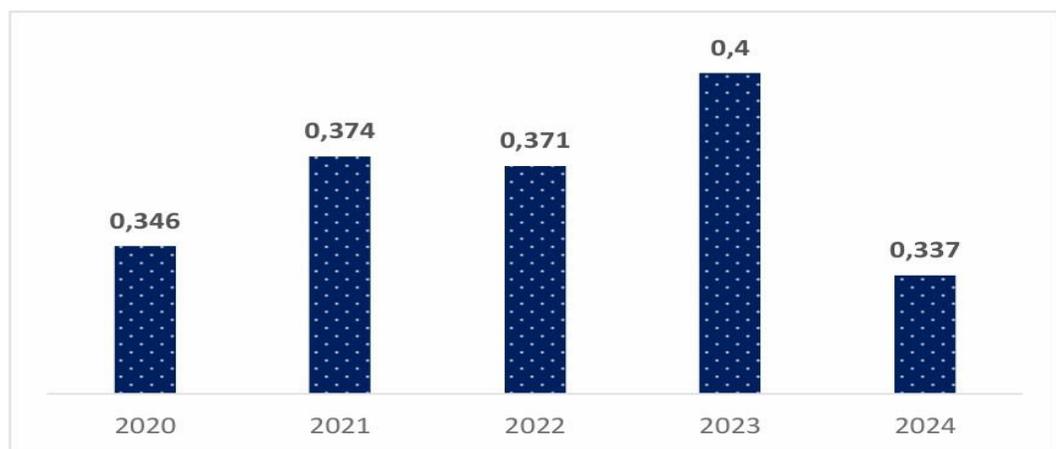
3.6 Sasaran 6: “Meningkatnya daya tarik wisata” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:

- a. Realisasi Jumlah kunjungan wisata mengalami peningkatan sebesar 63.705 orang dari tahun sebelumnya.

4. Tujuan 4 : “Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan” didukung oleh 2 (dua) indikator tujuan, yaitu:

- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Gini” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 0,371 dan tahun 2024 sebesar 0,337, menurun sebesar 0,063 poin dari tahun 2023 sebesar 0,400. Jika dibandingkan dengan target sebesar 0,350 – 0,390, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 103,71% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi indeks gini tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Indeks Gini Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020-2024

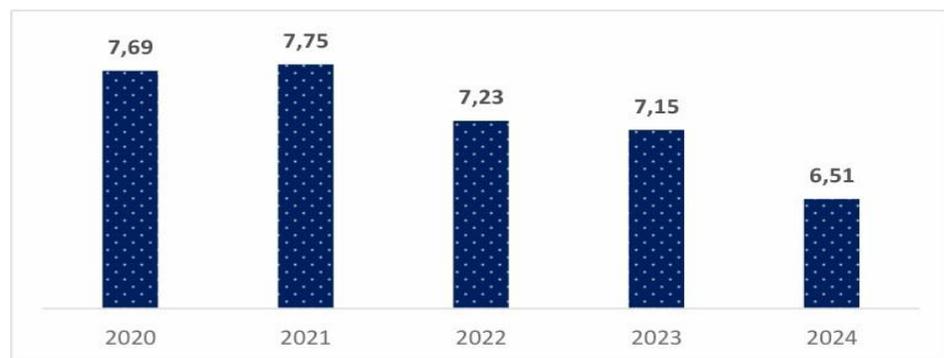
Berdasarkan nilai indeks gini pada tahun 2020 sampai dengan 2024 sebagaimana tersaji pada grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan di Kota Kediri berada pada tingkat ketimpangan rendah. Memperhatikan target sebesar 0,350 - 0,390, maka capaian indeks gini Kota Kediri tahun 2024 sebesar 103,71% (sangat tinggi).

- \* Realisasi indikator tujuan “Tingkat Kemiskinan” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 7,23 dan tahun 2024 sebesar 6,51, berkurang sebesar 0,64 poin dari tahun 2023 sebesar 7,15. Jika dibandingkan dengan target sebesar 0,350 – 0,390, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 105,65% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi Tingkat kemiskinan tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



## Tingkat Kemiskinan Kota Kediri

Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2020-2024

Dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2020 sampai dengan 2024 cenderung menurun.

Indikator tujuan “Indeks Gini” dan “Tingkat Kemiskinan” didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :

4.1 Sasaran 1: “Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

- a. Realisasi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) mengalami penurunan sebesar 1.790 jiwa dari tahun sebelumnya.
- b. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka mengalami penurunan sebesar 0,15% dari tahun sebelumnya.

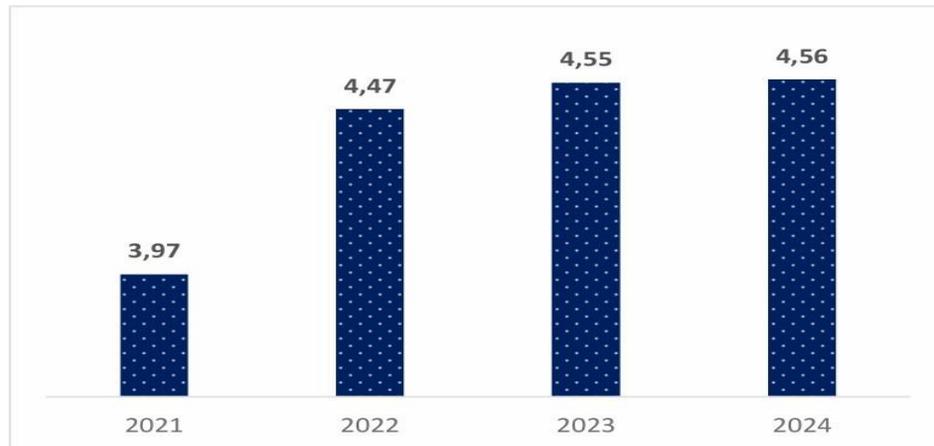
5. Tujuan 5 : “Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:

- \* Realisasi indikator tujuan “ Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 4,47 dan tahun 2024 sebesar 4,56, meningkat sebesar 0,01 poin dari tahun 2023 sebesar 4,55. Jika dibandingkan dengan target sebesar 4,56, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,00% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.



## Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama Kota Kediri

Tahun 2021 – 2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021-2024

Memperhatikan realisasi Indeks Kerukunan Umat Beragama pada grafik di atas, diketahui bahwa secara umum Kota Kediri adalah kota dengan tingkat toleransi yang tinggi dan kondusif. Kondisi tersebut mendukung iklim investasi di Kota Kediri.

Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :

5.1 Sasaran 1: “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:

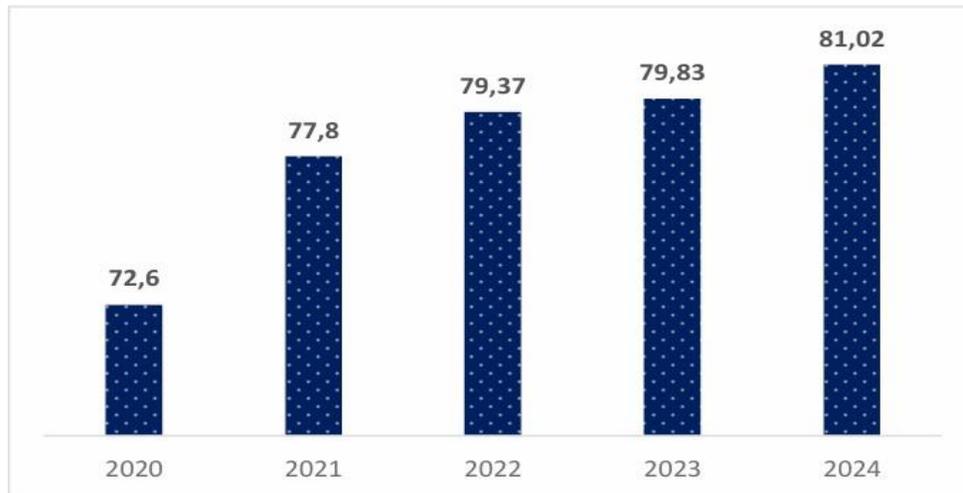
a. Realisasi Persentase penanganan potensi kasus SARA mengalami peningkatan sebesar 0,01 poin dari tahun sebelumnya

6 Tujuan 6 : “Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:

\* Realisasi indikator tujuan “Indeks Kota Layak Huni” Kota Kediri tahun 2022 sebesar 79,37 dan tahun 2024 sebesar 81,02, meningkat sebesar 1.19 poin dari tahun 2023 sebesar 79,83. Jika dibandingkan dengan target sebesar 80,50, maka capaian kinerja tahun 2024 sebesar 100,65% masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Gambaran realisasi Indeks Kota Layak Huni tahun 2021-2024 disajikan pada grafik berikut.



### Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2020-2024

Peningkatan nilai Indeks Kota Layak Huni tersebut menggambarkan bahwa Kota Kediri termasuk dalam kota yang nyaman.

Indikator tujuan ini didukung oleh 4 (empat) sasaran, yaitu :

- 6.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW mengalami peningkatan sebesar 1,26% dari tahun sebelumnya.
- 6.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
  - a. Realisasi Persentase permukiman layak huni mengalami peningkatan sebesar 0,27% dari tahun sebelumnya.
  - b. Realisasi Indeks infrastruktur mengalami peningkatan sebesar 1,78 poin dari tahun sebelumnya.
- 6.3 Sasaran 3 : “Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:



- a. Realisasi Indeks Ketahanan Daerah mengalami penurunan sebesar 0,27 dari tahun sebelumnya.

6.4 Sasaran 4 : “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

- a. Realisasi Indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan sebesar 0,55 dari tahun sebelumnya.
- b. Realisasi Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah mengalami peningkatan sebesar 0,01 dari tahun sebelumnya.

### 2.3.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Pemerintah Kota Kediri periode 2020-2024 diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	84,67	77,00	109,96
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,541)	A (3,80)	93,18
		Indeks SPBE	3,89	N/A	N/A
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	100,00
		Indeks Profesionalitas ASN	90,35	68	132,86
		Nilai SAKIP	72,49	A (81,05)	89,43
		Skor EKPPD	N/A	3,58	N/A
		Level SPIP	3,207	4	80,18
		Jumlah WBK/WBBM	1	10	10,00
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	25,86%*	22,00%	117,54
1.3	Meningkatnya pelayanan publik	Persentase Unit Pelayanan Publik	54,26%	66,67%	81,39



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
	yang prima bagi masyarakat	(UPP) yang memperoleh nilai A			
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100,00
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,88	79,65	102,80
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,79	101,26
		Indeks Minat Baca	81,49	81,05	100,54
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,94	74,18	102,37
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	94,59	N/A
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	5,00 - 6,00	68,60
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	3,1 T	4,7 T – 5,9 T	65,96
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	92,56%	5,00%-6,00%	1.851,2
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	1.477 M	726 M	203,44
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	100%	66,67%	144,99
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	87,41	88	99,32
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.759.066	1.750.000	100,52
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Indeks Gini	0,337	0,350 – 0,390	96,28
		Tingkat Kemiskinan	6,51	6,90	94,35



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	19.240	20.304	105,53
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91%	5,40%	138,11
5.	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,56 (Sangat Tinggi)	4,3 (Sangat Tinggi)	106,05
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	86,04	N/A	N/A
6.	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	81,02	80,50 (Baik)	100,65
6.1	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	85,46%	82,94%	103,04
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	95,53%	94,92%	100,64
		Indeks Infrastruktur	87,41	88	99,32
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,50	0,75	66,66
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,09	66,35	101,12
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	17,04	16,99	100,29

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

1. Tujuan 1 : “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi” didukung oleh 3 (tiga) indikator tujuan, yaitu:

- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi” sebesar 84,67 memiliki tingkat kemajuan sebesar 109,96% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 77,00. Indikator tujuan ini didukung oleh 4 (empat) sasaran, yaitu :



- 1.1 Sasaran 1 : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih” diukur dengan 6 (enam) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Opini BPK meraih predikat WTP memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,00% dibanding dengan target akhir rencana strategis WTP.
  - b. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN sebesar 3,54 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 132,86% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 68.
  - c. Realisasi Nilai SAKIP sebesar 72,49 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 89,43% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 81,05.
  - d. Realisasi Skor EKPPD belum dapat dibandingkan dengan target akhir sasaran strategis karena nilai realisasi oleh Kemendagri belum diperoleh.
  - e. Realisasi Level SPIP sebesar 3,207 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 80,18% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 4.
  - f. Realisasi Jumlah WBK/WBBM sebesar 1 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 10% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 10.
- 1.2 Sasaran 2 : “Meningkatnya kemandirian keuangan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 25,86% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 117,54% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 22,00%.
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)” sebesar 3,541 memiliki tingkat kemajuan sebesar 93,18% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 3,80. Indikator tujuan ini didukung oleh 1(satu) sasaran, yaitu :
- 1.3 Sasaran 3 :”Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi Masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:



- a. Realisasi Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A sebesar 54,26% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 81,39% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 66,67%.
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks SPBE” sebesar 3,89 tidak bisa dibandingkan dengan target akhir sasaran strategis dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja akan tetapi belum tertuang pada dokumen RPJMD.

Indikator tujuan ini didukung oleh 1(satu) sasaran, yaitu :

- 1.4. Sasaran 4:” Meningkatnya penerapan “*Smart City*” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu :
  - a. Realisasi Persentase implementasi Smart City sebesar 100% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 100%.
2. Tujuan 2 : “Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan budaya” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
  - \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Pembangunan Manusia (IPM)” sebesar 81,88 memiliki tingkat kemajuan sebesar 102,80% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 79,65 Indikator tujuan ini didukung oleh 1(satu) sasaran, yaitu :
    - 2.1 Sasaran 1: “Meningkatnya akses dan kualitas Pendidikan Masyarakat” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Realisasi Indeks Pendidikan sebesar 0,80 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 101,26% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 0,79.
      - b. Realisasi Indeks Minat Baca sebesar 81,49 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,54% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 81,05.
    - 2.2 Sasaran 2: “Meningkatnya akses dan kualitas Kesehatan Masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:



- a. Realisasi Angka Harapan Hidup sebesar 75,94 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 102,37% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 74,18.
- 2.3 Sasaran 3: “Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2024 belum disampaikan oleh Badan Pusat Statistik sehingga realisasi dan capaian belum dapat tersaji.
3. Tujuan 3 : “Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
- \* Realisasi indikator tujuan “Pertumbuhan Ekonomi” sebesar 3,43 memiliki tingkat kemajuan sebesar 68,60% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 5,00-6,00. Indikator tujuan ini didukung oleh 6 (enam) sasaran, yaitu :
- 3.1 Sasaran 1: “Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Nilai Peningkatan PDRB sebesar 3,1 T memiliki Tingkat kemajuan sebesar 65,96% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 4,7 T-5,9 T.
- 3.2 Sasaran 2: “Meningkatnya ekonomi kreatif” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Pertumbuhan ekonomi kreatif sebesar 92,56% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 1.851,2% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 5,00%-6,00%.
- 3.3 Sasaran 3: “Meningkatnya jumlah investasi” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Nilai realisasi investasi sebesar 1.477 M memiliki Tingkat kemajuan sebesar 203,44% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 726 M.



- 3.4 Sasaran 4: “Meningkatnya kinerja BUMD” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Persentase BUMD Kondisi Sehat sebesar 100,00% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 144,99% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 66.67%.
- 3.5 Sasaran 5: “Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Indeks infrastruktur sebesar 87,41 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 99,32% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 88.
- 3.6 Sasaran 6: “Meningkatnya daya tarik wisata” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Jumlah kunjungan wisata sebesar 1.759.066 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,52% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 1.750.000.
4. Tujuan 4 : “Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan” didukung oleh 2 (dua) indikator tujuan, yaitu:
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Gini” sebesar 0,337 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 96,28% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 0,350 – 0,390.
  - \* Realisasi indikator tujuan “Tingkat Kemiskinan” sebesar 6,51 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 94,35% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 6,90.

Indikator tujuan “Indeks Gini” dan “Tingkat Kemiskinan” didukung oleh 1 (satu) sasaran, yaitu :

- 4.1 Sasaran 1: “Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) sebesar 19.240 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 105,53% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 20.304.



- b. Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 3,91% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 138,11% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 5,40%.
5. Tujuan 5 : “Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama” sebesar 4,56 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 106,05% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 4,3. Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran yaitu:
    - 5.1 Sasaran 1: “Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Realisasi Indeks ketentraman dan ketertiban sebesar 86,02 tidak bisa dibandingkan dengan target akhir sasaran strategis dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang tertuang pada dokumen Perjanjian Kinerja akan tetapi belum tertuang pada dokumen RPJMD.
6. Tujuan 6 : “Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran” didukung oleh 1 (satu) indikator tujuan, yaitu:
- \* Realisasi indikator tujuan “Indeks Kota Layak Huni” sebesar 81,02 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,65% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 80,50 (baik). Indikator tujuan ini didukung oleh 1 (satu) sasaran yaitu:
    - 6.1 Sasaran 1: “Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
      - a. Realisasi Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW sebesar 85,46% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 103,04% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 82,94%.
    - 6.2 Sasaran 2: “Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:



- a. Realisasi Persentase permukiman layak huni sebesar 95,53% memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,64% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 94,92%.
  - b. Realisasi Indeks infrastruktur sebesar 87,41 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 99,32% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 88.
- 6.3 Sasaran 3: “Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana” diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,50 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 66,66 dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 0,75.
- 6.4 Sasaran 4: “Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH” diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:
- a. Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 67,09 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 101,12% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 66,35.
  - b. Realisasi Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah sebesar 17,04 memiliki Tingkat kemajuan sebesar 100,29% dibandingkan dengan target akhir rencana strategis sebesar 16,99.

**2.3.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)**

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.5**

**Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/ Kabupaten/Kota**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	84,67	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,541)	-	-	-	-
		Indeks SPBE	3,89	3,12 Nasional	4,43 Prov. Jawa Timur	-	-
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	-	-	-	-
		Indeks Profesionalitas ASN	90,35	-	80,82 BKD Provinsi Kalimantan Selatan	90,758 BKPSDM Kota Jogja	-
		Nilai SAKIP	72,49	64,23 Rata-rata Kab/Kota Nasional	-	74,46 Rata-rata Kab/Kota di Jawa Timur	-
		Skor EKPPD	N/A	-	-	-	-
		Level SPIP	3,207	-	-	-	-
		Jumlah WBK/WBBM	1	-	-	-	-
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	25,86%*	-	-	-	-
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang	54,26%	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		memperoleh nilai A					
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	-	-	-	-
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,88	-	-	84,51 Kota Madiun	-
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	-	-	-	-
		Indeks Minat Baca	81,49	-	-	-	-
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,94	-	-	-	-
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	-	-	-	-
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	3,43	5,03 Nasional	4,93 Prov. Jawa Timur	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif						
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	3,1 T	-	-	-	-
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	92,56%	-	-	-	-
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	1.477 M	-	-	-	-
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	100%	-	-	-	-
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	87,41	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.759.066	-	-	-	-
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Indeks Gini	0,337	0,381 Nasional	0,372 Prov. Jawa Timur	-	-
		Tingkat Kemiskinan	6,51	9,03 Nasional	9,79 Prov. Jawa Timur	-	-
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	19.240	-	-	-	-
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,91%	-	4,19 Propinsi Jawa Timur	4,30 Kota Madiun	-
5.	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,56 (Sangat Tinggi)	-	-	-	-
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	86,04	-	-	-	-
6.	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	81,02	-	-	-	-
6.1	Meningkatnya ketaatan	Persentase luas lahan yang	85,46%	-	-	-	-



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	penyelenggara aan penataan ruang	peruntukannya sesuai RTRW					
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	95,53%	-	-	-	-
		Indeks Infrastruktur	87,41	-	-	-	-
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,50	-	-	-	-
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,09	-	-	-	-
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	17,04	-	-	-	-

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024

Uraian penjelasan tabel :

1. a. Indeks SPBE Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2024

Indeks SPBE Kota Kediri berada di atas Indeks SPBE Nasional, namun dibawah Indeks SPBE Provinsi Jawa Timur. Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kota Kediri. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan, sudah dapat menggambarkan predikat



SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan.

Keunggulan penerapan SPBE Pemerintah Kota Kediri adalah pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik. Walaupun capaian nilai kematangan tiap aspek cukup variatif, rata-rata berkisar di tingkat kematangan 3-5. Namun disisi lain, Pemerintah Kota Kediri masih perlu meningkatkan Aspek Audit TIK yaitu pada Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, terutama Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang masih kurang nilainya, semua pelaksanaan Audit masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan Audit oleh Auditor Eksternal sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, Aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen Perubahan yang masih memiliki nilai kematangan 2. Aspek lainnya perlu dipertahankan dengan terus senantiasa melakukan evaluasi dan review, juga melakukan inovasi lanjutan dari praktik-praktik baik yang sudah dilaksanakan.

1.1 b. Indeks Profesionalisme ASN Kota Kediri dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kota Jogja Tahun 2024

Indeks Profesionalisme ASN tahun 2024 adalah 90.35. Jika dibandingkan dengan realisasi BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan BKPSDM Kota Jogja adalah sebesar 80.82 dan 90.75, maka realisasi kinerja Kota Kediri jauh diatas BKD Provinsi Kalimantan Selatan dan tidak jauh tertinggal dengan BKPSDM Kota Jogja. Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi ASN Kota Kediri cukup tinggi, yang sadar akan pentingnya pengembangan diri berkelanjutan serta dibarengi dengan kedisiplinan dan kinerja yang cukup optimal.

1.1 c. Nilai SAKIP rata-rata Nasional dan rata-rata Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

Nilai SAKIP Pemerintah Kota Kediri berada di atas rata-rata kab/kota nasional, namun dibawah rata-rata kab/kota di jawa timur. Beberapa rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mereviu Kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh baik level kota atau PD untuk memastikan sasaran strategis disertai dengan indicator



kinerja relevan dan cukup, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan.

- 2) Melakukan revidi atas Pohon Kinerja yang sudah disusun dengan menjabarkan kinerja dari level strategis hingga ke operasional dengan memperhatikan hubungan logis atau sebab akibat yang langsung menunjang kinerja atasnya. Hasil penyusunan pohon kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun rancangan RPJMD dan Renstra PD teknokratik untuk periode perencanaan kedepan.
- 3) Melakukan penyempurnaan berkaitan pemetaan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting) dengan identifikasi kolaborasi kinerja khususnya di level PD yang memerlukan kontribusi dan dukungan dari PD atau entitas lain.
- 4) Memastikan formulasi perhitungan atau keandalan data yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan capaian kinerja kondisi yang diharapkan. Jika terdapat kondisi data yang dibutuhkan sulit diukur maka dapat dilakukan revidi atas rumusan kinerja dan identifikasi kembali formulasi perhitungannya.
- 5) Memastikan sistem pengukuran kinerja organisasi, yakni aplikasi APKPD dapat terintegrasi dengan aplikasi PUSDASIP, serta memastikan perumusan kinerja individu yang ada pada PUSDASIP benar-benar terkait dengan kinerja organisasi, sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi.
- 6) Menjadikan hasil dari pengukuran kinerja masing-masing PD dijadikan dasar dalam pemberian reward and punishment, termasuk dalam pemberian tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai.
- 7) Mempertahankan kualitas laporan kinerja dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembandingan (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja, serta memastikan seluruh laporan kinerja PD disertai dengan solusi yang sudah dilakukan dalam mempertahankan atau mencapai kinerja tahun berkenaan.
- 8) Meningkatkan kualitas isi laporan kinerja seluruh PD dengan memastikan antara narasi dan formulasi perhitungan yang ada pada laporan kinerja selaras sehingga tidak muncul perbedaan data.
- 9) Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi yang konkrit untuk setiap komponen evaluasi.



10) Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk perbaikan dan peningkatan capaian kinerja.

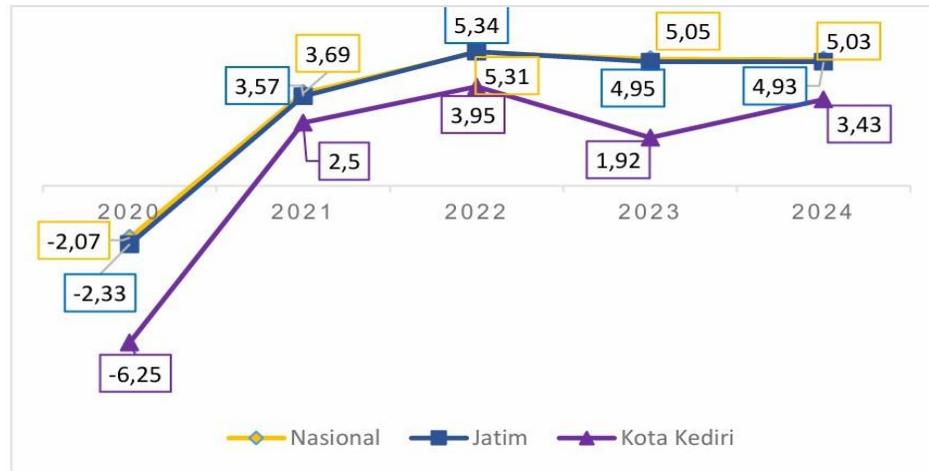
2. a. Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri dengan Kota Madiun Tahun 2024

Indeks Pembangunan Manusia Kota Kediri berada di bawah Indeks Pembangunan Manusia Kota Madiun. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Pengukuran IPM menggunakan 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Peningkatan IPM tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 75,94 tahun. Dari sisi pendidikan, pada tahun 2024 komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sebesar 15,71 tahun. Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 mencapai 10,92 tahun. Sedangkan, Indikator Pengeluaran per Kapita per Tahun pada tahun 2024 mencapai Rp13.670.000,00.

3. a. Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu daerah dalam periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi daerah menggambarkan bagaimana ekonomi suatu daerah berkembang dan semakin produktif. Sejak kontraksi ekonomi tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri berfluktuasi di bawah Nasional dan Provinsi Jawa Timur dengan kecenderungan meningkat, sebagaimana disajikan pada grafik berikut.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 – 2024

Secara rinci, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut.

#### Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,90	0,09	-0,31	0,45	0,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-7,63	-1,06	1,60	1,78	-5,24
C	Industri Pengolahan	-6,37	1,51	2,94	0,62	2,94
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,05	1,59	8,43	4,17	2,48
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,58	6,07	6,91	5,26	4,80
F	Konstruksi	-6,95	3,67	7,79	8,77	2,60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-12,45	9,81	8,61	6,02	4,26
H	Transportasi dan Pergudangan	-0,68	6,21	18,15	9,66	10,43
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,27	3,30	13,37	9,97	8,15
J	Informasi dan Komunikasi	17,82	5,75	5,33	9,17	6,50
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,44	1,87	3,53	2,13	5,09
L	Real Estat	2,00	0,30	5,10	0,92	2,52
M,N	Jasa Perusahaan	-7,04	0,39	3,99	6,25	6,25
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-2,29	0,39	1,72	4,03	2,90
P	Jasa Pendidikan	3,16	-1,31	1,18	2,86	8,13
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,94	5,53	2,07	1,52	3,23
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-14,33	1,41	15,64	6,38	8,58
	Produk Domestik Regional Bruto	-6,25	2,50	3,96	1,92	3,43

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 – 2024

Dari sisi jumlah, perkembangan PDRB Kota Kediri tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Perkembangan PDRB Kota Kediri pada Tahun 2020-2024



Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dalam Milyar Rp	132.406,06	141.467,12	152.778,31	159.736,72	168.748,92
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK) dalam Milyar Rp	84.374,98	86.485,59	89.907,21	91.631,35	94.774,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2020 – 2024

Struktur perekonomian Kota Kediri dapat dilihat dari distribusi persentase produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di kota Kediri yang disajikan pada tabel berikut.

#### Distribusi Persentase PDRB ADHK Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,24	0,24	0,23	0,23	0,24
B	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C	Industri Pengolahan	82,13	81,88	81,04	80,00	79,64
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
F	Konstruksi	1,64	1,62	1,71	1,83	1,80
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,67	9,11	9,68	10,19	10,31
H	Transportasi dan Pergudangan	0,45	0,44	0,51	0,58	0,61
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,48	1,48	1,62	1,78	1,87
J	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,07	2,04	2,16	2,21
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,97	0,94	0,97	0,99	1,00
L	Real Estat	0,42	0,40	0,40	0,39	0,38
M,N	Jasa Perusahaan	0,20	0,19	0,19	0,20	0,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,39	0,37	0,36	0,38	0,41
P	Jasa Pendidikan	0,82	0,76	0,71	0,71	0,75
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,20	0,19	0,19	0,19	0,19
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,29	0,28	0,32	0,34	0,36
	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020 – 2024

Sektor penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB Kota Kediri tahun 2024 adalah sektor industri pengolahan sebesar 79,64%. Kontribusi terbesar kedua disumbang dari sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 10,31%. Sektor informasi dan komunikasi menempati kontribusi terbesar ketiga dalam struktur perekonomian Kota Kediri, sebesar 2,21%. Sementara, sektor penyediaan akomodasi dan makan menempati urutan keempat sebesar 1,87% dan sektor konstruksi menempati urutan kelima sebesar 1,8% dalam mendukung struktur perekonomian Kota Kediri.

#### 4. a. Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Kediri, digunakan nilai Indeks Gini yang nilainya berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini



bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Indeks gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Indeks Gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2020 – 2024

Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan dan indeks gini, Pemerintah Kota Kediri melaksanakan beberapa program, antara lain: pelatihan kerja, bantuan modal kerja, kemudahan akses permodalan, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial pendidikan, bantuan pangan non tunai, rehabilitasi rumah tidak layak huni serta program lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.

#### 4. b. Tingkat Kemiskinan Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024

Secara umum kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah dengan menghitung garis kemiskinan. Penduduk yang



memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data kemiskinan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

#### Indikator Kemiskinan tahun 2020-2024

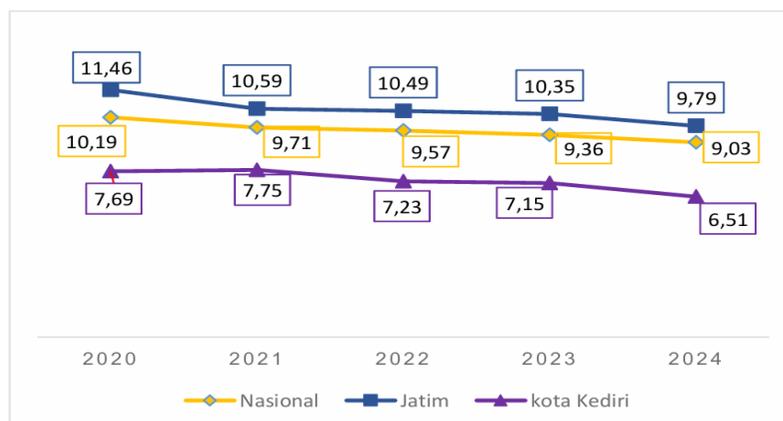
JENIS DATA	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	22,19	22,55	21,15	21,03	19,24
Persentase Kemiskinan (%)	7,69	7,75	7,23	7,15	6,51
Garis Kemiskinan (Rp)	493.438	506.936	537.326	587.723	621.051
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,96	1,03	1,42	1,08	1,02
Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0,17	0,21	0,41	0,23	0,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2020 – 2024

Untuk mengetahui kondisi kemiskinan di Kota Kediri, selain jumlah maupun persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Pada tahun 2024 indeks kedalaman kemiskinan berkurang 0,06 poin dibanding tahun 2023, menandakan bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin berkurang.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Pada tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan bertambah 0,02 poin dibanding tahun 2023, menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin sedikit meningkat. Tingkat kemiskinan Kota Kediri dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional tahun 2020-2024 dapat di lihat pada grafik berikut.

Tingkat kemiskinan Kota Kediri dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2020 – 2024



4.1 b. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri dengan Provinsi dan Kota Madiun tahun 2024

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri lebih kecil dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Kota Madiun. Jumlah angkatan kerja tahun 2024 sebanyak 165.918 orang, atau berkurang 403 orang dari tahun 2023. Dari jumlah tersebut, penduduk bekerja tahun 2024 sebanyak 159.426 orang. Penduduk bekerja merupakan cerminan angkatan kerja yang terserap di pasar kerja. Pada tahun 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,91 persen. TPT laki-laki sebesar 4,02 persen atau menurun sebesar 0,16 persen poin dari tahun 2023. Sedangkan, TPT perempuan sebesar 3,77 persen, dan turun 0,13 persen poin dari tahun 2023. Kondisi ketenagakerjaan Kota Kediri tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kondisi Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2020-2024

No	Jenis Data	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angkatan Kerja	152.265	156.591	163.821	166.321	165.918
	- Bekerja	142.804	146.620	156.641	159.567	159.426
	- Pengangguran	9.461	9.971	7.180	6.754	6.492
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,21%	6,37%	4,38%	4,06%	3,91%
	- Laki-laki	5,73%	8,34%	3,86%	4,18%	4,02%
	- Perempuan	6,88%	3,52%	5,03%	3,9%	3,77%
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	66,00%	67,35%	69,93%	71,83%	70,74%
	- Laki-laki	76,83%	80,24%	78,55%	83,35%	80,99%
	- Perempuan	55,35%	54,68%	61,44%	60,37%	60,55%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri 2020 – 2024

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja untuk masing-masing sektor. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2024, lapangan pekerjaan di Kota Kediri yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah jasa sebesar 72,72 persen, industri sebesar 24,24 persen, dan terakhir pertanian sebesar 3,04 persen. Tiga sektor ini masih menunjukkan pola yang sama dengan kondisi tahun 2022 dan 2023.



### 2.3.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi**

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrasi	77,00	84,67	109,96	<p>Analisis Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strategi yang telah dilakukan melalui penyusunan, monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Tematik dinilai baik</li> <li>2. Pelaksanaan kebijakan RB dan capaian sasaran strategis atas 21 indikator mandatori RB General dan capaian 5 indikator dampak RB Tematik dinilai rerata baik</li> </ol> <p>Hambatan :</p>	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Penguatan strategi pelaksanaan dan implementasi melalui penyusunan, monitoring dan evaluasi atas rencana aksi RB General Tematik</li> <li>2 Mendorong peningkatan capaian pelaksanaan kebijakan RB dan capaian sasaran strategis atas 21 indikator mandatori RB General dan capaian 5 indikator dampak RB Tematik</li> <li>3 Dapatnya menyampaikan dokumen pendukung atas</li> </ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Terdapat 1 (satu) indikator sasaran strategis RB Tematik mendapat nilai NOL dikarenakan dampak tidak mencapai target nasional.	ketercapaian indikator sasaran strategis RB dengan tepat waktu
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (3,80)	A (3,541)	93,18	Analisis Keberhasilan : 1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk mendukung proses layanan kepada masyarakat 2. Pemberian motivasi arahan dan bimbingan kepada pegawai di setiap kesempatan oleh pimpinan Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung proses layanan kepada masyarakat	Solusi : Optimalisasi proses kerja, penggunaan teknologi untuk efisiensi dan manajemen sumber daya yang lebih baik



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Indeks SPBE	3,66	3,89	106,28	Keunggulan penerapan SPBE Pemerintah Kota Kediri adalah pada aspek Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE, Perencanaan Strategis SPBE, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Penyelenggara SPBE, Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.	Perlu meningkatkan Aspek Audit TIK yaitu pada Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE dan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, terutama Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE yang masih kurang nilainya, semua pelaksanaan Audit masih perlu ditingkatkan dengan melaksanakan Audit oleh Auditor Eksternal sesuai pedoman yang berlaku. Selain itu, Aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan dan Penerapan Manajemen



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Perubahan yang masih memiliki nilai kematangan 2.
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	<p>Terpenuhinya seluruh kriteria (4 kriteria) dalam penyusunan laporan keuangan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah (SAP)</li> <li>2. Kecukupan pengungkapan</li> <li>3. Kepatuhan terhadap perundang-undangan</li> <li>4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu adanya konsistensi penerapan Standar Akuntansi (SAP) dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dalam penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>2. Meningkatkan kapasitas penyusunan laporan keuangan</li> </ol>
		Indeks Profesionalitas ASN	90,07	90,35	100,31	<p>Analisis Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komitmen seluruh Perangkat daerah untuk meningkatkan SDM Aparaturnya baik dari segi kompetensi teknis</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan instensitas kegiatan Diklat/Bimtek/Sosialisasi/Sejenis</li> <li>2. Mendorong ASN untuk melanjutkan pendidikan formalnya dan berkolaborasi</li> </ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>maupun pengembangan karakter</p> <p>2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi (pengembangan kompetensi secara daring)</p> <p>3. Peningkatan disiplin dan etika ASN dengan berbagai upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran (Memahami aturan disiplin dan etika, Pembinaan disiplin dan etika, Rekam kehadiran secara elektronik, pemeriksaan dan tindak</p>	<p>dengan universitas lokal terkait beasiswa pendidikan bagi ASN</p> <p>3. Digitalisasi pengelolaan kinerja ASN dan mengembangkan sesuai kebutuhan organisasi</p> <p>4. Meningkatkan intensitas kegiatan pencegahan dan tindak tegas pelanggarannya</p>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>tegas pelanggaran, kebijakan punishment pada penghitungan tambahan penghasilan)</p> <p>4. Memahami aturan pengelolaan kinerja pada ASN khususnya Pejabat Penilai dalam rangka penetapan, pelaporan dan evaluasi kinerja yang berkualitas</p> <p>Hambatan :</p> <p>1. Tingginya biaya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ASN (yang mengharuskan tatap muka) khususnya untuk Jabatan Struktural dan Fungsional yang</p>	



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>mengakibatkan masih rendahnya cakupan diklat</p> <p>5. Peningkatan pendidikan formal belum menjadi suatu hal yang menarik bagi mayoritas ASN Kota Kediri mengingat tingginya biaya dan faktor internal masing-masing individu</p> <p>6. Masih ditemukan anggapan bahwa penetapan, pengukuran dan pelaporan kinerja merupakan dokumen kelengkapan administrasi kepegawaian saja</p> <p>7. Masih ditemukan minimnya objektivitas Pejabat Penilai</p>	



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						atas evaluasi kinerja bawahannya.	
		Nilai SAKIP	A (81,05)	72,49	89,44	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mereviu Kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh baik level kota atau PD untuk memastikan sasaran strategis disertai dengan indikator kinerja relevan dan cukup, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan</li><li>2. Melakukan reviu atas Pohon Kinerja yang sudah disusun dengan menjabarkan kinerja dari level strategis hingga ke operasional dengan memperhatikan hubungan logis atau sebab akibat yang</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan reviu secara menyeluruh terhadap RPD dan Renstra PD untuk memastikan sasaran strategis disertai dengan indikator kinerja relevan dan cukup, sehingga dapat menggambarkan kondisi yang diharapkan</li><li>2. Melakukan reviu Pohon Kinerja Kota dan seluruh Perangkat Daerah yang digunakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD</li><li>3. Melakukan FGD penyusunan crosscutting atas hasil Pohon Kinerja yang telah disusun</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>langsung menunjang kinerja atasnya. Hasil penyusunan pohon kinerja tersebut agar dimanfaatkan dalam menyusun rancangan RPJMD dan Renstra PD teknokratik untuk periode perencanaan kedepan</p> <p>3. Memastikan formulasi perhitungan atau keandalan data yang digunakan untuk mengukur kinerja telah sesuai dengan capaian kinerja kondisi yang diharapkan. Jika terdapat kondisi data yang dibutuhkan sulit diukur maka dapat dilakukan reuiu atas rumusan</p>	<p>4. Melakukan penyempurnaan dokumen IKU Kota dan PD dengan menggunakan pengukuran kinerja yang SMART</p> <p>5. Melakukan sinkronisasi PUSDASIP, PUSDAY dengan APKPD berdasarkan E-KIN BKN</p> <p>6. Melakukan BIMTEK Penyusunan Laporan Kinerja PD</p> <p>7. Peningkatan kapasitas evaluator</p>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>kinerja dan identifikasi kembali formulasi perhitungannya</p> <p>4. Memastikan sistem pengukuran kinerja organisasi, yakni aplikasi APKPD dapat terintegrasi dengan aplikasi PUSDASIP, serta memastikan perumusan kinerja individu yang ada pada PUSDASIP benar-benar terkait dengan kinerja organisasi, sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi</p> <p>5. Meningkatkan kualitas isi laporan kinerja seluruh PD dengan memastikan antara</p>	



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>narasi dan formulasi perhitungan yang ada pada laporan kinerja selaras sehingga tidak muncul perbedaan data</p> <p>6. Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi yang konkrit untuk setiap komponen evaluasi</p>	
		Skor EKPPD	3,58	N/A	N/A	Skor EKPPD tahun 2024 belum dapat tersaji karena hasil penilaian dari kemendagri belum keluar	Menggali potensi data atas indikator kinerja kunci (IKK) LPPD sehingga dapat meningkatkan skor capaian kinerja
		Level SPIP	4	3,207	80,18	1. SDM belum sepenuhnya memahami konsep cascading,	1. Memperbaiki perencanaan dengan memperhatikan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>konsep indikator kinerja yang baik untuk setiap jenjang sasaran, konsep target kinerja yang baik untuk setiap jenjang sasaran dan pengaruh untkitnya untuk sasaran di atasnya</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang sudah disusun</li><li>3. Belum terdapat kebijakan yang memadai untuk deteksi dan cegah</li><li>4. Masih minimnya kesadaran untuk memasukkan risiko fraud dan kemitraan dalam risk register</li></ol>	<p>cascading sesuai proses bisnis yang didukung dengan indikator kinerja yang berorientasi outcome, memenuhi kriteria SMART, dan didukung target yang tepat;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Memperbaiki kualitas sasaran dan cascading kinerja dengan menggunakan logic model yang menggambarkan kausalitas antara sasaran yang akan diwujudkan dengan program kegiatan sub kegiatan dan menjabarkan kinerja organisasi setiap perangkat daerah ke level individu dan pemanfaatannya</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<ol style="list-style-type: none"><li>3. Menetapkan indikator kinerja yang terukur dan sesuai sasaran yang ditetapkan;</li><li>4. Melakukan pendampingan oleh Bappeda dan Inspektorat kepada fungsi perencanaan OPD sehingga dapat menyusun perencanaan yang menggambarkan kontribusi kinerja OPD</li><li>5. Mendorong Sekretaris Daerah dan Kepala OPD untuk menghimbau seluruh pihak dalam Struktur MR agar menjalankan fungsinya masing-masing</li><li>6. Mendorong pelaksanaan proses Manajemen Risiko secara utuh dalam proses tatakelola mulai</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan dengan didukung SDM sebagaimana telah ditetapkan dalam SK Struktur Pengelola Risiko di lingkungan Pemerintah Kota Kediri;</p> <p>7. Mendorong pelaksanaan Proses Manajemen Risiko secara utuh dengan didukung ketersediaan SDM, pembinaan SDM, anggaran yang memadai, dan penetapan pelaksanaan MR sebagai indikator kinerja;</p> <p>8. Mendorong Sekretaris Daerah dan Kepala OPD untuk menghimbau seluruh UPR agar mengidentifikasi risiko fraud juga</p>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							<p>risiko kemitraan dan memasukannya dalam risk register</p> <p>9. TAPD membentuk tim asistensi pengisian indikator kinerja dalam dokumen penganggaran</p>
		Jumlah WBK/WBBM	10	1	10,00	<p>Hambatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya apresiasi (penghargaan/award) bagi OPD yang berhasil memperoleh predikat WBK/WBBM</li> <li>2. Tidak adanya anggaran khusus pada unit kerja yang melakukan pembangunan ZI</li> <li>3. Tidak ada crosscutting dengan indikator perolehan</li> </ol>	<p>Solusi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan sosialisasi ZI antara APIP dan APH (kejaksaan) yang telah memperoleh predikat WBK</li> <li>2. APIP lebih mengintensifkan pendampingan penilaian internal terhadap unit kerja yang telah melakukan pembangunan ZI</li> </ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						WBK di unit kerja yang dilakukan pembangunan ZI	
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	24,00%	25,86%*	107,75	Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi	Terus melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi secara konsisten dan berkelanjutan
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	66,67%	54,26%	81,38	<p>Analisis Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai untuk mendukung proses layanan kepada masyarakat.</li> <li>2. Pemberian motivasi, arahan dan bimbingan kepada pegawai di setiap kesempatan oleh pimpinan.</li> <li>3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk</li> </ol>	Solusi : Optimalisasi proses kerja, penggunaan teknologi untuk efisiensi dan manajemen sumber daya yang lebih baik



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						mendukung proses layanan kepada masyarakat	
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100,00	<p>Analisis Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dukungan Perangkat Daerah serta eksekutif serta keterlibatan masyarakat sudah cukup baik</li> <li>Inovasi yang dilakukan dan mendapatkan penghargaan nasional</li> </ol> <p>Hambatan :</p> <p>Isu interoperabilitas yang terus menjadi tantangan</p>	<p>Solusi :</p> <p>Koordinasi yang lebih baik dengan Perangkat Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan aplikasi dan sistem yang akan dikembangkan</p>
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	81,2	81,88	100,84	<p>Analisis Keberhasilan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.</li> </ol>	<p>Inovasi :</p> <p>Program English Massive (E-MAS) pembelajaran berbasis komunitas di masyarakat untuk kemampuan</p>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	berakhlak dan berbudaya					<ol style="list-style-type: none"><li>2. Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi prioritas pembangunan di bidang pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak putus sekolah.</li><li>3. Penambahan Sekolah Inklusi yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.</li><li>4. Penyelenggaraan Kelompok Belajar bagi anak-anak jalanan yang putus sekolah.</li></ol>	speaking atau komunikasi dengan bahasa inggris secara gratis.
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas	Indeks Pendidikan	0,80	0,80	100,00	Analisis Keberhasilan :	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemerataan fasilitas pendidikan secara kewilayahan.</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pendidikan masyarakat					<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan di sektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas SDM.</li><li>2. Program Indonesia Pintar (PIP) yang menjadi prioritas pembangunan di bidang pendidikan untuk membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak putus sekolah.</li><li>3. Penambahan Sekolah Inklusi yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan yang berkeadilan.</li><li>4. Penambahan sekolah negeri pada jenjang SMP.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Menyediakan pendidikan yang terjangkau.</li><li>3. Pemberian bantuan pendidikan bagi warga kurang mampu baik melalui bansos beasiswa maupun dana UPZ.</li><li>4. Pemberian bantuan seragam.</li><li>5. Alokasi anggaran untuk kegiatan fisik dan pemeliharaan sarana pendidikan.</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						5. Penyelenggaraan Kelompok Belajar bagi anak-anak jalanan yang putus sekolah. 6. Program English Massive (E-MAS) pembelajaran berbasis komunitas di masyarakat untuk kemampuan speaking atau komunikasi dengan bahasa Inggris secara gratis.	
		Indeks Minat Baca	81,50	81,49	99,99	Penggunaan social media dalam promosi dan penambahan layanan untuk memudahkan masyarakat mengakses perpustakaan. Sebagai contoh layanan delivery order buku.	Meningkatkan pelayanan perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan. Menggunakan teknologi informasi sebagai alat promosi perpustakaan.
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas	Angka harapan hidup	75,00	75,94	101,25	1. Kerjasama lintas program dan lintas sektor	1. Intervensi lanjut sesuai dengan pemetaan permasalahan Kesehatan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kesehatan masyarakat					2. Pengendalian penyakit menular dan tidak menular 3. Pendampingan oleh dinas kesehatan dalam peningkatan mutu fasilitas pelayanan kesehatan	2. Meningkatkan kegiatan promotif dan preventif pada penyakit menular dan tidak menular 3. Fasyankes memenuhi perencanaan strategis dan melaporkan INM setiap tahun
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80	N/A	N/A	Manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah laki-laki.	Mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat
3.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	5,00 – 6,00	3,43	68,60	1. Lapangan usaha seperti transportasi dan pergudangan, jasa lainnya, penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa	Mengoptimalkan sasaran program dan kegiatan pada sektor usaha kecil menengah



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dan pengembangan ekonomi kreatif					<p>pendidikan, serta informasi mengalami pertumbuhan</p> <p>2. Industri pengolahan meningkat</p>	
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T – 5,9 T	3,1 T	65,96	<p>1. Stabilitas aktivitas perdagangan yang tetap berjalan dengan baik.</p> <p>2. Dukungan kebijakan yang kondusif, seperti fasilitasi pemasaran dan penguatan kapasitas UMKM.</p> <p>3. Peningkatan jumlah pelaku usaha dan wirausaha baru di sektor perdagangan.</p> <p>4. Perlambatan pertumbuhan industri hasil tembakau sebagai sektor utama industri pengolahan.</p>	<p>1. Meningkatkan promosi produk unggulan daerah melalui platform digital dan pameran berskala nasional.</p> <p>2. Mendorong kolaborasi antarUMKM untuk memperkuat daya saing melalui klusterisasi usaha.</p> <p>3. Menyediakan insentif bagi usaha yang meningkatkan nilai tambah produk lokal untuk menghadapi persaingan dengan produk luar daerah.</p>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						5. Kurangnya investasi di sektor industri nontembakau sebagai alternatif pertumbuhan. 6. Keterbatasan akses pemasaran bagi industri kecil menengah (IKM).	4. Diversifikasi industri pengolahan dengan mendorong sektor pangan olahan dan industri kreatif. 5. Penyediaan insentif bagi investasi di sektor industri non-tembakau. 6. Mendorong industri kecil dan menengah agar dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri besar.
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,00% - 6,00%	92,56%	1.851,2	1. Monev Perkembangan Pariwisata & Ekonomi Kreatif 2. Program Bantuan Modal Usaha memicu kenaikan jumlah wirausaha baru di beberapa sektor ekonomi kreatif	Seminar Peningkatan Kompetensi & Wawasan SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<ol style="list-style-type: none"><li>3. Fasilitasi promosi dan pemasaran seperti pameran, promosi media cetak dan media social serta fashion show, yang meningkatkan akses pemasaran dan omzet pelaku usaha, khususnya ekonomi kreatif</li><li>4. Pelatihan dan pendampingan bisnis yang meningkatkan motivasi, kualitas dan daya saing pelaku usaha ekonomi kreatif</li></ol>	
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	1.400 M	1.477 M	105,50	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Daya dukung investasi yang kurang optimal</li><li>2. Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha untuk melaporkan LKPM</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatkan asistensi LKPM dan terobosan asistensi LKPM</li><li>2. Menyusun <i>profilling</i> pelaku usaha di Kota Kediri</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							3. Menyusun sistem manual pembuatan profil pengawasan & pemantauan 4. Menyusun IPRO kawasan GOR Jayabaya 5. Mendorong penguatan <i>city branding</i>
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66,67%	100%	149,99	Peningkatan kinerja BUMD	Capacity Building
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	88	87,41	99,33	1. Monitoring kinerja ruas jalan yang melebihi standar kinerja minimal dan/atau memiliki VCR > 0,75. 2. Melengkapi pendataan kinerja jalan pada jalan dengan fungsi kolektor sekunder untuk mendukung pengukuran kinerja infrastruktur jalan pada	1. Perlu peningkatan kualitas jalan di beberapa ruas jalan 2. Perlu adanya peningkatan kinerja trotoar dengan menambah panjang trotoar untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalur pejalan kaki, maupun meningkatkan kondisi perkerasan trotoar, khususnya pada ruas



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam).	trottoar dengan kondisi rusak. Penambahan panjang trottoar di Kota Kediri
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.750.000	1.759.066	100,52	Banyaknya event yang diselenggarakan, seperti seni dan olahraga	Meningkatnya jumlah dan kualitas event yang diselenggarakan
4.	Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan	Indeks Gini	0,350 – 0,390	0,337	103,71	Pelatihan kerja, bantuan modal kerja, kemudahan akses permodalan, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial pendidikan, bantuan pangan non tunai, rehabilitasi rumah tidak layak huni serta program lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.	Program intervensi pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kota Kediri cukup efektif.
		Tingkat Kemiskinan	6,90	6,51	105,65	Pelatihan kerja, bantuan modal kerja, kemudahan akses	Program intervensi pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						permodalan, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial pendidikan, bantuan pangan non tunai, rehabilitasi rumah tidak layak huni serta program lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.	guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kota Kediri cukup efektif.
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	20.304	19.240	105,53	Pelatihan kerja, bantuan modal kerja, kemudahan akses permodalan, jaminan kesehatan nasional, bantuan sosial pendidikan, bantuan pangan non tunai, rehabilitasi rumah tidak layak huni serta program lainnya dalam rangka meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban masyarakat.	Program intervensi pemerintah dengan menyusun berbagai kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk di Kota Kediri cukup efektif.



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05%	3,91%	103,58	Fasilitasi pelatihan, promosi, dan pemasaran seperti pameran, promosi media cetak, media sosial, serta fashion show, telah meningkatkan akses pemasaran dan omzet pelaku usaha, sehingga dapat meningkatkan skala usaha dan menyerap tenaga kerja.	Pelatihan dan pendampingan bisnis yang meningkatkan motivasi, kualitas, dan daya saing bagi pelaku usaha dan calon pelaku usaha.
5.	Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran	Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama	4,56 (Sangat Tinggi)	4,56 (Sangat Tinggi)	100,00	Kesadaran tentang pentingnya toleransi, teladan tokoh agama dan masyarakat, kegiatan bersama, lembaga pendidikan, kebijakan pemerintah, keterlibatan dan koordinasi antar komunitas dan institusi, serta sejarah dan tradisi lokal.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perlunya untuk terus melakukan kajian secara sistematis dan berkelanjutan menyangkut kehidupan keagamaan di Kota Kediri.</li><li>2. Mengukur dan metakan kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan daerah serta menempatkannya pada pos-pos jabatan yang sesuai dengan</li></ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							latar belakang dan kualifikasi yang dimilikinya 3. Terus melakukan kajian terkait tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat di masa depan 4. Menindaklanjuti hasil-hasil kajian terkait dengan pengembangan kota dalam perencanaan pembangunan
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	87	86,04	98,89	1. Kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban dan keamanan sangat berperan penting. 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban akan sangat mempengaruhi hasilnya.	Upaya peningkatan Indeks Ketentraman dan Ketertiban memerlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan berbagai sektor terkait. Dengan pendekatan yang menyeluruh, seperti peningkatan kualitas aparat, partisipasi aktif



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						<p>3. Ketidaksetaraan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran dapat memicu ketidakstabilan sosial yang berdampak pada ketenteraman dan ketertiban.</p> <p>4. Keberhasilan Satpol PP sangat bergantung pada ketersediaan Sarana Prasarana, teknologi dan infrastruktur yang memadai.</p>	<p>masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kualitas kehidupan sosialekonomi, diharapkan nilai IKK dapat meningkat, menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.</p>
6.	Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan	Indeks Kota Layak Huni	80,50 (Baik)	81,02	100,65	Bertambahnya jumlah hunian yang layak, dengan faktor pendukung keberhasilan: Dukungan dari Kelurahan dalam pelaksanaan Perbaikan RTLH, pendamping RTLH dari Kelurahan yang aktif selama pelaksanaan kegiatan,	Meningkatkan koordinasi yang baik dengan Kelurahan dan Pendamping RTLH. Memberikan sosialisasi kepada pendamping RTLH. Memberikan sosialisasi kepada penerima Bansos untuk pemenuhan persyaratan dan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Penerima Bansos yang mudah diajak koordinasi sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan, dan Monitoring rutin oleh tim Dinas mulai dari kondisi awal saat pembongkaran, perbaikan 50%, sampai perbaikan 100% (selesai)	penggunaan dana yang sesuai dengan pengajuan.
6.1	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	83,50%	85,46%	102,35	Hambatan Yang Masih Ada: 4. Sosialisasi belum dapat menjangkau seluruh masyarakat di kota Kediri 5. Tidak seluruh masyarakat dapat mengakses system berbasis website 6. Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang</li> <li>2. Diperlukan pengoptimalan terhadap system SITR agar informasidan pelayanan dapat dilakukan secara digital</li> </ol>



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Faktor Keberhasilan: Adanya tim pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang dan bangunan gedung	3. Peningkatan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan focus pada Penataan kawasan untuk mewujudkan ruang yang inklusif bagi masyarakat dan Penegakan RTRW
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94,92%	95,53%	100,64	Bertambahnya jumlah hunian yang layak, dengan faktor pendukung keberhasilan: Dukungan dari Kelurahan dalam pelaksanaan Perbaikan RTLH, pendamping RTLH dari Kelurahan yang aktif selama pelaksanaan kegiatan, Penerima Bansos yang mudah diajak koordinasi sehingga mempermudah pelaksanaan kegiatan, dan Monitoring rutin oleh tim Dinas mulai dari kondisi awal	Meningkatkan koordinasi yang baik dengan Kelurahan dan Pendamping RTLH. Memberikan sosialisasi kepada pendamping RTLH. Memberikan sosialisasi kepada penerima Bansos untuk pemenuhan persyaratan dan penggunaan dana yang sesuai dengan pengajuan.



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						saat pembongkaran, perbaikan 50%, sampai perbaikan 100% (selesai)	
		Indeks Infrastruktur	88	87,41	99,32	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring kinerja ruas jalan yang melebihi standar kinerja minimal dan/atau memiliki VCR &gt; 0,75.</li> <li>2. Melengkapi pendataan kinerja jalan pada jalan dengan fungsi kolektor sekunder untuk mendukung pengukuran kinerja infrastruktur jalan pada indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik (&gt;40 Km/Jam).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu peningkatan kualitas jalan di beberapa ruas jalan</li> <li>2. Perlu adanya peningkatan kinerja trotoar dengan menambah panjang trotoar untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalur pejalan kaki, maupun meningkatkan kondisi perkerasan trotoar, khususnya pada ruas trotoar dengan kondisi rusak. Penambahan panjang trotoar di Kota Kediri</li> </ol>
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan,	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,50	64,10	Rendahnya keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak	Memperbarui data dukung indikator di Indeks Ketahanan Daerah secara berkelanjutan dan memprioritaskan



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kesiapsiagaan dan penanganan bencana					berpedoman pada skala prioritas yang juga menunjang pada pelayanan wajib SPM	indikator yang menunjang pelayanan wajib SPM
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,09	100,74	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum adanya uji emisi bagi kendaraan yang masuk kota Kediri sehingga kualitas udara belum maksimal. Beberapa perusahaan ada yg belum taat uji emisi terkait genset</li> <li>2. Masih belum maksimal hasil uji kualitas air</li> <li>3. Kota Kediri tidak memiliki hutan mangrove yang dikelola oleh Pemerintah Daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kendaraan angkutan wajib uji emisi</li> <li>2. Perusahaan yg memiliki genset wajib uji emisi</li> <li>3. Memperketat persyaratan ijin UKL UPL / PERTEK terkait perusahann wajib mengolah limbahnya sebelum di buang ke media lingkungan</li> <li>4. Memaksimalkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk meningkatkan keindahan kota</li> </ol>
		Persentase Ruang Terbuka Hijau	17,30	17,04	98,50	Lahan aset kelurahan sebagai lokasi pembangunan RTH terbatas,	Pendataan Aset OPD lain yang tidak terpakai di masing-masing kelurahan sebagai lokasi Pembangunan RTH



No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(RTH) per Satuan Luas Wilayah				sehingga tidak semua kelurahan terdapat RTH	

Sumber : Pemerintah Kota Kediri tahun 2024

### 2.3.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi**

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi</b>								
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Opini BPK	WTP	WTP	100,00	10.388.970.552,00	8.651.021.497,00	83,27	20,1%
		Indeks Profesionalitas ASN	90,07	90,35	100,31	3.773.831.320,00	3.549.375.668,00	87,17	6,7%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang baik dan bersih	Nilai SAKIP	A (81,05)	72,49	89,44	34.436.225.760,00	29.766.230.822,00	85,59	-
		Skor EKPPD	3,58	N/A	N/A	1.548.613.300,00	868.988.720,00	56,11	-
		Level SPIP	4	3,207	80,18	512.800.000,00	501.468.243,00	97,16	-
		Jumlah WBK/WBBM	10	1	10,00	224.250.000,00	216.375.191,00	96,49	-
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	24,00%	25,86%*	107,75	5.316.217.654,00	5.051.584.906,00	95,02	13,4%
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	66,67%	54,26%	81,38	252.935.331,00	232.346.800,00	91,86	-
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100%	100%	100,00	5.231.994.742,00	4.859.866.335,00	94,76	7,7%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya</b>								
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,80	0,80	100,00	106.460.200.321,00	98.499.528.973,00	92,52	8,1%
		Indeks Minat Baca	81,50	81,49	99,99	367.481.300,00	363.770.391,00	98,99	-
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	75,00	75,94	101,25	91.347.956.102,00	77.306.406.292,00	84,63	19,6%
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,80	N/A	N/A	1.724.287.950,00	1.596.523.870,00	96,24	-
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif</b>								



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah	Nilai Peningkatan PDRB	4,7 T – 5,9 T	3,1 T	65,96	32.240.199.690,00	18.638.319.382,00	86,73	-
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	5,00% - 6,00%	92,56%	1.851,2	504.552.200,00	490.026.501,00	97	1.806,1%
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	1.400 M	1.477 M	105,50	1.622.724.618,00	1.519.515.140,00	96,98	12,7%
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	66,67%	100%	149,99	198.108.100,00	182.161.636,00	91,95	8,05%
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	88	87,41	99,33	28.879.081.760,00	21.879.202.787,00	75,76	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	1.750.000	1.759.066	100,52	850.000.000,00	800.122.553,00	93,50	6,8%
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan</b>								
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	20.304	19.240	105,53	18.443.245.000,00	16.355.633.579,00	88,68	19,0%
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,05%	3,91%	103,58	9.879.200.000,00	9.324.663.406,00	94,38	9,7%
<b>5.</b>	<b>Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran</b>								
5.1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat	Indeks Ketentraman dan ketertiban	87	86,04	98,89	23.899.852.007,00	19.691.103.265,00	82,39	-
<b>6.</b>	<b>Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan</b>								
6.1	Meningkatnya ketaatan	Persentase luas lahan yang	83,50%	85,46%	102,35	723.281.500,00	616.405.160,00	85,22	20,1%



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	penyelenggaraan penataan ruang	peruntukannya sesuai RTRW							
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	94,92%	95,53%	100,64	4.230.397.250	3.948.261.554,00	93,33	7,8%
		Indeks Infrastruktur	88	87,41	99,32	28.879.081.760,00	21.879.202.787,00	75,76	-
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,78	0,50	64,10	1.075.979.300,00	1.056.180.195,00	98,16	-
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,60	67,09	100,74	1.462.857.800,00	1.428.609.294,00	95,65	3,2%
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	17,30	17,04	98,50	9.615.997.829,00	9.578.110.538,00	99,75	-



No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
						(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		per Satuan Luas Wilayah							

Sumber : Pemerintah Kota Kediri tahun 2024

Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

### 2.3.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

**Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan**

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang Baik dan Bersih berorientasi pada pelayanan prima dan optimalisasi teknologi informasi							



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Opini BPK	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	100,00	Menunjang	Program Pengelolaan Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik	78,00	Menunjang	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan indikator Persentase Golongan aset yang sudah terinventarisasi dengan baik menunjang Meningkatnya tata kelola



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pemerintahan yang baik dan bersih
		Indeks Profesionalitas ASN	100,31	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Kebutuhan pegawai sesuai dokumen kebutuhan formasi	94,00	Menunjang	Program berisi kegiatan yang output keluarannya mengatur manajemen ASN mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian ASN, juga system informasi ASN yang menjadi faktor keberhasilan akuntabilitas kinerja layanan kepegawaian
					Persentase hasil pelayanan tepat waktu	98,44	Menunjang	Program berisi kegiatan yang output keluarannya mengatur manajemen



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ASN mulai dari perencanaan kebutuhan hingga pemberhentian ASN, juga system informasi ASN yang menjadi factor keberhasilan akuntabilitas kinerja layanan kepegawaian
					Persentase ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan aparatur	89,70	Menunjang	Program kepegawaian memuat kegiatan pengelolaan SDM ASN seperti pengelolaan kinerja, disiplin dan pengembangan kapasitas ASN



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tingkat disiplin ASN	99,88	Menunjang	Program kepegawaian memuat kegiatan pengelolaan SDM ASN seperti pengelolaan kinerja, disiplin dan pengembangan kapasitas ASN
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase pejabat struktural dan fungsional yang telah diklat jabatan	89,61	Menunjang	Program ini memuat kegiatan pelaksanaan diklat teknis, diklat kepemimpinan, diklat fungsional dan diklat dasar yang berpengaruh pada profesionalisme ASN



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Nilai SAKIP	89,44	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Rata-rata nilai SAKIP komponen pelaporan perangkat daerah	96,72	Menunjang	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Rata- rata nilai SAKIP komponen pelaporan perangkat daerah menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00	Menunjang	Program menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase layanan penyediaan jasa penunjang urusan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								pemerintahan daerah menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
					Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan	100,00	Menunjang	Program menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase cakupan pelayanan administrasi keuangan menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
					Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	100,00	Menunjang	Program menunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								dengan indikator Persentase keselarasan dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu	100,00	Menunjang	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan daerah dengan indikator Persentase dokumen pengendalian yang disusun tepat waktu menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD	100,00	Menunjang	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Pembangunan daerah dengan indikator Persentase keselarasan perencanaan sasaran RKPD bidang Pemerintahan sosial budaya dengan RPJMD menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
				PROGRAM PENELITIAN DAN	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang	100,00	Menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah dengan indikator



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENGEMBANGAN DAERAH	dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan			Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		Skor EKPPD	N/A	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Presentase penyampaian IKK dengan Data yang Valid	89,76	Menunjang	Menggali Potensi Data atas Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD sehingga dapat meningkatkan Skor Capaian Kinerja
		Level SPIP	80,18	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	100,00	Menunjang	Program perumusan kebijakan, dan pendampingan dan asistensi dengan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	100,00	Menunjang	Program perumusan kebijakan, dan pendampingan dan asistensi dengan indikator Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		Jumlah WBK/WBBM	10,00	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	100,00	Menunjang	Program perumusan kebijakan, dan pendampingan dan asistensi dengan indikator Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi menunjang Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	107,75	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Rata-rata persentase realisasi pajak dan retribusi yang dikelola OPD	100,00	Menunjang	Program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator Rata-rata persentase realisasi pajak dan retribusi yang dikelola OPD menunjang Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
1.3	Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang memperoleh nilai A	81,38	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rekomendasi hasil asistensi PEKPPP pada PD lokus yang ditindaklanjuti	90,00	Menunjang	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator Persentase rekomendasi hasil asistensi PEKPPP pada PD lokus yang ditindaklanjuti menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Meningkatnya pelayanan publik yang prima bagi masyarakat
1.4	Meningkatnya penerapan Smart City	Persentase implementasi Smart City	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Aplikasi Informasi Yang Memiliki Tata Kelola Yang Baik	91,92	Menunjang	Program telah menunjang indikator kinerja tujuan
				PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Informasi Yang Disampaikan Melalui Jaringan Komunikasi Yang Aman	97,60	Menunjang	Program telah menunjang indikator kinerja tujuan
2.	Meningkatnya kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang berakhlak dan berbudaya							



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.1	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	100,00	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	a. APM SD/MI/Paket A (%) b. APM SMP/MTs/Paket B (%) c. APK TK (%) d. Angka Melek Huruf diatas 15 tahun	92,52	Menunjang	Program dan Kegiatan pada pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dapat terlaksana dengan baik dan menunjang keberhasilan capaian kinerja, melalui peningkatan efektifitas pemanfaatan dana BOS SD dan bantuan KIP yang tepat sasaran, pemenuhan dan perluasan akses pendidikan dasar secara merata dan berkeadilan, adanya bantuan seragam gratis untuk siswa baru



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kelas 1 SD baik negeri dan swasta serta peningkatan dan perluasan fasilitas sarana dan prasarana untuk menunjang pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi
		Indeks Minat Baca	99,99	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan	100,00	Menunjang	Program pembinaan perpustakaan menunjang 3 indikator
2.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Angka harapan hidup	101,25	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik	100,00	Menunjang	Program pemenuhan upaya Kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan Masyarakat dengan indikator



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				Persentase sarana prasarana fasilitas kesehatan yang berfungsi baik menunjang Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten	100,00	Menunjang	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kesehatan dengan indikator Persentase layanan kesehatan yang dilayani tenaga kesehatan yang berkompeten menunjang Meningkatnya akses dan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kualitas kesehatan masyarakat
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes	90,00	Menunjang	Program sediaan farmasi, alat Kesehatan dan makanan minuman dengan indikator Tingkat ketersediaan obat di Sarkes/Yankes menunjang Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Tingkat Kualitas Layanan Kesehatan	97,40	Menunjang	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan dengan indikator Tingkat kualitas layanan Kesehatan menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								akses dan kualitas kesehatan masyarakat
2.3	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	N/A	PROGRAM PENGARUSTAMAPAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	89,00	Menunjang	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan dengan indikator Cakupan Pemenuhan Fasilitas Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender menunjang Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	89,00	Menunjang	Program pengelolaan system data gender dan anak dengan indikator Cakupan Pemenuhan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender menunjang Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
<b>3.</b>	<b>Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah berbasis potensi unggulan daerah dan pengembangan ekonomi kreatif</b>							
3.1	Meningkatnya produk domestik regional bruto	Nilai Peningkatan PDRB	65,96	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pelaku usaha yang menjadi eksportir	2422,00	Menunjang	Program-program ini berfokus pada peningkatan daya saing



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	khususnya produk-produk unggulan daerah			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah pelaku usaha yang omsetnya naik	1229,00	Menunjang	produk lokal dan perluasan jaringan distribusi, sehingga mendorong pertumbuhan ekspor dan impor yang seimbang.
				PROGRAM STANDARISASIN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat-alat UTTP bertanda tera sah yang berlaku	70,54	Menunjang	Program ini memastikan alatalat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) memenuhi standar, sehingga memberikan perlindungan kepada konsumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap produk lokal.



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	4,15	Menunjang	Program ini memastikan ketersediaan dan distribusi barang kebutuhan pokok berjalan lancar, sehingga membantu menekan tingkat inflasi. Selain itu program ini juga memastikan distribusi pupuk dan pestisida bersubsidi berjalan sesuai aturan, sehingga mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga.
				PROGRAM PERENCANAAN	Persentase IKM yang memenuhi standar	50,44	Menunjang	Program ini memberikan dukungan pembinaan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				dan pemberdayaan industri kecil menengah (IKM), sehingga mendorong munculnya wirausaha baru di sektor perindustrian.
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data IKM yang masuk dalam SIINas	11,44	Menunjang	Program ini memastikan data industri selalu up-to-date, sehingga memudahkan perencanaan dan pengembangan sektor industri.
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,	1. Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro 2. Jumlah Wirausaha Baru	13,86	Menunjang	Program pemberdayaan usaha menengah, ushaa kecil, dan usaha mikro (UMKM) dengan indikator



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3. Persentase Usaha Mikro yang terlatih 4. Persentase Usaha Mikro ekonomi kreatif			kinerja Persentase Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro, Jumlah Wirausaha Baru, Persentase Usaha Mikro yang terlatih, Persentase Usaha Mikro ekonomi kreatif menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk- produk unggulan daerah
				PROGRAM PENYEDIA DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas tanaman pangan padi (ton)	100,00	Menunjang	Program penyedia dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator Produktivitas tanaman pangan padi



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								(ton) menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk- produk unggulan daerah
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGUNGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi	56,00	Menunjang	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan indikator Persentase kelompok tani yang dilatih dan menerapkan teknologi menunjang Meningkatkan produk domestik regional bruto khususnya produk- produk unggulan daerah



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dibina	98,00	Menunjang	Program penyuluhan pertanian dengan indikator Persentase kelompok tani yang dibina menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk- produk unggulan daerah
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produk hasil peternakan (ton)	103,91	Menunjang	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dengan indikator Produk hasil peternakan (ton) menunjang Meningkatkan produk domestik regional



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								bruto khususnya produk-produk unggulan daerah
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN VETERINER	Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak	20,50	Menunjang	Program pengendalian Kesehatan hewan dan Kesehatan veteriner dengan indikator Persentase menurunnya jumlah kejadian penyakit ternak menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	Produksi perikanan (kw)	100,13	Menunjang	Program pengelolaan perikanan dengan indikator Produksi perikanan (kw)



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	100,00	Menunjang	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator Jumlah pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
					Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita)	100,00	Menunjang	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan indikator Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita) menunjang Meningkatnya produk domestik regional bruto khususnya produk-produk unggulan daerah
3.2	Meningkatnya ekonomi kreatif	Pertumbuhan ekonomi kreatif	1.851,2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik	102,22	Menunjang	Program peningkatan daya Tarik destinasi pariwisata dengan indikator Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik menunjang Meningkatnya ekonomi kreatif



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase potensi wisata yang dipromosikan	102,13	Menunjang	Program pemasaran pariwisata dengan indikator Persentase potensi wisata yang dipromosikan menunjang Meningkatnya ekonomi kreatif
3.3	Meningkatnya jumlah investasi	Nilai realisasi investasi	105,50	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	365,70	Menunjang	Program pengembangan iklim penanaman modal dengan indikator Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru menunjang Meningkatnya jumlah investasi
				PROGRAM PROMOSI	Jumlah Nomor Induk Berusaha (NIB) baru	365,70	Menunjang	Program promosi penanaman modal dengan indikator Jumlah



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENANAMAN MODAL				Nomor Induk Berusaha (NIB) baru menunjang Meningkatnya jumlah investasi
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP	104,21	Menunjang	Program pelayanan penanaman modal dengan indikator Persentase penerbitan izin usaha dan izin teknis yang sesuai dengan SOP menunjang Meningkatkan jumlah investasi
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan penanaman modal	105,26	Menunjang	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal dengan indikator Tingkat ketaatan investor terhadap ketentuan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								penanaman modal menunjang Meningkatnya jumlah investasi
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal	101,04	Menunjang	Program pengelolaan data dan system informasi penanaman modal dengan indikator Cakupan pelayanan izin yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Penanaman Modal menunjang Meningkatnya jumlah investasi
3.4	Meningkatnya kinerja BUMD	Persentase BUMD Kondisi Sehat	149,99	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD	100,00	Menunjang	Program perekonomian dan pembangunan dengan indikator Persentase kebijakan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								bidang perekonomian tahunan yang selaras dengan RPJMD menunjang Meningkatnya kinerja BUMD
3.5	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai	Indeks infrastruktur	99,33	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik	97,91	Menunjang	Program penyelenggaraan jalan dengan indikator Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase	99,30	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik			sistem drainase dengan indikator Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Infrastruktur Lingkungan Yang Memadai	105,48	Menunjang	Program penataan bangunan dan lingkungan dengan indikator Persentase Penataan Infrastruktur Lingkungan Yang Memadai menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	105,84	Menunjang	Program pengembangan jasa konstruksi dengan indikator Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	88,84	Menunjang	Program penataan bangunan Gedung dengan indikator Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik	100,18	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan indikator Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih Yang Memadai	100,00	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem dengan indikator Persentase Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih Yang Memadai menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Kediri	72,74	Menunjang	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional dengan indikator Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Kediri menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang irigasi/Sungai kewenangan kota yang berfungsi baik	98,53	Menunjang	Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan indikator Persentase panjang irigasi/Sungai kewenangan kota yang berfungsi baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.6	Meningkatnya daya tarik wisata	Jumlah kunjungan wisata	100,52	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DISTINASI WISATA	Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik	100,00	Menunjang	Program peningkatan daya Tarik destinasi wisata dengan indikator Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik menunjang Meningkatnya daya tarik wisata
<b>4.</b>	<b>Meningkatnya pemerataan pembangunan daerah serta percepatan penurunan tingkat kemiskinan</b>							
4.1	Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	105,53	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang tertangani	83,00	Menunjang	Program perlindungan dan jaminan sosial dengan indikator Persentase PMKS yang tertangani menunjang Menurunnya tingkat



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kemiskinan dan pengangguran terbuka
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif	84,00	Menunjang	Program pemberdayaan sosial dengan indikator Persentase PSKS yang aktif menunjang Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
		Tingkat Pengangguran Terbuka	103,58	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun	100,00	Menunjang	Program perencanaan tenaga kerja dengan indikator Persentase dokumen perencanaan tenaga kerja yang disusun menunjang Menurunnya tingkat



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kemiskinan dan pengangguran terbuka
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terlatih yang mendapatkan sertifikat	100,00	Menunjang	Program pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja dengan indikator Persentase angkatan kerja yang terlatih yang mendapatkan sertifikat menunjang Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja	100,00	Menunjang	Program penempatan tenaga kerja dengan indikator Persentase angkatan kerja yang terfasilitasi informasi kerja menunjang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak	93,18	Menunjang	Program hubungan industrial dengan indikator Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak menunjang Menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka
<b>5.</b>	<b>Terwujudnya masyarakat yang rukun dan toleran</b>							
5.1	Meningkatnya ketentraman	Indeks Ketentraman dan ketertiban	98,89	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN	Persentase Penegakan Perda	113,64	Menunjang	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	dan ketertiban masyarakat			DAN KETERTIBAN UMUM				indikator Persentase Penegakan Perda menunjang Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran	113,15	Menunjang	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								ketentraman dan ketertiban masyarakat
<b>6.</b>	<b>Terwujudnya kota yang nyaman, indah dan ramah lingkungan</b>							
6.1	Meningkatnya ketaatan penyelenggaraa n penataan ruang	Persentase luas lahan yang peruntukannya sesuai RTRW	102,35	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang	101,25	Menunjang	Program penyelenggaraan penataan ruang dengan indikator Persentase Kesesuaian Pembangunan Dengan Penataan Ruang menunjang Meningkatnya ketaatan penyelenggaraan penataan ruang



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.2	Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan	Persentase permukiman layak huni	100,64	PROGRAM KAWASAN PEMUKIMAN	Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh	100,00	Menunjang	Program Kawasan Permukiman dengan indikator Prosentase Penurunan Kawasan Kumuh menunjang Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase ketersediaan area perumahan	100,00	Menunjang	Program pengembangan perumahan dengan indikator Persentase ketersediaan area perumahan menunjang Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) UMUM	Persentase ketersediaan area perumahan	100,00	Menunjang	Program pengembangan perumahan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) umum dengan indikator Persentase ketersediaan area perumahan menunjang Meningkatnya kenyamanan hunian perkotaan
				PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pertanahan	100,00	Menunjang	Program penatagunaan tanah dengan indikator Persentase ketersediaan dokumen data/informasi pertanahan menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kenyamanan hunian perkotaan
		Indeks Infrastruktur	99,32	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik	97,91	Menunjang	Program penyelenggaraan jalan dengan indikator Persentase Kualitas Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Pengelolaan Sistem Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik	99,30	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase dengan indikator Persentase Pengelolaan Sistem



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				SISTEM DRAINASE				Drainase Kewenangan Kota Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Infrastruktur Lingkungan Yang Memadai	105,48	Menunjang	Program penataan bangunan dan lingkungan dengan indikator Persentase Penataan Infrastruktur Lingkungan Yang Memadai menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi	105,84	Menunjang	Program pengembangan jasa konstruksi dengan indikator Persentase Penyediaan Tenaga Terampil Jasa Konstruksi menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik	88,84	Menunjang	Program penataan bangunan Gedung dengan indikator Persentase Tata Kelola Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik	100,18	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah dengan indikator Persentase Sarana Sanitasi / Pengelolaan Limbah Yang Berfungsi Dengan Baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN	Persentase Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih Yang Memadai	100,00	Menunjang	Program pengelolaan dan pengembangan sistem dengan indikator



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				Persentase Sarana Prasarana Penyediaan Air Bersih Yang Memadai menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Kediri	72,74	Menunjang	Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional dengan indikator Persentase Peningkatan Sistem Pengelolaan Persampahan Di Kota Kediri menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase panjang irigasi/Sungai kewenangan kota yang berfungsi baik	98,53	Menunjang	Program pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan indikator Persentase panjang irigasi/Sungai kewenangan kota yang berfungsi baik menunjang Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai
				PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK	Persentase potensi objek wisata yang berfungsi dengan baik	100,00	Menunjang	Program peningkatan daya Tarik destinasi wisata dengan indikator Persentase potensi objek



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				DISTINASI WISATA				wisata yang berfungsi dengan baik menunjang Meningkatnya daya tarik wisata
6.3	Meningkatnya efektivitas pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan bencana	Indeks Ketahanan Daerah	64,10	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	100,00	Menunjang	Rendahnya keberlanjutan kegiatan yang dilaksanakan dan pelaksanaan kegiatan yang tidak berpedoman pada skala prioritas yang juga menunjang pada pelayanan wajib SPM
6.4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	100,74	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan yang tersusun	100,00		Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan indikator Persentase Dokumen Perencanaan lingkungan



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								yang tersusun menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Udara dan Air	67,09		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Udara dan Air menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN	Persentase Penanganan Izin Lingkungan	67,09		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan indikator Persentase Penanganan Izin Lingkungan menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
		Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per Satuan Luas Wilayah	98,50	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah	17,04	Menunjang	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) per satuan luas wilayah menunjang Meningkatnya



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
					Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara	100,00	Menunjang	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) dengan indikator Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) terpelihara menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN	Persentase objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	100,00		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan indikator Persentase



No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				HIDUP UNTUK MASYARAKAT				objek pendidikan dan pemerintahan yang menjaga Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menunjang Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan luasan RTH

Sumber :Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024

## 2.4 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	313.480.900,00	60.235.886,00	19,22
2.	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	56.690.163.720,00	40.897.088.585,00	72,14
3.	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	1.594.475.000,00	1.525.227.246,00	95,66
4.	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	4.230.397.250,00	3.948.261.554,00	93,33
5.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	3.661.191.320,00	3.459.437.237,00	94,49
6.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.608.821.500,00	2.170.308.315,00	83,19
7.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	533.150.000,00	494.281.206,00	92,71
8.	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	9.936.477.000,00	9.324.663.406,00	93,84
9.	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	418.500.000,00	417.568.131,00	99,78
10.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	504.552.200,00	490.026.501,00	97,12
11.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	927.080.000,00	912.593.600,00	98,44
12.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.655.088.062,00	2.447.850.600,00	92,19



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.292.148.000,00	1.210.291.313,00	93,67
14.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	160.000.000,00	6.506.000,00	4,07
15.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.165.524.100,00	457.455.948,00	39,25
16.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	47.013.996.001,00	27.907.088.091,00	59,36
17.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	642.701.700,00	611.986.627,00	95,22
18.	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	25.790.915.800,00	25.099.008.675,00	97,32
19.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	22.746.393.823,00	21.558.658.525,00	94,78
20.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	169.966.400,00	150.733.704,00	88,68



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.594.266.000,00	2.292.182.967,00	88,36
22.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	367.481.300,00	363.770.391,00	98,99
23.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	85.025.000,00	83.833.000,00	98,60
24.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	122.102.114.129,00	99.983.082.291,00	81,88
25.	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	22.199.110.825,00	20.988.405.508,00	94,55
26.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	543.000.000,00	527.533.860,00	97,15
27.	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	26.217.000,00	25.893.610,00	98,77
28.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.075.979.300,00	1.056.180.195,00	98,16
29.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	29.020.343.760,00	21.983.128.487,00	75,75
30.	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	69.336.000,00	52.594.874,00	75,86
31.	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	176.591.322,00	163.510.962,00	92,59
32.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	3.662.821.260,00	3.024.970.000,00	82,59
33.	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	798.669.177,00	763.753.614,00	95,63



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34.	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.436.750.000,00	1.415.012.185,00	98,49
35.	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	355.095.000,00	273.594.437,00	77,05
36.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	2.380.416.120,00	2.192.457.066,00	92,10
37.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	324.701.000,00	192.559.664,00	59,30
38.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.697.103.150,00	1.569.339.070,00	92,47
39.	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	221.232.700,00	166.709.858,00	75,35
40.	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.102.500,00	30.279.325,00	75,50
41.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	4.340.719.187,00	3.990.354.835,00	91,93
42.	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	74.522.500,00	71.966.083,00	96,57
43.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.162.973.400,00	1.030.177.869,00	88,58
44.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	16.874.622.500,00	14.407.287.000,00	85,38
45.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	31.829.700.000,00	11.728.214.429,00	36,85



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
46.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.390.000.000,00	1.048.193.500,00	75,41
47.	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	220.000.000,00	216.868.858,00	98,58
48.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	184.267.900,00	174.676.403,00	94,79
49.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.048.288.228,00	3.880.070.012,00	95,84
50.	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	9.477.797.829,00	9.440.055.998,00	99,60
51.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	9.225.997.152,00	7.621.843.628,00	82,61
52.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.316.217.654,00	5.051.584.906,00	95,02
53.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	121.429.834.525,00	65.031.857.786,00	53,56
54.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	380.727.650,00	367.510.150,00	96,53
55.	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	815.224.800,00	713.786.743,00	87,56
56.	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	22.152.872.693,00	18.078.642.232,00	81,61
57.	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	42.910.000,00	40.838.018,00	95,17



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
58.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	27.184.800,00	27.184.800,00	100,00
59.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	987.605.020,00	916.377.718,00	92,79
60.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	15.666.697.000,00	14.373.284.777,00	91,74
61.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	46.895.950,00	46.800.000,00	99,80
62.	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	33.716.680,00	31.965.118,00	94,81
63.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	687.700.000,00	633.067.249,00	92,06
64.	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	47.042.692,00	46.807.300,00	99,50
65.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	300.000.000,00	148.203.800,00	49,40
66.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	12.092.796.000,00	11.418.312.509,00	94,42
67.	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.727.312.220,00	1.631.990.975,00	94,48
68.	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	5.087.946.760,00	4.930.525.204,00	96,91



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
69.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	473.520.000,00	338.392.725,00	71,46
70.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	200.000.000,00	149.983.000,00	74,99
71.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	112.640.000,00	89.938.431,00	79,85
72.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	149.549.500,00	149.530.420,00	99,99
73.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	78.552.200,00	71.864.918,00	91,49
74.	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	26.400.000,00	26.399.900,00	100,00
75.	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	-	-	-
76.	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	66.805.500,00	64.532.610,00	96,60
77.	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	766.053.850,00	667.248.881,00	87,10
78.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	982.928.900,00	968.838.836,00	98,57



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.928.800.000,00	1.862.825.600,00	96,58
80.	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	383.150.000,00	362.072.429,00	94,50
81.	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	374.220.050,00	372.029.535,00	99,41
82.	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	719.956.620,00	688.958.594,00	95,69
83.	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	177.784.000,00	160.673.462,00	90,38
84.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	345.447.800,00	310.096.052,00	89,77
85.	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	106.029.390,00	102.321.652,00	96,50
86.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.123.737.600,00	5.936.587.777,00	83,34
87.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	9.432.029.400,00	7.249.949.920,00	76,87



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
88.	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	714.477.560,00	603.254.624,00	84,43
89.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	25.000.000,00	23.815.250,00	95,26
90.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	138.200.000,00	138.054.540,00	99,89
91.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	31.435.582.270,00	31.278.500.947,00	99,50
92.	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.361.709.200,00	4.402.654.755,00	69,21
93.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	465.940.000,00	383.541.529,00	82,32
94.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.089.721.993.464,00	692.964.921.361,00	63,59



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
95.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	509.670.000,00	488.155.181,00	95,78
96.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	669.347.000,00	667.448.930,00	99,72
97.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	18.672.462.500,00	14.134.693.727,00	75,70
98.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	18.921.031.102,00	18.173.529.844,00	96,05
99.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	596.721.700,00	574.982.762,00	96,36
100.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	723.281.500,00	616.405.160,00	85,22
101.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.409.100.300,00	1.164.523.013,00	82,64
102.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	891.275.555,00	869.881.500,00	97,60
103.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	134.265.000,00	129.904.387,00	96,75
104.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.951.778.904,00	1.875.745.530,00	96,10
105.	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	108.925.050,00	106.585.000,00	97,85



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
106.	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.177.966.300,00	2.057.205.520,00	94,46
107.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	29.445.994.570,00	16.039.758.496,00	54,47
108.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	309.962.500,00	309.036.754,00	99,70
109.	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	27.775.600,00	23.707.718,00	85,35
110.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.658.560.000,00	2.291.122.620,00	86,18
111.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	16.449.220.000,00	14.431.552.601,00	87,73
112.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	20.046.000,00	18.677.898,00	93,18
113.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	631.256.000,00	628.278.500,00	99,53
114.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	380.919.000,00	356.667.603,00	93,63
115.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.196.410.000,00	1.157.554.327,00	96,75
116.	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	171.128.076,00	171.021.970,00	99,94
117.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.451.025.000,00	1.396.547.118,00	96,25
118.	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	935.996.293,00	736.923.480,00	78,73



No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
119.	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	347.000.000,00	316.893.666,00	91,32
120.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	388.750.000,00	370.149.824,00	95,22

Sumber : Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024



### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan Tugas Pembantuan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat ke pemerintah provinsi, lalu dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten, serta dari pemerintah kota/kabupaten ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

.Asas desentralisasi merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pemerintah pusat kemudian menjadi milik pemerintah daerah. Sedangkan dalam asas dekonsentrasi, terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah.

Pada asas Tugas Pembantuan, terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Terkait dengan urusan pemerintahan, urusan yang ditugaskan pembantuannya adalah urusan konkuren, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Adapun tujuan asas Tugas pembantuan ini adalah untuk lebih mempercepat pencapaian Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah serta untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum baik dilingkup daerah maupun secara agregat di tingkat nasional, karena rentang kendalinya lebih pendek. Secara pendanaan, Tugas Pembantuan dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dimana Tugas Pembantuan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Pusat, namun jika pemberi penugasan adalah Pemerintah Daerah Provinsi maka pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD Provinsi).

Pola tanggung jawab dalam Tugas pembantuan ini pada dasarnya adalah penerima tugas pembantuan wajib bertanggung jawab kepada pemberi penugasan Namun



Jika tugas pembantuan itu berasal dari Pemerintah kepada Bupati/Walikota, maka selain Bupati/Walikota harus bertanggung jawab kepada pemerintah pusat melalui Kementerian/Lembaga, mereka juga diwajibkan melaporkan kepada Gubernur sebagai perwakilan Pemerintah Pusat di daerah.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.

Tugas pembantuan dapat menjadi terminal ke arah “penyerahan penuh” suatu urusan pada daerah atau tugas pembantuan ialah langkah awal sebagai persiapan ke arah penyerahan penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, seharusnya bertolak dari :

1. Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi, pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan tugas pembantuan adalah tanggung jawab daerah yang bersangkutan.
2. Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung unsur otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan tugas pembantuan.
3. Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang mengandung unsur penyerahan, bukan penugasan. Yang dapat dibedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah penyerahan penuh, maka tugas pembantuan adalah penyerahan tidak penuh.
4. Penyerahan wewenang pemerintahan, pelimpahan wewenang pemerintahan, dan penugasan dari Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan juga harus diikuti dengan pengaturan pendanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara efisien dan efektif.



Pemerintah Kota Kediri sejak tahun 2017 **tidak memperoleh alokasi dana untuk penyelenggaraan tugas pembantuan dari pemerintah pusat** karena sudah dialihkan ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima dari pemerintah pusat sebagai berikut.

Dasar hukum pelaksanaan, sebagai berikut:

- a. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
- b. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
- c. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 29);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 117 tahun 2017 tentang tata cara pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

#### **Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Non fisik tahun 2024 yang diterima oleh Pemerintah Kota Kediri diberikan oleh kementerian dan lembaga yang berkedudukan di pusat. Kementerian dan lembaga pemberi Dana Alokasi Khusus dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Instansi Pemberi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jenisnya

No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	DAK Fisik Bidang Pendidikan <ul style="list-style-type: none"><li>- Subbidang PAUD</li><li>- Subbidang SD</li><li>- Subbidang SMP</li></ul>
		DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Satuan Pendidikan(BOSP) <ul style="list-style-type: none"><li>- Subbidang Batuan Operasional Sekolah</li></ul>



No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
		- Subbidang Batuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - Subbidang Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		DAK Non Fisik Bidang Tunjangan Guru ASN Daerah - Subbidang Tunjangan Guru ASN Daerah - Subbidang Tunjangan Profesi Guru - Subbidang Tambahan Penghasilan Guru
2	Kementerian Kesehatan	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
		DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Dinas Kab/Kota - Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
3	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Subbidang Keluarga Berencana
		DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4	Kementerian PUPR	DAK Fisik Bidang Air Minum Subbidang Air Minum
		DAK Fisik Bidang Sanitasi Subbidang Sanitasi
6	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DAK Non Fisik Bidang Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya Subbidang Museum
7	Badan Koordinasi Penanaman Modal	DAK Non Fisik Bidang Dana Fasilitas Penanaman Modal

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri

### Perangkat Daerah Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK)



Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non fisik Tahun 2024 yang diberikan dari kementerian dan Lembaga pusat dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Kediri. Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Kediri yang melaksanakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Perangkat Daerah Pelaksana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Jenisnya

No.	Instansi Pemberi Dana Alokasi Fisik	Jenis Dana Alokasi Khusus (DAK)
1	Dinas Pendidikan	DAK Fisik Subbidang PAUD
		DAK Fisik Subbidang SD
		DAK Fisik Subbidang SMP
		DAK Non Fisik Batuan Operasional Sekolah
		DAK Non Fisik Batuan Operasional Penyelenggaraan PAUD
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
		DAK Non Fisik Tunjangan Guru ASN Daerah
2	Dinas Kesehatan	DAK Fisik subbidang Penguatan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting
		DAK Fisik subbidang Pengendalian Penyakit
		DAK Fisik subbidang Penguatan Sistem Kesehatan
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DAK Fisik Keluarga Berencana
		DAK Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DAK Fisik Bidang Air Minum
		DAK Fisik Bidang Sanitasi
5	Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Tenaga Kerja	DAK Non Fisik Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM
6	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	DAK Non Fisik Bantuan Operasional Museum dan Taman Budaya
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DAK Non Fisik Dana Fasilitas Penanaman Modal

Sumber : BAPPEDA Kota Kediri



### Sub Bidang dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya

Dana Alokasi Khusus selanjutnya dituangkan dalam bentuk Sub Bidang dan kegiatan serta keluaran yang telah disepakati oleh kementerian dan lembaga dengan Perangkat Daerah Pelaksana. Sub Bidang dan kegiatan serta keluaran (output) tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.3  
Sub Bidang, Kegiatan dan Keluaran

No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
<b>DAK FISIK</b>				
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Revitalisasi PAUD	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: TK Dharma Wanita Campurejo Rehabilitasi toilet (jamban) beserta sanitasinya: TK Dharma Wanita Campurejo, TK Dharma Wanita Burengan Rehabilitasi ruang guru dan atau kepala sekolah beserta perabotnya: TK Dharma Wanita Burengan Pembangunan area bermain beserta APE luar ruang: TK Kemala Bhayangkari 42, TK Aisyiyah Bustanul Athfal VII, TK Al- Huda, TK Darut Taqwa, TK TPP Pawyatan Daha, TK Dharma Wanita Balowerti, TK Mardi Putra, TK Dharma Wanita Campurejo, TK Darma Wanita Tamanan, TK Dharma Wanita Bandar



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Kidul, TK Kusuma Mulya V, TK Al Mahrusiyah, TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI, TK PG Pesantren, TK Dharma Wanita Burengan, TK Dharma Wanita Kleco
				Pembangunan Ruang Guru dan atau Kepala Sekolah beserta perabotnya: TK Dharma Wanita Rejomulyo, TK Dharma Wanita Ngronggo III, TK Kemala Bhayangkari 42, TK Darut Taqwa, TK Dharma Wanita Balowerti, TK Mardi Putra, TK Darma Wanita Tamanan, TK Dharma Wanita Bandar Kidul, TK Kusuma Mulya V, TK Melati Dharma Wanita Mojoroto, TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI, TK Dharma Wanita Ngampel, TK Dharma Wanita Betet, TK Dharma Wanita Tosaren I, TK Dharma Wanita Ngletih, TK Dharma Wanita Bangsal, TK Baptis Setia Bakti I, TK Dharma Wanita Pakunden II, TK Kusuma Mulya III
				Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya: TK Dharma Wanita Ngronggo III, TK Melati Dharma Wanita Mojoroto, TK Dharma Wanita Ngampel, TK Dharma Wanita Betet, TK Dharma Wanita Tosaren I, TK Dharma Wanita Bangsal, TK Dharma Wanita Pakunden II
				Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya: TK Dharma Wanita Ngronggo III, TK Dharma Wanita Balowerti, TK Mardi Putra, TK Dharma Wanita Campurejo, TK Dharma Wanita Banjarmlati, TK Dharma Wanita Bandar Kidul, TK Kusuma Mulya V, TK Melati Dharma Wanita Mojoroto, TK Dharma Wanita



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Ngampel, TK Dharma Wanita Betet, TK Dharma Wanita Tosaren I, TK Dharma Wanita Ngletih, TK Dharma Wanita Bangsal, TK Baptis Setia Bakti I
				Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan alat pembelajaran: TK Dharma Wanita Rejomulyo, TK Dharma Wanita Ngronggo III, TK Kemala Bhayangkari 42, TK Aisyiyah Bustanul Athfal VII, TK Al-Huda, TK Darut Taqwa, TK TPP Pawyatan Daha, TK Dharma Wanita Dandangan, TK Dharma Wanita Balowerti, TK Mardi Putra, TK Negeri Pembina Kota Kediri, TK Dharma Wanita Campurejo, TK Darma Wanita Tamanan, TK Dharma Wanita Banjarmhati, TK Dharma Wanita Bandar Kidul, TK Kusuma Mulya V, TK Al Mahrusiyah, TK Melati Dharma Wanita Mojoroto, TK Aisyiyah Bustanul Athfal VI, TK Dharma Wanita Ngampel, TK Dharma Wanita Betet, TK Dharma Wanita Tosaren I, TK Dharma Wanita Ngletih, TK PG Pesantren Baru, TK Dharma Wanita Bangsal, TK Dharma Wanita Burengan, TK Baptis Setia Bakti I, TK Dharma Wanita Pakunden II, TK Dharma Wanita Kleco, TK Kusuma Mulya III
	Dinas Pendidikan	Sekolah Dasar	Revitalisasi SD	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Setonopande 1, SD Negeri



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Tempurejo 2, SD Negeri Pesantren 2, SD Negeri Balowerti 2, SD Negeri Banjaran 2, SD Negeri Mojoroto 4, SD Negeri Ngronggo 5
				Rehabilitasi toilet (jamban) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta sanitasinya: SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Setonopande 1, SD Negeri Ngadirejo 3, SD Negeri Tempurejo 2, SD Negeri Ngronggo, SD Negeri Balowerti 2, SD Negeri Mojoroto 4
				Rehabilitasi ruang perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Ngadirejo 3, SD Negeri Ketami 1, SD Negeri Banjarmlati 2
				Rehabilitasi ruang guru dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Setonopande 1, SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Ngronggo 8, SD Negeri Ngronggo 5, SD Negeri Ngadirejo 3, SD Negeri Balowerti 2
				Rehabilitasi ruang UKS dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Balowerti 2
				Rehabilitasi ruang laboratorium komputer dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Banjaran 1, SD Negeri Ngronggo 5



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SD Negeri Setonopande 1, SD Negeri Ngadirejo 3, SD Negeri Balowerti 2, SD Negeri Mojoroto 4, SD Negeri Ngronggo 5
				Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya: SD Negeri Tempurejo 2
				Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya: SD Negeri Jamsaren 1, SD Negeri Ngronggo 5, SD Negeri Ngronggo 3
				Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya: SD Negeri Bangsal 1, SD Negeri Singonegaran 1
				Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya: SD Negeri Tempurejo 2, SD Negeri Ngadirejo 3, SD Negeri Pesantren 2, SD Negeri Balowerti 2, SD Negeri Jamsaren 1, SD Negeri Ketami 1, SD Negeri Mojoroto 4, SD Negeri Banjarmlati 2
				Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK): SD Negeri Jamsaren 1, SD Negeri Ketami 1, SD Negeri Mrican 2, SD Negeri Manisrenggo



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
	Dinas Pendidikan	Sekolah Menengah Pertama	Revitalisasi SMP	Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SMP Negeri 5 Kediri
				Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SMP Negeri 5 Kediri
				Rehabilitasi ruang Kepala Sekolah/Pimpinan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SMP Negeri 8 Kediri
				Rehabilitasi ruang tata usaha dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya: SMP Negeri 8 Kediri
				Pembangunan ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya: SMP Negeri 6 Kediri
				Pembangunan ruang laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) beserta perabotnya: SMP Negeri 4 Kediri
				Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya: SMP Negeri 8 Kediri
				Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya: SMP Negeri 5 Kediri
				Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya: SMP Negeri 9 Kota Kediri, SMP PGRI 1 Kediri



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya: SMP Negeri 9 Kota Kediri
				Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA): SMP Negeri 9 Kota Kediri, SMP Negeri 5 Kediri, SMP Negeri 8 Kediri, SMP PGRI 1 Kediri, SMP Arrisalah Kediri
				Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK): SMP Negeri 9 Kota Kediri
2	Dinas Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	Prasarana: Puskesmas Kota Wilayah Utara
				Peralatan Puskesmas Pembantu: Blabak, Bawang, Betet, Banaran, Ketami, Burengan
			Penguatan Layanan Rujukan	Alat Kesehatan: RS Umum Daerah Gambiran
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	Prasarana: Pesantren Kendaraan Distribusi: Pesantren
3	DP3AP2KB	Keluarga Berencana	Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB	Rehab/Kelengkapan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi: Gudang Alokon Kota Kediri
				Rehab/Kelengkapan Balai Penyuluhan KB: Mojoroto, Kota Kediri, Pesantren



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
4	DPUPR	Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Percepatan Penurunan Stunting	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah: Dandangan dan Pesantren
		Sanitasi	Pengembangan dan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) – Percepatan Penurunan Stunting	Pembangunan IPAL Skala Permukiman minimal 50 KK: Ngronggo
			Pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) – Percepatan Penurunan Stunting	Pembangunan Tangki Septik Komunal (5-10 KK): Jagalan, Betet, Pesantren
				Pembangunan Tangki Septik Individu Perkotaan minimal 50 KK: Tamanan, Mrican, Jagalan, Pesantren, Bangsal
Pembangunan Tangki Septik Individu Perdesaan minimal 50 KK: Tamanan, Mrican, Pesantren, Bangsal				
			Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi IPLT: Mojoroto	
<b>DAK NON FISIK</b>				



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP)	Bantuan Operasional Sekolah	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar, Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	Pengelolaan Dana BOP PAUD
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
		Tunjangan Guru ASN Daerah	Tunjangan Profesi Guru	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Guru ASN
			Tambahan Penghasilan Guru	Penyediaan Tambahan Penghasilan Guru ASN
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	BOK Dinas Kab/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), Pelaksanaan Akreditasi



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
				Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota, Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya
			BOK Pengawasan Obat dan Makanan	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
			BOK Puskesmas	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat, Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular, Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga, Operasional Pelayanan Puskesmas, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut, Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
3	DP3AP2KB	Bantuan Operasional	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja, Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
		Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Koordinasi Desa (Rakordes) dan Miniloka karya (Minilok), Pengendalian Program KKBPK, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana,
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB, Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga, Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB, Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kb ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya, Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya,
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
4	DISBUDPAR PORA	Kebudayaan (Museum Airlangga)	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Kajian Koleksi Museum, Seminar Kajian Koleksi Museum, Kajian Story Line, Registrasi, Reventarisasi Koleksi, Bahan Konservasi, Pemeliharaan Tata Pamer.
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Publikasi Museum melalui Media Cetak dan/atau Elektronik, Pameran Museum, Lomba Tari, Lomba Mewarnai Topeng, Belajar Bersama di Museum
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang tersedia dan terpelihara Sebanyak 1 Kegiatan
6	DPMPTSP	Dana Fasilitas Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Perusahaan yang di lakukan Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 3 Perusahaan
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal sebanyak 75 Pelaku Usaha



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	Keluaran (Output)
			Pengawasan Penanaman Modal	Perusahaan yang dilakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal sebanyak 30 Perusahaan

### Sumber dan Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran Dana Alokasi Khusus melalui Pembahasan usulan oleh kementerian dan lembaga dengan Perangkat Daerah Pelaksana Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik telah ditentukan pada tahun anggaran 2024. Berikut adalah jumlah anggaran dan realisasi pada tahun anggaran 2024.

Tabel 3.4  
Sumber dan Jumlah Anggaran serta Realisasi TA 2024

No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
<b>DAK FISIK</b>						
1	Dinas Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	Revitalisasi PAUD	927.628.000	927.628.000	100%
		Sekolah Dasar	Revitalisasi SD	1.385.569.499	1.385.569.499	100%
		Sekolah Menengah Pertama	Revitalisasi SMP	2.779.818.087	2.779.818.087	100%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
2	Dinas Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan	Penguatan Layanan Primer	800.000.000	800.000.000	100%
			Penguatan Layanan Rujukan	1.280.000.000	1.280.000.000	100%
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota	385.558.000	385.558.000	100%
3	DP3AP2KB	Keluarga Berencana	Menu Sarana Prasarana Pelayanan KB	786.127.000	786.127.000	100%
4	DPUPR	Air Minum	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan - Percepatan Penurunan Stunting	758.955.500	758.955.500	100%
		Sanitasi	Pembangunan Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) - Percepatan Penurunan Stunting	9.566.679.300	9,387,181,600	98,12%
<b>DAK NON FISIK</b>						
1	Dinas Pendidikan	Bantuan Operasional Satuan	Bantuan Operasional Sekolah	48,813,200,000	46,556,563,431	95%
			Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD			



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
		Pendidikan (BOSP)	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan			
		Tunjangan Guru ASN Daerah	Tunjangan profesi guru Tambahkan penghasilan guru	46,426,450,000	45,364,591,000	98%
2	Dinas Kesehatan	Bantuan Operasional Kesehatan	BOK Dinas Kab/Kota	6,992,547,000	4,973,930,558	71%
			BOK Pengawasan Obat Dan Makanan			
			BOK Puskesmas	5.994.280.000	5,271,860,815	88%
3	DP3AP2KB	Bantuan Operasional KB	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	638,800,000	550,890,097	86%
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	147,000,000	145,007,800	99%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kab/kota dalam pelaksanaan pelayanan	256,750,000	154,139,800	60%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
			dan pembinaan kesertaan ber-KB			
			Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kab/kota	152,400,000	124,519,600	82%
			Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kab/kota	600,136,000	527,817,270	88%
			Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	1,701,900,000	1,657,076,800	97%
4	DISBUDPARPORA	Kebudayaan (Museum Airlangga)	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	210.000.000	158,302,491	75%
			Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	350.000.000	346,802,455	99%



No.	Pelaksana	Sub Bidang	Kegiatan	PAGU Kontraktual	Realisasi	
					(Rp)	%
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	140.000.000	128,547,812	92%
5	DPMPTSP	Dana Fasilitas Penanaman Modal	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	597,785,000	502,135,150	84%
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha			
			Pengawasan Penanaman Modal			



## BAB IV

### PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### 4.1 Urusan Pendidikan

##### 4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut :

- Pendidikan anak usia dini
- Pendidikan Dasar
- Pendidikan kesetaraan

##### 4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	Setiap tahun
2.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	Setiap tahun
3.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100	Setiap tahun

##### 4.1.3 Realisasi

Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Capaian Indikator SPM
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100 %	99.31 %
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100 %	100 %



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Tahun 2024	Capaian Indikator SPM
3.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %	100 %

Perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					<b>99.77%</b>
<b>1.</b>	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>					<b>99.31%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>79.90%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	8514	8503	11	<b>99.87%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>19.41%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>97.04%</b>
	1. Angka partisipasi sekolah	%	100	99.87	0.13	<b>99.87%</b>
	2. Angka partisipasi murni	%	100	99.87	0.13	<b>99.87%</b>
	3. Peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	100	84.23	15.77	<b>84.23%</b>



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	4. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV)	%	100	89.43	10.57	89.43%
	5. Rasio pegawai sekolah untuk PAUD	%	1.66	1.66	0	100.00%
	6. Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00%
	7. Indeks distribusi guru	%	0.28	0.28	0	100.00%
	8. Proporsi PTK bersertifikat	%	58.06	58.06	0	100.00%
	9. Proporsi PTK penggerak*	%	6.62	6.62	0	100.00%
<b>2 .</b>	<b>Pendidikan Dasar</b>					<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	28086	28893	-807	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>100.00%</b>
	<b>SD</b>					<b>100.00%</b>
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	107.75	-7.75	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	102.87	-2.87	100.00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	86.96	86.96	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	75.1	75.1	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3.95	3.95	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.67	1.67	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	74.28	74.28	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.04	75.04	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	56.6	56.6	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	31.48	31.48	0	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
	11. Indeks distribusi guru	%	0.38	0.38	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	40.82	40.82	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	3.6	3.6	0	100.00%
	<b>SMP</b>					100.00%
	1. Angka partisipasi kasar	%	100	129.45	-29.45	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	100	114.39	-14.39	100.00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	89.29	89.29	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	84.26	84.26	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	3.45	3.45	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	1.73	1.73	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	71.65	71.65	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	75.82	75.82	0	100.00%
	9. Indeks iklim inklusivitas	Nilai	60.32	60.32	0	100.00%
	10. Kecukupan formasi guru ASN	%	22.21	22.21	0	100.00%
	11. Indeks distribusi guru	%	0.28	0.28	0	100.00%
	12. Proporsi PTK bersertifikat	%	51.91	51.91	0	100.00%
	13. Proporsi PTK penggerak*	%	1.88	1.88	0	100.00%
3.	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	1047	1047	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>100.00%</b>
	1. Angka partisipasi kasar	%	4.23	4.23	0	100.00%
	2. Angka partisipasi sekolah	%	1.8	1.8	0	100.00%
	3. Kemampuan literasi	Nilai	78.48	78.48	0	100.00%
	4. Kemampuan numerasi	Nilai	60.76	60.76	0	100.00%
	5. Perbedaan skor literasi	Nilai	6.05	6.05	0	100.00%
	6. Perbedaan skor numerasi	Nilai	5.05	5.05	0	100.00%
	7. Indeks iklim keamanan	Nilai	67.07	67.07	0	100.00%
	8. Indeks iklim kebhinekaan	Nilai	62.41	62.41	0	100.00%



No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian
9.	Indeks iklim inklusivitas	Nilai	54.77	54.77	0	100.00%
10.	Kecukupan formasi guru ASN	%	0	0	0	100.00%
11.	Indeks distribusi guru	%	0	0	0	100.00%
12.	Proporsi PTK bersertifikat	%	0	0	0	100.00%
13.	Proporsi PTK penggerak*	%	0	0	0	100.00%

Sumber : e-SPM Kemendagri

Dari table data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1 Indikator pendidikan dasar usia dini

Terdapat mutu layanan yang belum tercapai yaitu angka partisipasi sekolah dengan nilai capaian 99,87%, angka partisipasi murni dengan nilai capaian 99,87, peningkatan proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B dengan nilai capaian 84,23% dan proporsi guru PAUD dengan kualifikasi Sarjana (S1)/Diploma empat (D-IV) dengan nilai capaian 89,43%. Dilihat dari nilai capaian yang ada jumlah mutu yang harus dipenuhi belum sesuai dengan target yang seharusnya 100%

2 Indikator pendidikan dasar

Semua mutu layanan yang harus dipenuhi sudah sesuai target yaitu 100%. Untuk capaian pada layanan dasar ini penerima layanan melebihi target yang ditetapkan yaitu 28.893 orang dari target 28.086 yang ditetapkan, yang berarti penerima layanan bertambah 807 orang

3 Indikator pendidikan Kesetaraan

Semua mutu layanan yang harus dipenuhi sudah sesuai target yaitu 100%. Dengan target 1.047 orang dan penerima layanan sebanyak 1.047 orang

**4.1.4 Alokasi Anggaran**

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan pada Tahun 2024 sebesar **Rp 106,460,200,321** dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	328,978,314,376



NO	PENDANAAN	PAGU
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	106,460,200,321
	<b>APBD</b>	106,460,200,321
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	59,883,878,991
	C. APBD DAK FISIK	5,736,049,000
	D. APBD DAK NON FISIK	40,840,272,330
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

Sumber : e-SPM Kemendagri

#### 4.1.5 Dukungan Personil

URAIAN	PNS	NON PNS	JUMLAH
JUMLAH GURU PAUD	90	1.077	1.167
JUMLAH GURU SD	917	764	1.681
JUMLAH GURU SMP	400	470	870
JUMLAH GURU PENDIDIKAN KESETARAAN	8	152	160

#### 4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Pembangunan bidang urusan pendidikan di Kota Kediri secara umum mengalami perkembangan kearah yang lebih baik. Hal tersebut ditandai dengan meningkatnya pencapaian Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar, serta pencapaian Rata-rata Lama Sekolah setiap tahunnya



mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan. Namun demikian, dalam penyelenggaraannya dengan perubahan yang sangat pesat di bidang pendidikan mengakibatkan adanya permasalahan yang harus dicarikan alternatif pemecahannya. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan adalah sebagai berikut:

### **Permasalahan dan Solusi Untuk Jenis Layanan**

#### **1. Pendidikan anak usia dini**

Permasalahan Belum maksimalnya pendataan anak usia 5-6 tahun karena banyak anak dalam kota tetapi bersekolah di Luar kota

Solusi Melakukan koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak untuk memastikan keselarasan dan kesesuaian data.

#### **2. Pendidikan Dasar**

Permasalahan Tidak ada indikasi adanya masalah yang signifikan.

Solusi Untuk mempertahankan kualitas pendidikan dasar perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

#### **3. Pendidikan kesetaraan**

Permasalahan Tidak ada indikasi adanya masalah yang signifikan

Solusi Untuk mempertahankan kualitas pendidikan kesetaraan perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan.

## **4.2 Urusan Kesehatan**

### **4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan yang tertuang adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;



- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

#### 4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang urusan kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%), Adapun indikator Standar Pelayanan Minimal secara Nasional sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
		INDIKATOR	NILAI	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang	100%	Setiap Tahun



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		BATAS WAKTU PENCAPAIAN (TAHUN)
		INDIKATOR	NILAI	
		mendapatkan layanan kesehatan		
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>Human Immunodeficiency Virus</i> )	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

#### 4.2.3 Realisasi

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM 2024 (%)
		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100%	82,69 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	82,13 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	85.36 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan	100%	100 %



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL		CAPAIAN INDIKATOR SPM 2024 (%)
		INDIKATOR	TARGET DAERAH	
	Usia Produktif	skrining kesehatan sesuai standar		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	93.52 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB	Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100%	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100%	100%

Perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian / Output			Total Pencapaian	AKSI
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					95.31%	
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						82.69%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	62.69%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	4669	3659	<b>1010</b>	<b>78.37%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	



B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
1 . Vaksin Tetanus Difteri (Td)	Vaksin	3659	3659	0	100.00%	
2 . Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	Tablet	658620	658620	0	100.00%	
3 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Test Kehamilan	Orang	3659	3659	0	100.00%	
4 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan HB	Paket	3659	3659	0	100.00%	
5 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Golongan Darah	Paket	3659	3659	0	100.00%	
6 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	Paket	3659	3659	0	100.00%	
7 . Alat deteksi resiko Ibu Hamil : Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis B dan Sifilis dan HIV	Paket	3659	3659	0	100.00%	
8 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3659	3659	0	100.00%	
9 . Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3659	3659	0	100.00%	
10 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	2351	2351	0	100.00%	
11 . Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	Botol	84	84	0	100.00%	
12 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)"	Orang	33	33	0	100.00%	
13 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	337	337	0	100.00%	
14 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Orang	298	298	0	100.00%	
15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%	
16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%	
17 . Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	Orang	3659	3659	0	100.00%	



2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						82.13%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	62.13%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4669	3626	1043	77.66%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Formulir partograf	Formulir	3626	3626	0	100.00%	
	2 . Kartu ibu/rekam medis ibu	Paket	3626	3626	0	100.00%	
	3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	Buku	1998	1998	0	100.00%	
	4 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	60	60	0	100.00%	
	5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal : dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)	Orang	33	33	0	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Bidan (angka ideal : dengan rasio 1:1000 penduduk)	Paket	298	298	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Perawat (angka ideal : dengan rasio 1:885 penduduk)	Orang	337	337	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						85.36%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	65.36%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	4414	3606	808	81.69%	



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00%	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%		
1 . Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	Vaksin	3606	3606	0	100.00%		
2 . Vitamin K1 injeksi	Ampul	3606	3606	0	100.00%		
3 . Salep/tetes mata antibiotik	Orang	3606	3606	0	100.00%		
4 . Formulir bayi baru lahir	Formulir	3606	3606	0	100.00%		
5 . Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	Formulir	3606	3606	0	100.00%		
6 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Buku	3606	3606	0	100.00%		
7 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1	1	0	100.00%		
8 . Tenaga medis : Dokter/Dokter Spesialis Anak	Orang	319	319	0	100.00%		
9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%		
10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%		
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%		
12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	Orang	27	27	0	100.00%		
13 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%		
14 . Kader Kesehatan	Orang	3581	3581	0	100.00%		
<b>4 . Pelayanan Kesehatan Balita</b>						<b>100.00%</b>	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>80.00%</b>		
		<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>			
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	16968	16968	0	100.00%		
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>20.00%</b>	
B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%		
1 . Kuisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	Dokumen	16968	16968	0	100.00%		
2 . Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	Formulir	16968	16968	0	100.00%		
3 . Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	Orang	16968	16968	0	100.00%		
4 . Vitamin A Biru	Kapsul	16968	16968	0	100.00%		



	<b>(sesuai standar 6-11 bulan)</b>						
	5 . Vitamin A Merah	Kapsul	16968	16968	0	100.00%	
	<b>(sesuai standar 12-59 bulan)</b>						
	6 . Vaksin imunisasi dasar: BCG	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	7 . Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	8 . Vaksin imunisasi dasar: IPV	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	9 . Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB -Hib	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	10 . Vaksin imunisasi dasar: Campak - Rubella	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	11 . Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	12 . Vaksin imunisasi lanjutan : Campak - Rubella	Vaksin	16968	16968	0	100.00%	
	13 . Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	Unit	16968	16968	0	100.00%	
	14 . Peralatan Anafilaktik	Paket	9	9	0	100.00%	
	15 . Formula Terapi Gizi Buruk	Paket	1	1	0	100.00%	
	16 . Tenaga medis : Dokter	Orang	299	299	0	100.00%	
	17 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%	
	18 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%	
	19 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%	
	20 . Guru PAUD	Orang	1165	1165	0	100.00%	
	21 . Kader Kesehatan	Orang	3581	3581	0	100.00%	
5 .	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	80.00%	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	39027	46677	-7650	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Form pencatatan/buku rapor kesehatanku	Buku	5870	5870	0	100.00%	
	<b>(Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)</b>						
	2 . Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan	Buku	1	1	0	100.00%	
	<b>(Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA,</b>						



	lapas/LPKA dan Posyandu remaja)						
	3 . Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	Dokumen	46677	46677	0	100.00%	
	4 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per sekolah/madrasah/pesantren)	Formulir	211	211	0	100.00%	
	5 . Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	Formulir	1	1	0	100.00%	
	6 . Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opnameyang ada di gudangfarmasi kabupaten/kota)	Tablet	1	1	0	100.00%	
	7 . Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Alat	78	78	0	100.00%	
	8 . Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	Strip	3274	3274	0	100.00%	
	9 . Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	Paket	1	1	0	100.00%	
	10 . Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	Vaksin	14315	14315	0	100.00%	



	11 . Tenaga medis : Dokter/Dokter gigi	Orang	473	473	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%	
	15 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%	
	16 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%	
	17 . Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu : Guru	Orang	2549	2549	0	100.00%	
	18 . Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu : Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	Orang	3581	3581	0	100.00%	
6 .	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>80.00%</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	193341	193341	0	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1000	1000	0	100.00%	
	2 . Alat : Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	Unit	73	73	0	100.00%	
	3 . Alat : Tensimeter	Unit	55	55	0	100.00%	
	4 . Alat : Glukometer	Unit	73	73	0	100.00%	
	5 . Alat: Alat Pemeriksa Hb	Unit	18	18	0	100.00%	
	6 . Alat : Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	Unit	193341	193341	0	100.00%	
	7 . Alat : KIT IVA Tes	Unit	9	9	0	100.00%	
	8 . Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	Unit	5088	5088	0	100.00%	
	9 . Kit Ophthalmologi Komunitas	Unit	55	55	0	100.00%	
	10 . Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrutif Kronis/PPOK)	Dokumen	193341	193341	0	100.00%	
	11 . Alat Pelayanan KB	Unit	49	49	0	100.00%	
	12 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	Dokumen	3	3	0	100.00%	



	13 . Vaksin Tetanus Difteri (td)	Ampul	193341	193341	0	100.00%		
	14 . Tenaga medis : Dokter	Orang	299	299	0	100.00%		
	15 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%		
	16 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%		
	17 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%		
	18 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%		
	19 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3581	3581	0	100.00%		
7 .	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>						93.52%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	73.52%		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>			
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	40777	37476	3301	91.90%		
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						20.00%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%		
	1 . Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	Paket	18	18	0	100.00%		
	2 . Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	Paket	18	18	0	100.00%		
	3 . Alat pemeriksaan kolesterol	Paket	18	18	0	100.00%		
	4 . Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	Paket	15500	15500	0	100.00%		
	5 . Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS) / Activity Daily Living (ADL Barthel)	Paket	5810	5810	0	100.00%		
	6 . Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	Buku	1434	1434	0	100.00%		
	7 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	1434	1434	0	100.00%		
	8 . Tenaga medis : Dokter	Orang	299	299	0	100.00%		
	9 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%		
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%		
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%		
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%		



	13 . Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	Orang	3581	3581	0	100.00%	
8 .	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	18987	19008	-21	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)	Paket	12	12	0	100.00%	
	2 . Obat Hipertensi	Paket	19008	19008	0	100.00%	
	3 . Tensimeter (mengukur tekanan darah)	Unit	55	55	0	100.00%	
	4 . Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	Aplikasi	3	3	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	Paket	14615	14615	0	100.00%	
	6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	299	299	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%	
	8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%	
	9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	Orang	27	27	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%	
9 .	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus</b>						100.00%
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	<b>80.00%</b>	



PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	8030	8033	-3	<b>100.00%</b>	
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>	
<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
1 . Obat Diabetes Melitus	Paket	8033	8033	0	<b>100.00%</b>	
2 . Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	Unit	18	18	0	<b>100.00%</b>	
3 . BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah : reagen glukosa atau strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet	Unit	8033	8033	0	<b>100.00%</b>	
4 . Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	Formulir	4	4	0	<b>100.00%</b>	
5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	Paket	1000	1000	0	<b>100.00%</b>	
6 . Tenaga medis : Dokter	Orang	299	299	0	<b>100.00%</b>	
7 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	<b>100.00%</b>	
8 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	<b>100.00%</b>	
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	<b>100.00%</b>	
10 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	<b>100.00%</b>	
11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Gizi	Orang	77	77	0	<b>100.00%</b>	
12 . Tenaga kesehatan : Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	183	183	0	<b>100.00%</b>	
10 . Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat						<b>100.00%</b>



	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	80.00%	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	567	569	-2	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					20.00%	
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%	
	1 . Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) <b>bentuk fisik atau elektronik)</b>	Buku	30	30	0	100.00%	
	2 . Penyediaan Psikofarmaka <b>(pengobatan/medikasi)</b>	Jenis	4	4	0	100.00%	
	3 . Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi <b>(instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)</b>	Formulir	569	569	0	100.00%	
	4 . Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi kesehatan <b>(pencatatan dan pelaporan)</b>	Formulir	2	2	0	100.00%	
	5 . Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Media	2	2	0	100.00%	
	6 . Tenaga kesehatan : Dokter	Orang	299	299	0	100.00%	
	7 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa <b>(contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)</b>	Orang	9	9	0	100.00%	
	8 . Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	Orang	45	45	0	100.00%	
	9 . Tenaga profesional lainnya	Orang	4	4	0	100.00%	
11 .	<b>Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis</b>						100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	80.00%	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	7441	9846	-2405	100.00%	



PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)						20.00%	
	B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
	1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	30030	30030	0	100.00%	
	2 . Reagen Zn TB	Kit	820	820	0	100.00%	
	3 . Masker bedah dan Masker N95	Paket	9846	9846	0	100.00%	
	4 . Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	Paket	9846	9846	0	100.00%	
	5 . Katrid tes cepat molekuler	Test	10000	10000	0	100.00%	
	6 . Formulir pencatatan dan pelaporan	Dokumen	1	1	0	100.00%	
	7 . Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	Dokumen	1	1	0	100.00%	
	8 . Tuberkulin	Vial	985	985	0	100.00%	
	9 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	Orang	321	321	0	100.00%	
	10 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%	
	11 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kefarmasian	Orang	633	633	0	100.00%	
	12 . Tenaga kesehatan : Tenaga Kesehatan Masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%	
	13 . Tenaga kesehatan : Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	Orang	183	183	0	100.00%	
	14 . Tenaga kesehatan : Radiografer	Orang	56	56	0	100.00%	
	15 . Kader Kesehatan	Orang	3581	3581	0	100.00%	
12 .	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)						100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00%	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	5280	8645	-3365	100.00%	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)					20.00%	



B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM		Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	100.00%	
1 . Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	Paket	3005	3005	0	100.00%	
2 . Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	Test	9000	9000	0	100.00%	
3 . Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	Paket	8645	8645	0	100.00%	
4 . Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK	Paket	8645	8645	0	100.00%	
5 . Tenaga medis : Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	Orang	324	324	0	100.00%	
6 . Tenaga kesehatan : Bidan	Orang	541	541	0	100.00%	
7 . Tenaga kesehatan : Perawat	Orang	1170	1170	0	100.00%	
8 . Tenaga kesehatan : Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Orang	183	183	0	100.00%	
9 . Tenaga kesehatan : Tenaga kesehatan masyarakat	Orang	16	16	0	100.00%	
10 . Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	Orang	3581	3581	0	100.00%	

Sumber : e-SPM Kemendagri

Dari table data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Untuk pelayanan kesehatan ibu hamil capaian indikator SPM sebesar 82.69% dengan demikian untuk target yang ditetapkan belum tercapai. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu pada indikator jumlah yang harus dilayani yaitu sebesar sebesar 78.37% dari target 100% yang harus dilayani. Dengan target 4.669 orang yang harus dilayani dan sebaesar 3.659 orang terlayani, atau 1.010 orang dari target yang tidak terlayani.
- 2 Untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin capaian indikator SPM sebesar 82.13% dengan demikian untuk target yang ditetapkan belum tercapai. Hal ini disebabkan karena ada beberapa indikator yang tidak memenuhi target yang ditetapkan yaitu pada indikator jumlah yang harus dilayani yaitu sebesar sebesar 77.66% dari



- target 100% yang harus dilayani. Dengan target 4.669 orang yang harus dilayani dan sebaesar 3.626 orang terlayani, atau 1.043 orang dari target yang tidak terlayani.
- 3 Untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir capaian indikator SPM sudah 85,36%. Dengan target 4.414 orang yang harus dilayani dan sebaesar 3.606 orang terlayani, atau 808 orang dari target yang tidak terlayani atau 81,69% yang terlayani.
  - 4 Untuk pelayanan kesehatan balita capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 16.968 orang yang harus dilayani dan sebaesar 16.968 orang terlayani, atau 100% target terlayani.
  - 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 39.027 orang yang harus dilayani dan sebaesar 46.677 orang terlayani, 100% target terlayani untuk warga kota Kediri dan ada sebanyak 7.650 orang di luar target yang terlayani.
  - 6 Untuk pelayanan kesehatan pada usia produktif capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 193.341 orang yang harus dilayani dan sebaesar 193.341 orang terlayani, atau 100% target terlayani
  - 7 Untuk pelayanan kesehatan pada usia lanjut capaian indikator SPM sebesar 93,52% dengan demikian untuk target yang ditetapkan belum tercapai. Dengan target 40.777 orang yang harus dilayani dan sebaesar 37.436 orang terlayani, atau 3.301 orang dari target yang tidak terlayani atau 91,90% yang terlayani.
  - 8 Untuk pelayanan kesehatan penderita hipertensi capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 18.987 orang yang harus dilayani dan sebaesar 19.008 orang terlayani, atau 100% target terlayani untuk warga Kota Kediri dan ada sebanyak 21 orang diluar target yang terlayani.
  - 9 Untuk pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 8.030 orang yang harus dilayani dan sebaesar 8.033 orang terlayani, atau 100% target terlayani untuk warga Kota Kediri dan ada sebanyak 3 orang diluar target yang terlayani.
  - 10 Untuk pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 567 orang yang harus dilayani dan sebaesar 569 orang terlayani, atau 100% target terlayani untuk warga Kota Kediri dan ada sebanyak 2 orang diluar target yang terlayani.
  - 11 Untuk pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 7.441 orang yang harus dilayani dan sebaesar 9.846



orang terlayani, atau 100% target terlayani untuk warga Kota Kediri dan ada sebanyak 2.405 orang diluar target yang terlayani.

- 12 Untuk pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) capaian indikator SPM sudah 100%. Dengan target 5.280 orang yang harus dilayani dan sebesar 8.645 orang terlayani, atau 100% target terlayani untuk warga Kota Kediri dan ada sebanyak 3.365 orang diluar target yang terlayani.

#### 4.2.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan pada Tahun 2024 sebesar Rp. 16,218,550,343,- dengan rincian sebagai berikut:

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	130,197,880,864
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	16,218,550,343
	<b>APBD</b>	16,218,550,343
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	2,945,009,370
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	7,321,408,400
	E. DANA BAGI HASIL	5,952,132,573
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

Sumber : e-SPM Kemendagri

#### 4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil yang dilibatkan dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan jenis pelayanan dasar adalah tenaga medis, paramedis, dan non medis yang ada di Kota Kediri yang terdiri dari :



No.	Nama Sumber Daya Kesehatan	Jumlah
1.	Dokter Spesialis SPOG	18
2.	Dokter Spesialis anak	18
3.	Dokter Spesialis Paru	5
4.	Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin	1
5.	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	17
6.	Dokter Umum	299
7.	Dokter Gigi	174
8.	Tenaga Kefarmasian	633
9.	Perawat	1170
10.	Bidan	541
11.	Gizi	70
12.	Tenaga Kesehatan Masyarakat	16
13.	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	183
14.	Penata Rongent	56
15.	Kader Kesehatan	3581

#### 4.2.6 Permasalahan dan Solusi

##### Permasalahan dan Solusi Untuk Jenis Layanan

###### 1. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Dari pengukuran program capaian SPM Pelayanan Kesehatan Ibu hamil sebesar 78,37% dengan angka sasaran program sebanyak 4.669 pada tahun 2024 tercapai angka nominal 3.659 sehingga belum memenuhi target yang telah ditentukan.

Penyebab masalah yang dihadapi

- Adanya ibu yang melahirkan premature ( usia kehamilan kurang 7 bl ) sebanyak 34 ibu (merupakan penyumbang ketidaktercapaian sebesar 0,73% dimana pada persalinan prematur tidak bisa dihitung karena belum mencapai kriteria K6 ibu hamil)
- Banyaknya kasus gagal hamil/ Abortus sebanyak 152 ibu (menyumbang angka ketidak berhasilan sebesar 3,25 % )
- Pengaruh capaian KB aktif (Akseptor yang terus menerus memakai kontrasepsi sampai sekarang) yang cukup tinggi pada tahun 2024 dimana sasaran harusnya hamil kedua / hamil berikutnya masih ikut KB secara aktif sebanyak 824 orang dengan angka ketidakcapaian



sebesar 17,65%.

Upaya Solusi yang dilakukan

- a. Melakukan pemeriksaan USG pada saat TM 1 dan TM II sehingga bisa memenuhi target K6
  - b. Meningkatkan kerjasama dengan program Gizi untuk memantau Gizi ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya persalinan prematur/ abortus
  - c. Melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi ibu hamil yang bersiko terjadinya abortus, Prematur baik dari kader maupun bidan wilayah
  - d. Melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi ibu hamil yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri dan pindah keluar kota / pindah periksa ke faskes diluar kota kediri dengan meminta nomor kontak persen ibu hamil untuk mengingatkan waktunya periksa, bila sudah periksa di faskes luar kota bisa minta di fotokan buku KIAnya untuk di catat di kohort ibu hamil.
  - e. Meningkatkan koordinasi jejaring antara Puskesmas Bidan Praktek Mandiri / Dokter Praktek mandiri ( Sp.OG ) dan Rumah Sakit yang ada diwilayahnya dalam rujukan ANC Terpadu.
  - f. Setiap Bidan / dokter SpOG yang praktek di masing masing Puskesmas wajib melaporkan ibu hamil yang periksa di tempat prakteknya untuk mencegah tidak tercatatnya data ibu hamil.
2. Indikator Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian untuk indikator pelayanan kesehatan ibu bersalin sebesar 77,66% dengan sasaran 4.669, dan tercapai angka nominal 3.626 sehingga belum mencapai target yang ditentukan.

Penyebab / masalah yang dihadapi

- a. Terjadi Abortus/ gagal hamil 152 (3,25 %) ibu sehingga berpengaruh pada pencapaian pelayanan ibu bersalin.
- b. Keberhasilan capaian KB aktif (Akseptor yang terus menerus memakai kontrasepsi sampai sekarang ) pada tahun 2024 cukup tinggi dimana sasaran harus hamil dan melahirkan masih ikut KB secara aktif sebanyak 891 orang, menyumbang angka ketidaktercapaian sebesar 19,09%.

Upaya / Solusi yang dilakukan



- a. Meningkatkan kerjasama dengan program Gizi untuk memantau Gizi ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tabelt tambah darah untuk mencegah terjadinya abortus
- b. Melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi ibu hamil yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri dan pindah keluar kota / pindah periksa ke faskes diluar kota kediri dengan meminta nomor kontak persen ibu hamil untuk memastikan, sudah bersalin / belum , bila sudah bersalin di faskes luar kota bisa minta di fotokan buku KIAnya untuk di catat di kohort ibu hamil/ ibu bersalin
- c. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih
- d. Setiap Persalinan ditolong di fasilitas kesehatan
- e. Setiap komplikasi kebidanan mendapat pelayanan yang adekuat
- f. Penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan obstetri
- g. Penguatan rujukan dini berencana

### 3. Indikator Pelayanan Bayi Baru Lahir

Hasil pengukuran capaian SPM pada indikator pelayanan Kesehatan bayi baru lahir sebesar 81,69%, target sasaran 4.414 tercapai dengan angka nominal 3.606, sehingga belum memenuhi target yang di tentukan.

Penyebab / masalah yang dihadapi :

- a. Adanya kasus Lahir Mati 7 bayi ( 0,15 %)
- b. Adanya kasus Abortus 152 ( 3,45 %)
- c. Bayi baru lahir belum masuk kreteria Kunjungan Neonatal lengkap 3 x kunjungan sebanyak 649 bayi sehingga menyumbang angka ketidaktercapaian sebesar 14,71%

Upaya / Solusi yang dilakukan :

- a. Meningkatkan kerjasama dengan program Gizi untuk memantau Gizi ibu hamil selama masa kehamilan dan pemberian tabelt tambah darah untuk mencegah terjadinya abortus dan bayi lahir mati ( bayi meninggal dalam kandungan ).
- b. Melakukan pengawasan dan pengawalan secara ketat bagi ibu hamil, ibu bersalin yang awalnya melakukan ANC di Kota Kediri dan pindah keluar kota / pinda periksa ke faskes diluar kota kediri dengan meminta nomor kontak persen ibu hamil untuk memastikan sudah melahirkan atau belum di faskes luar kota bisa minta di fotokan buku KIAnya untuk di catat di kohort Bayi



- c. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pemantauan dan pengawasan dari bidan wilayah sampai bayi umur 28 hari.
  - d. Setiap komplikasi Neonatal mendapat pelayanan yang terdekat.
  - e. Penguatan jejaring rujukan kegawatdaruratan Obstetri dan Neonatal.
  - f. Penguatan rujukan dini berencana pada neonatal komplikasi.
4. Indikator Pelayanan Kesehatan Balita
- Indikator Pelayanan Kesehatan Balita angka capainnya sebesar 100 % , dengan target sasaran nominal 16.968 tercapai angka nominal 16.968 sehingga sudah memenuhi target SPM yang ditentukan.
- Penyebab / masalah yang dihadapi
- Masih ada sasaran yang tidak hadir baik ke Puskesmas maupun ke Posyandu karena ada sasaran yang sudah bersekolah di luar wilayah / berdomisili di luar Kota Kediri akan tetapi petugas puskesmas melakukan penimbangan di sekolah sekolah TK/ Play Grup se Kota Kediri sehingga bisa mencapai target. Balita yang tidak datang saat posyandu dilakukan kunjungan rumah untuk penimbangan.
- Upaya dan solusi yang dilakukan
- a. Melakukan pendataan dan pemantauan bagi balita yang tidak hadir ke Puskesmas maupun ke Posyandu
  - b. Melakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK ) bauil di Puskesmas Posyanadu maupun di rumah sasaran / Kunjungan Rumah
  - c. Melakukan Pendataan, Pencatatan, Pengawalan,, Pemetaan sasaran balita diseluruh wilayah Kota Kediri oleh Kader maupun oleh Bidan wilayah sehingga bisa memenuhi target yang ditentukan
  - d. Meingkatkan koordinasi dengan kader wilayah maupu TP PKK tingkat kelurahan untuk melakukan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang(SDIDTK ) di masing masing posyandu yang ada di wilayah Puskesmas
  - e. Meningkatkan koordinasi dengan semua sekolah TK/ Play grup se Kota Kediri untuk melakukan penimbangan dan Stimulasi Deteksi Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK ) di masing masing sekolah di wilayah Puskesmas
5. Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- Dari pengukuran capaian SPM Pelayanan kesehatan pada usia



pendidikan dasar dengan jumlah sasaran 39.027 dan dapat di maksimalkan untuk pencapaiannya sejumlah 46.677 sehingga diperoleh angka capaian lebih dari 100 %, sudah melebihi dengan target yang ditentukan.

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan cakupan dan meningkatkan kualitas skrining anak sekolah meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang skrining.
  - b. Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor dengan Dinas Pendidikan, Kementrian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dalam pelaksanaan kegiatan skrining.
  - c. Menyediakan sarana prasarana meliputi buku raport kesehatan anak sekolah , UKS Kit.
  - d. Memberikan umpan balik hasil skrining ke sekolah bagi siswa yang mengalami masalah kesehatan untuk disampaikan ke orang tua.
  - e. Koordinasi dengan sekolah dalam pelaksanaan skrining anak sekolah supaya berjalan dengan lancar.
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- Indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif diperoleh data capaian 100 %, sudah memenuhi target yang ditentukan, dari jumlah sasaran 193.341 diperoleh angka capaian sebesar 193.341
- Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan capaian:
- a. Meningkatkan kegiatan deteksi dini faktor resiko PTM/ Posbindu Mobile bekerja sama dengan lintas program dan lintas sektor
  - b. Melakukan pemetaan sasaran untuk percepatan deteksi dini faktor resiko PTM di tingkat kelurahan
  - c. Memberdayakan Kader Joyoboyo yang terdapat di semua Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah sebagai kader Posbindu, untuk mendata dan menjadwalkan screening.
  - d. Melakukan refreshing kader posbindu untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM
  - e. Melaksanakan integrasi dengan lintas program untuk meningkatkan cakupan.
  - f. Tetap melaksanakan koordinasi program dengan puskesmas untuk pencapaian cakupan layanan.
  - g. Melaksanakan pemeriksaan deteksi dini/ skrining kesehatan melalui



kunjungan rumah (door to door) yang dilakukan oleh petugas kesehatan dan kader kesehatan.

h. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan pelayanan pencapaian cakupan program.

#### 7. Indikator Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut dengan angka sasaran 40.777 dan angka capaian 37.476 sehingga diperoleh angka capaian 91,90% sedangkan target capaian yang ditetapkan adalah 100 %, sehingga indikator SPM pelayanan kesehatan pada usia lanjut tidak memenuhi target.

Penyebab / masalah yang dihadapi:

- a. Pemeriksaan skrining lansia yang cukup banyak membutuhkan waktu yang cukup lama untuk setiap pemeriksaan satu pasien sehingga petugas tidak bisa optimal dalam menjangkau semua sasaran
- b. Ada selisih antara sasaran proyeksi dan sasaran riil di wilayah puskesmas yang cukup besar sehingga puskesmas tidak bisa mencapai target pelayanan.
- c. Dampak pembangunan tol mengakibatkan adanya perpindahan penduduk ke luar wilayah kota kediri

Upaya yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas skrining usia lanjut meliputi:

- a. Pendataan lansia
- b. Memberdayakan Kader Joyoboyo yang terdapat di semua Kelurahan yang salah satu tugasnya adalah sebagai kader lansia untuk mendata, memantau dan juga kunjungan rumah.
- c. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan tentang skrining lansia
- d. Koordinasi penyediaan sarana prasarana pemeriksaan laboratorium lansia (gula darah, kolesterol) oleh puskesmas dan juga dengan kelurahan.
- e. Koordinasi dengan DPS, klinik dan RS dalam pelaporan pasien lansia yang dilakukan pemeriksaan skrining dengan pemantauan wilayah setempat (PWS)
- f. Pengaturan SDM (Tim) petugas kesehatan dalam pemeriksaan screening lansia.
- g. Kegiatan *homecare* oleh petugas kesehatan, terutama bagi lansia



risiko tinggi (risti), lansia yang tinggal sendirian dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total melalui kunjungan rumah, namun tetap menerapkan protokol kesehatan.

h. mobile screening untuk menjangkau sasaran lansia yang tidak pernah periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan.

#### 8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Indikator Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi angka capainnya melebihi 100 % dengan target sasaran 18.987 sebesar tercapai angka nominal 19.008, sehingga capaian pada indikator ini melebihi target SPM yang ditentukan.

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi ini antara lain:

- a. Penderita hipertensi yang ditemukan ketika kegiatan screening usia produktif, Posyandu Posbindu, skrining kesehatan dengan kunjungan rumah dan kegiatan skrining kesehatan lainnya ditindaklanjuti dan dimonitor untuk follow up /datang berobat secara teratur tiap bulan ke Puskesmas/ Fasyankes.
- b. Melakukan pemeriksaan kesehatan dengan kunjungan ke rumah-rumah untuk menskrining awal tekanan darah yang lebih dari normal.
- c. Melakukan refreshing kader posbindu untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM dan hipertensi
- d. Melaksanakan koordinasi program dengan Puskesmas untuk menggali masalah-masalah yang ada di wilayah kerjanya, mencari solusi bersama, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan cakupan.
- e. Melaksanakan integrasi lintas program dalam pencapaian cakupan.
- f. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan peningkatan cakupan program.
- g. Mendorong Puskesmas untuk memperkuat jejaring kemitraan dengan fasyankes yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas dalam pencatatan data penderita hipertensi yang telah mendapatkan Yankes sesuai standar.
- h. Mendorong Puskesmas mensinergikan kegiatan Prolanis-BPJS dengan Yankes penderita hipertensi.
- i. Berkoordinasi dengan Rumah sakit dan klinik dalam pencatatan data



penderita hipertensi yang telah mendapatkan Yankes sesuai standar.

#### 9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus

Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan penderita Diabetes Militus diperoleh data capaian lebih dari 100 %, dengan angka sasaran 8.030 dan tercapai angka nominal 8.033, sedangkan target capaian yang ditetapkan adalah 100 %, sehingga indikator SPM pelayanan ini sudah melebihi target.

Beberapa langkah upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian cakupan, antara lain:

- a. Terus melakukan sosialisasi, edukasi dan konsultasi (memanfaatkan daring) dalam setiap kesempatan ke masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan secara rutin bagi penderita Diabetes mellitus.
- b. Memperbanyak sweeping penemuan penderita DM baru di masyarakat melalui Posbindu maupun posyandu lansia dan mengajak mereka mau datang ke puskesmas secara rutin
- c. Mensinergikan kegiatan Prolanis – BPJS dengan yankes penderita DM
- d. Mendorong puskesmas untuk menjalankan Pandu PTM
- e. Memperkuat jejaring kemitraan dengan fasyankes yang ada di wilayah kerja masing-masing puskesmas dalam pencatatan data penderita DM yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- f. Melakukan pemeriksaan kesehatan dengan kunjungan ke rumah-rumah untuk menskrining awal pemeriksaan gula yang lebih dari normal.
- g. Melakukan refreshing kader posbindu untuk meningkatkan kemampuan kader dalam melaksanakan deteksi dini faktor resiko PTM dan Diabetes Mellitus
- h. Melaksanakan koordinasi program dengan Puskesmas untuk menggali masalah-masalah yang ada di wilayah kerjanya, mencari solusi bersama, monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan cakupan.
- i. Melaksanakan integrasi lintas program dalam pencapaian cakupan.
- j. Penyediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pelayanan peningkatan cakupan program.
- k. Mendorong Puskesmas untuk memperkuat jejaring kemitraan dengan fasyankes yang ada di wilayah kerjanya Puskesmas dalam pencatatan data penderita Diabetes Mellitus yang telah mendapatkan Yankes



sesuai standar.

- I. Berkoordinasi dengan Rumah sakit dan klinik dalam pencatatan data penderita Diabetes Mellitus yang telah mendapatkan Yankes sesuai standar.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat

Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan orang dengan Gangguan Jiwa Berat dengan angka sasaran 567 dan tercapai angka nominal 569, sehingga angka capaian pada indikator ini sudah melebihi target yang sudah ditetapkan yaitu 100 %.

Kendala yang dialami dalam pelayanan indikator ini antara lain :

- a. Meningkatnya jumlah sasaran berdasarkan ketentuan SPM terbaru dengan menggunakan data hasil Riskesdas 2018.
- b. Masih adanya stigma di masyarakat terkait ODGJ, sehingga keluarga cenderung menyembunyikannya yang mengakibatkan petugas kesehatan tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan.
- c. Kader keswa masing-masing kelurahan tidak bisa menjalankan perannya secara optimal karena belum terlatih.
- d. Masih terbatasnya tenaga di masyarakat yang terlatih dalam penanganan permasalahan kesehatan jiwa di masyarakat.
- e. Masih kurangnya kesadaran keluarga dan pasien untuk mengambil obat dan meminumkannya pada pasien secara rutin. Sehingga tidak sedikit pasien yang akhirnya mengalami gaduh-gelisah.

Berdasarkan pembahasan dengan pengelola program jiwa puskesmas dan dinas kesehatan, dihasilkan beberapa kesepakatan untuk mengatasi permasalahan tersebut, antara lain :

- a. Pemegang program terus berusaha mencari sasaran program untuk diberikan pelayanan kesehatan sesuai standar
- b. Memberikan edukasi dan pendekatan kepada masyarakat tentang penanganan pasien ODGJ dan mendorong masyarakat untuk menginformasikan jika ada permasalahan kesehatan jiwa di wilayahnya.
- c. Memberikan edukasi dan menyelenggarakan pelatihan Kesehatan Jiwa berbasis Masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan kader jiwa yang ada di masyarakat dalam penanganan permasalahan kesehatan jiwa.



- d. Sudah terbentuknya Posyandu Jiwa di 9 puskesmas yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri dengan pendampingan dari puskesmas bekerjasama dengan Institusi Pendidikan Kesehatan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran.
  - e. Memberdayakan keluarga, TRC Dinsos maupun kader Joyoboyo sebagai pengawas minum obat, serta menjelaskan tentang efek samping dari obat yang diberikan untuk meningkatkan cakupan layanan ODGJ dan menemukan sasaran.
11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis (TBC)
- Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis (TBC) diperoleh data capaian melebihi 100 %, dengan angka target sasaran 7.441 terduga TBC dan tercapai angka nominal 9.846 terduga TBC, target capaian yang ditetapkan adalah 100 %, sehingga indikator SPM pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis (TBC) sudah melebihi target capaian.
- Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan cakupan dan meningkatkan kualitas capaian pelayanan kesehatan orang terduga Tuberculosis (TBC):
- a. Kota Kediri sudah memiliki 5 site TCM yang ada di RS Gambiran, Puskesmas Campurejo, Puskesmas Pesantren 2, RSM Ahmad Dahlan dan Puskesmas Balowerti.
  - b. Dinas Kesehatan bekerja sama dengan RSM Ahmad Dahlan Kota Kediri sebagai RS Layanan TB Resisten Obat mulai tahun 2022 sehingga menerima rujukan semua terduga pasien TB Baik yg Sensitif Obat maupun Resisten Obat di wilayah Kediri dan sekitarnya
  - c. Mengadakan Bimtek Program TBC bagi Kader Kesehatan (Kader Kilisuci) yang lebih difokuskan untuk kegiatan Investigasi Kontak dan TPT.
12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Dari pengukuran SPM pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV diperoleh data sasaran 5.280 dan tercapai angka nominal 8.645, sehingga hasil capaian pada indicator ini sudah melebihi angka target capaian yang ditentukan 100%.
- Beberapa upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian Pelayanan



Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV antara lain :

- a. Kerjasama dengan lintas sektor dan lintas program dalam mencapai target yang ditetapkan.
- b. Melakukan identifikasi target sasaran SPM dan pemetaan tempat berkumpulnya populasi berisiko (hotspot).
- c. Melakukan kegiatan mobile VCT secara aktif pada hotspot dengan sasaran yang tepat.
- d. Melakukan refreshing dan peningkatan kompetensi teknis petugas layanan HIV AIDS dalam melakukan tatalaksana pemeriksaan HIV
- e. Monitoring pencatatan dan pelaporan HIV pada layanan secara rutin sesuai dengan tanggal cut off pelaporan

### 4.3 Urusan Pekerjaan Umum

#### 4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik

#### 4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Nilai	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %	Setiap tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	Setiap tahun

#### 4.3.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-	jumlah warga negara yang memperoleh	100 %	92,12 %



	hari	kebutuhan pokok air minum sehari-hari		
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %

Perhitungan sebagai berikut

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					96.06%
1.	<b>Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari</b>					92.12%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	298820	298820	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>12.12%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>60.60%</b>
	<b>JARINGAN PERPIPAAN</b>					
	<b>1</b> Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	81732	17335	<b>64397</b>	<b>21.21%</b>



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>2</b> Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbusa, tidak berbau	Rumah Tangga	81732	17335	<b>64397</b>	<b>21.21%</b>
	<b>BUKAN JARINGAN PERPIPAAN</b>					
	<b>3</b> Ukuran kuantitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan kebutuhan pokok minimal sehari-hari sejumlah 60 liter/orang/hari (enam puluh liter per orang per hari) sama dengan 4 galon melalui SPAM	Rumah Tangga	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>4</b> Ukuran kualitas Air Minum, Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan urusan Kesehatan yaitu tidak keruh, tidak berwarna, tidak	Rumah Tangga	0	0	<b>0</b>	<b>100.00%</b>



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	berasa, tidak berbusa, tidak berbau					
2.	<b>Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>	<b>80.00%</b>
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	289418	289418	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. Jumlah Mutu Barang / Jasa / SDM</b>		<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	100.00%
	1 Ukuran kuantitas penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik, setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	81732	81732	0	100.00%



NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>2</b> Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala, minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	Rumah Tangga	250	0	250	100.00%
	<b>3</b> Ukuran kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah perdesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septic sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	Rumah Tangga	250	0	250	100.00%

Sumber : e-SPM Kemendagri



Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

Untuk Layanan dasar ini capaian SPM sebesar 92,12%. Dengan target penerima layanan 298.820 orang dan 298.820 orang terlayani atau 100% orang terlayani. Tetapi Terdapat mutu layanan yang belum tercapai yaitu Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari) dengan target penerima sebanyak 81.732 rumah tangga dengan realisasi penerima layanan sebanyak 17.335 hanya 21,21 % yang memperoleh layanan atau 64.397 rumah tangga yang tidak terlayani .

2. Indikator penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Untuk Layanan dasar ini capaian SPM sebesar 100%. Dengan target penerima layanan 289.418 orang dan 289.418 orang terlayani atau 100% orang terlayani. Penerima layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) sudah terpenuhi 100%, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat/SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa / hektar), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat / SPALD-S terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa / hektar dan seluruh wilayah perkotaan), Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat/SPALD-T terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik) sudah terpenuhi 100% sehingga untuk indikator penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik sudah terlayani dengan baik.

#### 4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum pada Tahun 2024 sebesar Rp. 18.549.100.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	145,494,553,503
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	18,549,100,000



NO	PENDANAAN	PAGU
	<b>APBD</b>	18,549,100,000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	5,958,100,000
	C. APBD DAK FISIK	12,591,000,000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

Sumber : e-SPM Kemendagri

#### 4.3.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
ASN = 78	II = 1 III = 5	10	62
Non ASN = 64	IV = 1		

#### 4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri dilaksanakan oleh PDAM dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sehingga Dinas PUPR memerlukan koodinasi dengan instansi PDAM

Permasalahan pada Jenis Pelayanan

##### 1. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

###### a. Jaringan Perpipaan

Adanya keengganan masyarakat yang menggunakan sumber air bukan perpipaan ke jaringan Perpipaan, karena beranggapan jaringan perpipaan kurang ekonomis dibandingkan dengan Bukan jaringan Perpipaan

###### b. Bukan Jaringan Perpipaan

Tidak adanya jaminan terhadap Mutu Air baku yang diperoleh dari sumber



air bukan Perpipaan (sumur airangkal)

Solusi Pada Jenis Layanan

a. Jaringan Perpipaan

Adanya Program Penyambungan Gratis jaringan perpipaan ke calon calon konsumen melalui kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang

b. Bukan Jaringan Perpipaan

Perlunya Pengecekan secara sampling secara berkala terhadap sumur sumur dangkal milik masyarakat, untuk mengetahui mutu air baku air minum yang dimiliki masyarakat

2. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

Permasalahan

Adanya Penolakan masyarakat terhadap kegiatan IPAL komunal di Lingkungan Permukiman yang sudah direncanakan

Solusi

Sosialisasi lebih intensif tentang IPAL komunal, sehingga masyarakat memahami kelebihan dan manfaat IPAL komunal dibandingkan dengan saptic tank konvensional

#### 4.4 Urusan Perumahan Rakyat

##### 4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar Bidang Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kab/Kota dilaksanakan melalui :

- a. rehabilitasi rumah;
- b. pembangunan kembali rumah;
- c. pemukiman kembali; atau
- d. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni

2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota



Merupakan jenis pelayanan dasar yang dilaksanakan melalui:

- a. penggantian hak atas penguasaan tanah dan/atau bangunan; atau
- b. bantuan akses Rumah Sewa Layak Huni

#### 4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100	Setiap tahun
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100	Setiap tahun

#### 4.4.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Capaian Indikator SPM
1.	Penyediaan & rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kab/Kota	jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan akses rumah darurat layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	100	100 %
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	jumlah Rumah Tangga terkena relokasi program pemerintah daerah, sesuai dengan jumlah rencana Rumah Tangga dalam rencana pemenuhan	100	100 %



Dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
			-4	-5	-6		
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					100%	
1.	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/ Kota				<b>-100%</b>	100%	
	Terjadi Bencana (Lampirkan SK Bencana)						35
							71
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				<b>-80%</b>		
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>		
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	0	0	0		
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>-20%</b>	<b>20.00 %</b>	
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi</b>		
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00 %	
	<b>1.PENDATAAN</b>						



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	BAGI KORBAN BENCANA						
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN /KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	KABUPATEN /KOTA						
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN /KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	<b>2.PERHITUNGAN</b>						
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	KORBAN BENCANA						
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :						
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA						
	<b>3.PERENCANAAN</b>						
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K SI
	AT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN /KOTA :						
2 .	<b>Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>-100%</b>	100.00 %	
KI2024022204 3722300223							
	Ada Relokasi Program Pemerintah						35 71
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				<b>-80%</b>		
			<b>Jumlah Total Yang Harus Dilayani</b>	<b>Jumlah Total Yang Terlayani</b>	<b>Yang Belum Terlayani</b>		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	0	0	0	100.00 %	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				<b>-20%</b>	<b>20.00 %</b>	
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani/Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani/ Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani/ Terpenuhi</b>		
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00 %	



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	<b>1.PENDATAAN</b>						
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA						
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN /KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.4 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.5 IDENTIFIKASI LAHAN POTENSIAL SEBAGAI RELOKASI PERUMAHAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.A.6 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.10 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG MENIMBULKAN BAHAYA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.11 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI ATAS LAHAN BUKAN FUNGSI PERMUKIMAN DI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	KABUPATEN /KOTA						
	FORM 4.A.12 IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI KAWASAN KUMUH KABUPATEN /KOTA (<10 HA)	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.A.13 PENGUMPULAN DATA RUMAH YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	<b>2.PERHITUNGAN</b>						
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	KORBAN BENCANA						
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.3 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.4 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	BAGI TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :						
	FORM 4.B.7 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.B.8 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN BIAYA LAYANAN PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA						
	<b>3.PERENCANAAN</b>						
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.2 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA BENCANA KABUPATEN /KOTA :	DOWNLOAD		100			
	FORM 4.C.4 RENCANA PEMENUHAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI	DOWNLOAD		100			



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian	A K S I
	MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN /KOTA :						

Dari table di atas dapat disimpulkan untuk capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Untuk jenis layanan Standart Pelayanan Minimal Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.  
Untuk Layanan dasar ini capaian SPM sebesar 100%. Karena di kota kediri tidak ada bencana maka di haruskan untuk OPD pengampu pada layanan dasar ini Menyusun 4(empat) tahapan penyusunan SPM agar hasil yang dicapai bisa 100%
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  
Untuk Layanan dasar ini capaian SPM sebesar 100%. Karena di kota kediri tidak ada bencana maka di haruskan untuk OPD pengampu pada layanan dasar ini Menyusun 4(empat) tahapan penyusunan SPM agar hasil yang dicapai bisa 100%

#### 4.4.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat pada Tahun 2024 sebesar Rp. 0,-, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	0
	<b>APBD</b>	0
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0



	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### 4.4.5 Dukungan Personil

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf
ASN = 35 Non ASN =55	II = 1 III = 3 IV = 2	7	77

#### 4.4.6 Permasalahan dan Solusi

##### a. Kendala dan Permasalahan

Apabila tidak terjadi bencana, maka dalam perhitungannya didapatkan nilai 0 karena bencana merupakan hal yang tidak terduga yang dapat menimpa siapa saja dan kita berharap tidak terjadi bencana serta untuk program pemerintah yang sifatnya rehabilitasi perlu melibatkan semua pihak agar tidak terjadi benturan kepentingan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Kediri. Selama ini untuk OPD pengampu layanan ini belum melakukan identifikasi warga penerima layanan yang menyebabkan tidak ada data untuk dipakai acuan dalam melaksanakan pemenuhan layanan minimal bagi warga kota kediri untuk layanan pemukiman dikarenakan tidak ada anggaran

##### b. Upaya Solusi yang dilakukan, sebagai berikut :

Perlunya persamaan persepsi dari kinerja penerapan SPM terutama dalam capaiannya 0% (capaian 0 dalam artian positif bukan negatif). Perlu adanya koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pemenuhan data warga penerima layanan sehingga untuk layanan dasar di bidang perumahan bisa dilaksanakan. Untuk kedepan anggaran untuk layanan ini sangat diperlukan.



## 4.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

### 4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/ Kota, adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

### Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Bencana

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.

### 4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100 %	Setiap tahun
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	Setiap tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan	100 %	Setiap tahun



No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
	evakuasi korban bencana	penyelamatan dan evakuasi korban bencana		
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100 %	Setiap tahun

#### 4.5.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Tahun 2024	Capaian Indikator SPM
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100 %	96,00 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	71,17 %
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	78,08 %
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100 %	96,84%

Perhitungan sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output			Total Pencapaian
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM TRANTIBUM</b>					96.00%
1.	<b>Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)</b>					96.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					80.00%
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	



	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	128	128	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				-20%	16.00%
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					80.00%
	<b>1 . Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada</b>					
	(jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional)	Unit	30	24	6	80.00%
	<b>2 . Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada*</b>					
	(SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawalan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	Dokumen	6	6	0	100.00%
	<b>3 . Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota</b>	Orang	55	55	0	100.00%



<p>Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM***</p> <p><b>(Jumlah dan kualitas personil/SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil/PPNS, Satuan Perlindungan Masyarakat/Satlinmas)</b></p>					
<p>4 . Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal</p>	Dokumen	1	0	1	0.00%
<p>5 . Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil</p> <p><b>(kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)</b></p>	Orang	0	0	0	100.00%
<p>6 . Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan</p> <p><b>(pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan</b></p>	Orang	0	0	0	100.00%



	membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)					
<b>KATEGORI PENCAPAIAN SPM KEBENCANAAN</b>						83.09%
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)					71.17%
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>					<b>-80%</b>	<b>58.08%</b>
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	12988	9430	<b>3558</b>	<b>72.61%</b>
<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>-20%</b>	<b>13.09%</b>
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					65.43%
	1 . Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	Dokumen	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	2 . Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana`	Orang	293287	0	<b>293287</b>	<b>0.00%</b>
	3 . Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana,	Orang	12988	9430	<b>3558</b>	<b>72.61%</b>



	<b>melalui media sosial dan wahana multimedia)</b>					
	4 . Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	Unit	46	41	5	89.13%
2 .	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)</b>					78.08%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>				-80%	58.08%
			<b>Jumlah Total</b>	<b>Jumlah Total</b>	<b>Yang Belum</b>	
			<b>Yang Harus Dilayani</b>	<b>Yang Terlayani</b>	<b>Terlayani</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	Orang	12988	9430	3558	72.61%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)</b>				-20%	20.00%
			<b>Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi</b>	<b>Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi</b>	<b>Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi</b>	
	<b>B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI</b>					100.00%
	1 . Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, .... dll)	Unit	76	76	0	100.00%
	2 . Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang	Orang	12	12	0	100.00%



	berada di kawasan rawan bencana)					
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)					-100% 100.00%
PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)						-80%
			Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum	
			Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	
	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :	Orang	0	0	0	
PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU LAYANAN DASAR (20%)						-20% 20.00%
			Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	Jumlah Mutu Yang Terlayani / Terpenuhi	Mutu Yang Belum Terlayani / Terpenuhi	
	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI					100.00%

Sumber: e-SPM Kemendagri

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari table di atas bisa di berikan penjelasan untuk Jenis Layanan SPM urusan Trantibumlinmas terdapat indikator yang tidak terpenuhi sebagai berikut:

1. Indikator pelayanan ketentraman dan ketertiban umum

Untuk jumlah total target warga yang dilayani sebesar 128 orang dan jumlah warga yang terlayani sebesar 128 orang atau 100% warga yang terlayani sesuai target. Dengan capaian 96% Capaian untuk indikator ini belum sesuai target yang ditetapkan, karena ada mutu layanan yang tidak terpenuhi yaitu:

- a. Pada mutu layanan dasar Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkara (jumlah dan kualitas barang dan jasa : perlengkapan perorangan, kendaraan operasional jenis offroad/jeep, kendaraan operasional jenis truk kecil, kendaraan operasional roda dua, gedung kantor, perlengkapan operasional) total capaian untuk tahun 2024 sebesar 80% dengan target 30 unit sarana prasarana hanya terpenuhi 24 unit, dengan demikian ada kekurangan jumlah mutu sebanyak 6 unit.



- b. Pada mutu layanan dasar Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam bentuk dokumen yang sah dan legal tidak ada dokumen yang di upload pada aplikasi, sehingga capaian untuk tahun 2024 sebesar 0%, dari target tahun 2024 sebanyak 1 dokumen.
- c. Untuk mutu layanan dasar lainnya sudah mencapai 100% sehingga sesuai target yang ditetapkan

## 2. Indikator Pelayanan Informasi Rawan Bencana.

Untuk jumlah total target bwarga yang dilayani sebesar 12.988 orang dan jumlah warga yang terlayani sebesar 9.430 orang atau 72,61% warga yang terlayani belum sesuai target yang ditetapkan. Dengan capaian 71,17% indikator ini belum sesuai target yang ditetapkan, karena ada mutu layanan yang tidak terpenuhi yaitu:

- a. Untuk mutu layanan dasar Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana total capaian untuk tahun 2024 sebesar 0% dengan target 293.287 orang yang dilayani.
- b. Untuk mutu layanan dasar Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia) total capaian 72,61% dengan target 12.988 orang yang dilayani untuk tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 9.430 orang yang dilayani.
- c. Untuk mutu layanan dasar Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana total capaian 89,13% dengan target 46 unit rambu yang terpasang untuk tahun 2024 dengan realisasi sebanyak 41 rambu yang terpasang.

## 3. Indikator Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

Untuk jumlah total target bwarga yang dilayani sebesar 12.988 orang dan jumlah warga yang terlayani sebesar 9.430 orang atau 72,61% warga yang terlayani belum sesuai target yang ditetapkan.. Dengan capaian 78,08% indikator ini belum sesuai target yang ditetapkan, meskipun capaian mutu layanan dasar sudah terpenuhi semua atau 100%. Hal ini disebabkan karena untuk target waga yang dilayani tidak terpenuhi.



4. Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

Dikarenakan di kota Kediri pada tahun 2024 tidak ada bencana maka untuk indikator ini tidak dilaksanakan. Tetapi untuk OPD pengampu harus melengkapi beberapa form yang harus diupload pada sistem sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 100%

5. Indikator Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Untuk jumlah total target warga yang dilayani sebesar 462 orang dan jumlah warga yang terlayani sebesar 488 orang untuk capain 100% lebih pada aplikasi eSPM tertera 100% , dalam hal ini untuk indikator ini warga yang terlayani sesuai target. Dengan capaian 96,84% Capaian untuk indikator ini belum sesuai target yang ditetapkan, karena ada mutu layanan yang tidak terpenuhi yaitu:

- a. Waktu Tanggap (Response Time Rate) Bencana Kebakaran pada ditargetkan respon atas pengaduan pemadaman kebakaran paling lambat dalam 15 menit sampai ke tempat kejadian. Pada tahun 2024 dilakukan penanganan kedaruratan sebanyak 488 kali dengan rincian 49 penanganan kedaruratan diluar Wilayah Managemen Kebakaran (WMK), 439 penanganan kedaruratan dalam wilayah WMK Kota Kediri yang terdiri dari 349 kasus non kebakaran serta 90 kasus penanganan kebakaran dalam WMK, terdapat 6 kasus penanganan kebakaran dalam WMK Kota Kediri yang melebihi response time (15menit). Sehingga realisasi tingkat waktu tanggap bencana kebakaran adalah sebesar **93,33%** (84 kasus memenuhi respontime dibanding 90 kasus kebakaran dalam WMK dikali 100%) dari yang di targetkan sebesar 96,70%;
- b. Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.) dengan target 3 dokumen SOP untuk tahun 2024 terealisasi sebanyak 1 Dokumen SOP sehingga total capaian sebesar 33,33% dikarenakan keterbatasan SDM dan anggaran, sehingga penyusunan Dokumen Prosedur Operasional belum dapat dilengkapi;
- c. Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.) total capaian 83,33% dengan target 6 Unit sarana dan prasarana dan realisasi sebanyak 5 unit sarana prasarana;
- d. Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I) total capaian 92% dengan target 25 orang aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya dengan realisasi sebanyak 23 orang pada tahun 2024;



- e. Untuk mutu layanan dasar lainnya sudah mencapai 100% sehingga sesuai target yang ditetapkan.

#### 4.5.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Tahun 2024 sebesar Rp. 14,170,829,960-, dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	0
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	14,170,829,960
	<b>APBD</b>	14,120,829,960
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	5,203,850,260
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	8,916,979,700
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	50,000,000

#### 4.5.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2024 didukung oleh:

1. Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Ket
ASN =	II = 1 III = 2 IV = 1 V = -	3	35 Personil	Total ASN Satpol PP = 42 personil
Non ASN =	117	-	117 Personil	Total Non ASN Satpol PP = 117 personil



## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah Pegawai	Struktural/ Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Ket
ASN =	II = 0 III = 1 IV = 1	7		
Non ASN=		18		

## 3. Pemadam Kebakaran

Jumlah Pegawai	Struktural / Eselon	Jabatan Fungsional	Jumlah Staf	Ket
ASN =	II = - III = - IV = 1	17	3 personil	Total ASN Damkar = 21 personil
Non ASN =	3	-	3 personil	Total Non ASN Damkar = 3 personil

### 4.5.6 Permasalahan dan Solusi

#### Permasalahan dan Solusi pada Jenis Pelayanan

##### 1. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM)

###### Permasalahan

Damkar Kota Kediri belum memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur berupa Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Dokumen SOP Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang di sahkan oleh kepala daerah ataupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

###### Solusi

Mengusulkan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur berupa Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Dokumen SOP Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang di sahkan oleh kepala daerah ataupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

##### 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)

###### Permasalahan



Belum melakukan pendataan warga negara yang berada di Kawasan risiko bencana

Solusi

Segera melakukan pendataan berdasarkan peta kajian risiko bencana yang telah disahkan

## 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)

Permasalahan

Belum melakukan penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan untuk pelaksanaan SPM Sub-Urusan Bencana

Solusi

Segera melakukan penghitungan kebutuhan dan perencanaan pemenuhan untuk pelaksanaan SPM Sub-urusan bencana

## 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)

Permasalahan

Form pendataan tidak sinkron dengan penetapan bencana

Solusi

Dalam 5 tahun terakhir, di kota kediri tidak terjadi bencana, sehingga Form pendataan yang terkait dengan bencana agar tidak dimunculkan yang mempengaruhi capaian penilaian.

### 1. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Permasalahan

Damkar Kota Kediri belum memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur berupa Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Dokumen SOP Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang di sahkan oleh kepala daerah ataupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri

Solusi

Mengusulkan penyusunan dokumen Standar Operasional Prosedur berupa Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) dan Dokumen SOP Managemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG) yang di sahkan oleh kepala daerah ataupun Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri



## 4.6 Urusan Sosial

### 4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia telantar di Luar Panti
- Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan pengemis di Luar Panti
- Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota

### 4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar Panti	100 %	Setiap Tahun
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya gelandangan dan penge, is di luar panti	Jumlah Warga negara/ gelandangan dan pengeis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %	Setiap Tahun
5.	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah warga negara korban bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan Jaminan Sosial	100 %	Setiap Tahun

### 4.6.3 Realisasi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Capaian Indikator SPM Tahun 2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar	100 %



		panti	
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah Anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
3.	Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %
4.	Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara / gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap paska bencana bagi korban bencana Kab/Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana Kab/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100 %

Perhitungan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	SATUAN	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT			TOTAL PENCAPAIAN
			-4	-5	-6	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
	<b>KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM</b>					100.00%
1.	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>YANG BELUM TERLAYANI</b>	<b>80.00%</b>
			<b>YANG HARUS DILAYANI</b>	<b>YANG TERLAYANI</b>	<b>TERLAYANI</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	ORANG	358	358	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM</b>		<b>JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI</b>	<b>JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI / TERPENUHI</b>	<b>MUTU YANG BELUM TERLAYANI / TERPENUHI</b>	100.00%



1 . LAYANAN DATA DAN PENGADUAN	ORANG	90	90	0	100.00%
LAYANAN DATA YANG DIBERIKAN KEPADA DISABILITAS TERLANTAR UNTUK DIUSULKAN MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS), LAYANAN PENGADUAN MERUPAKAN SARANA UNTUK MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI INFORMASI BERUPA PENGADUAN, KELUHAN, DAN/ATAU PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL					
2 . PENYEDIAAN PERMAKAMAN	ORANG	80	80	0	100.00%
(LAYANAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN DAN DISESUAIKAN DENGAN INDEKS PERMAKAMAN/ORANG/HARI)					
3 . PENYEDIAAN LAYANAN KEDARURATAN/LAYANAN REAKSI CEPAT	ORANG	49	49	0	100.00%
(MERUPAKAN TINDAKAN PENANGANAN SEGERA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA DISABILITAS TERLANTAR)					
4 . PENYEDIAAN SANDANG	ORANG	10	10	0	100.00%
(BERUPA PEMBELIAN PAKAIAN, PEMBELIAN PERLENGKAPAN MANDI, PEMBELIAN KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DEWASA, BALITA, DAN YANG MENGALAMI BEDRIDDEN, PEMBELIAN ALAS KAKI DAN KEBUTUHAN LAINNYA)					
5 . PENYEDIAAN ALAT BANTU	ORANG	65	65	0	100.00%
(KURSI RODA, KACA MATA, PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN, ALAT BANTU					



DENGAR, KRUK, TRIPOD, TONGKAT PUTIH, TONGKAT PENUNTUN ADAPTIF, REGLET/ALAT TULIS UNTUK TUNA NETRA DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENERIMA DISABILITAS)					
<b>6 . PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN</b> (OBAT UMUM, TIMBANGAN, PENGUKUR TINGGI BADAN, TERMOMETER DAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN)	ORANG	24	24	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>7 . PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL</b> BIMBINGAN FISIK ADALAH KEGIATAN UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN JASMANI PENERIMA PELAYANAN/OLAHRAGA/OUTBO UND/GYM; BIMBINGAN MENTAL DAN SPIRITUAL ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN MENTAL DAN SPIRITUAL; BIMBINGAN SOSIAL ADALAH LAYANAN BANTUAN PSIKOLOGIS YANG DITUJUKAN MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL AGAR DAPAT MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL (SEPERTI PEKERJA SOSIAL, ALAT PERAGA, ALAT TULIS)	ORANG	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
<b>8 . PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR</b> (PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL, DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN, DAN/ATAU DI LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT)	ORANG	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>



	<b>9 . FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/BUKTI KEPEMILIKAN NIK</b>	ORANG	70	70	0	100.00%
	<b>10 . AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR</b>	ORANG	24	24	0	100.00%
	(FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS/KLINIK/RUMAH SAKIT)					
	<b>11 . PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA/BUKTI KEBERADAAN KELUARGA</b>	ORANG	15	15	0	100.00%
	(PENCARIAN KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR UNTUK TUJUAN REUNIFIKASI)					
	<b>12 . PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA</b>	ORANG	28	28	0	100.00%
	(PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DENGAN KELUARGA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERAWATAN DAN/ATAU PENDAMPINGAN SEHINGGA BERADA DI LINGKUNGAN YANG TERLINDUNGI)					
	<b>13 . LAYANAN RUJUKAN</b>	ORANG	90	90	0	100.00%
	(LAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN LEBIH LANJUT DAN LAYANAN LAINNYA)					
<b>2 .</b>	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI LUAR PANTI</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>YANG BELUM TERLAYANI</b>	<b>80.00%</b>
			<b>YANG HARUS DILAYANI</b>	<b>YANG TERLAYANI</b>	<b>TERLAYANI</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	ORANG	104	104	0	100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>



B. JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM		JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI	JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI / TERPENUHI	MUTU YANG BELUM TERLAYANI / TERPENUHI	100.00%
<p><b>1 . LAYANAN DATA DAN PENGADUAN</b></p> <p>LAYANAN DATA YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK TERLANTAR UNTUK DIUSULKAN MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS); LAYANAN PENGADUAN MERUPAKAN SARANA UNTUK MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI INFORMASI BERUPA PENGADUAN, KELUHAN, DAN/ATAU PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL</p>	ORANG	90	90	0	100.00%
<p><b>2 . PENYEDIAAN LAYANAN KEDARURATAN/LAYANAN REAKSI CEPAT</b></p> <p>(MERUPAKAN TINDAKAN PENANGANAN SEGERA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA ANAK TERLANTAR)</p>	ORANG	49	49	0	100.00%
<p><b>3 . PENYEDIAAN PERMAKAMAN</b></p> <p>(LAYANAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN DAN DISESUAIKAN DENGAN INDEKS PERMAKAMAN/ORANG/HARI)</p>	ORANG	3	3	0	100.00%
<p><b>4 . PENYEDIAAN SANDANG</b></p> <p>(BERUPA PEMBELIAN PAKAIAN, PEMBELIAN PERLENGKAPAN MANDI, PEMBELIAN KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DEWASA, BALITA, DAN YANG</p>	ORANG	50	50	0	100.00%



	MENGALAMI BEDRIDDEN, PEMBELIAN ALAS KAKI DAN KEBUTUHAN LAINNYA)					
	<b>5 . PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN</b> (OBAT UMUM, TIMBANGAN, PENGUKUR TINGGI BADAN, TERMOMETER DAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN)	ORANG	10	10	0	100.00%
	<b>6 . PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL</b> BIMBINGAN FISIK ADALAH KEGIATAN UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN JASMANI PENERIMA PELAYANAN/OLAHRAGA/OUTBO UND/GYM; BIMBINGAN MENTAL DAN SPIRITUAL ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN MENTAL DAN SPIRITUAL; BIMBINGAN SOSIAL ADALAH LAYANAN BANTUAN PSIKOLOGIS YANG DITUJUKAN MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL AGAR DAPAT MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL (SEPERTI PEKERJA SOSIAL, ALAT PERAGA, ALAT TULIS)	ORANG	70	70	0	100.00%
	<b>7 . PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA ANAK TERLANTAR</b> (PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA ANAK TERLANTAR SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL, DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN, DAN/ATAU DI LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT)	ORANG	20	20	0	100.00%
	<b>8 . FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/BUKTI KEPEMILIKAN NIK</b>	ORANG	20	20	0	100.00%



	<b>9 . AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR</b>	ORANG	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	(FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS/KLINIK/RUMAH SAKIT)					
	<b>10 . PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA/BUKTI KEBERADAAN KELUARGA</b>	ORANG	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	(PENCARIAN KELUARGA ANAK TERLANTAR UNTUK TUJUAN REUNIFIKASI)					
	<b>11 . PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA</b>	ORANG	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	(PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI ANAK TERLANTAR DENGAN KELUARGA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERAWATAN DAN/ATAU PENDAMPINGAN SEHINGGA BERADA DI LINGKUNGAN YANG TERLINDUNGI)					
	<b>12 . LAYANAN RUJUKAN</b>	ORANG	10	10	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	(LAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA ANAK TERLANTAR YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN LEBIH LANJUT DAN LAYANAN LAINNYA)					
<b>3 .</b>	<b>REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>YANG BELUM TERLAYANI</b>	<b>80.00%</b>
			<b>YANG HARUS DILAYANI</b>	<b>YANG TERLAYANI</b>	<b>TERLAYANI</b>	
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	ORANG	716	716	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>					<b>20.00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM</b>		<b>JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI /</b>	<b>JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI / TERPENUHI</b>	<b>MUTU YANG BELUM TERLAYANI / TERPENUHI</b>	100.00%



			DIPENUHI			
	<b>1 . LAYANAN DATA DAN PENGADUAN</b>	ORANG	716	716	0	100.00%
	LAYANAN DATA YANG DIBERIKAN KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR UNTUK DIUSULKAN MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS); LAYANAN PENGADUAN MERUPAKAN SARANA UNTUK MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI INFORMASI BERUPA PENGADUAN, KELUHAN, DAN/ATAU PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL					
	<b>2 . PENYEDIAAN LAYANAN KEDARURATAN/LAYANAN REAKSI CEPAT</b>	ORANG	49	49	0	100.00%
	(MERUPAKAN TINDAKAN PENANGANAN SEGERA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR)					
	<b>3 . PENYEDIAAN PERMAKAMAN</b>	ORANG	672	672	0	100.00%
	(LAYANAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN DAN DISESUAIKAN DENGAN INDEKS PERMAKAMAN/ORANG/HARI)					
	<b>4 . PENYEDIAAN SANDANG</b>	ORANG	1	1	0	100.00%
	(BERUPA PEMBELIAN PAKAIAN, PEMBELIAN PERLENGKAPAN MANDI, PEMBELIAN KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DEWASA, BALITA, DAN YANG MENGALAMI BEDRIDDEN, PEMBELIAN ALAS KAKI DAN KEBUTUHAN LAINNYA)					
	<b>5 . PENYEDIAAN ALAT BANTU</b>	ORANG	1	1	0	100.00%



(KURSI RODA, KACA MATA, PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN, ALAT BANTU DENGAR, KRUK, TRIPOD, TONGKAT PUTIH, TONGKAT PENUNTUN ADAPTIF, REGLET/ALAT TULIS UNTUK TUNA NETRA DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENERIMA DISABILITAS)					
<b>6 . PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN</b>	ORANG	3	3	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
(OBAT UMUM, TIMBANGAN, PENGUKUR TINGGI BADAN, TERMOMETER DAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN)					
<b>7 . PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL</b>	ORANG	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
BIMBINGAN FISIK ADALAH KEGIATAN UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN JASMANI PENERIMA PELAYANAN/OLAHRAGA/OUTBO UND/GYM; BIMBINGAN MENTAL DAN SPIRITUAL ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN MENTAL DAN SPIRITUAL; BIMBINGAN SOSIAL ADALAH LAYANAN BANTUAN PSIKOLOGIS YANG DITUJUKAN MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL AGAR DAPAT MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL (SEPERTI PEKERJA SOSIAL, ALAT PERAGA, ALAT TULIS)					
<b>8 . PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA LANJUT USIA TERLANTAR</b>	ORANG	1	1	<b>0</b>	<b>100.00%</b>
(PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA LANJUT USIA TERLANTAR SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL, DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN,					



	DAN/ATAU DI LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT)					
	9 . FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN/BUKTI KEPEMILIKAN NIK	ORANG	10	10	0	100.00%
	10 . AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR (FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS/KLINIK/RUMAH SAKIT)	ORANG	10	10	0	100.00%
	11 . PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA/BUKTI KEBERADAAN KELUARGA (PENCARIAN KELUARGA LANJUT USIA TERLANTAR UNTUK TUJUAN REUNIFIKASI)	ORANG	10	10	0	100.00%
	12 . PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA (PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI LANJUT USIA TERLANTAR DENGAN KELUARGA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERAWATAN DAN/ATAU PENDAMPINGAN SEHINGGA BERADA DI LINGKUNGAN YANG TERLINDUNGI)	ORANG	10	10	0	100.00%
	13 . LAYANAN RUJUKAN (LAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA LANJUT USIA TERLANTAR YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN LEBIH LANJUT DAN LAYANAN LAINNYA)	ORANG	20	20	0	100.00%
4 .	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI					100.00%
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)		JUMLAH TOTAL	JUMLAH TOTAL	YANG BELUM TERLAYANI	80.00%
			YANG HARUS DILAYANI	YANG TERLAYANI	TERLAYANI	



	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	ORANG	243	243	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>20.00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM</b>		<b>JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI</b>	<b>JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI / TERPENUHI</b>	<b>MUTU YANG BELUM TERLAYANI / TERPENUHI</b>	100.00%	
	<b>1 . LAYANAN DATA DAN PENGADUAN</b>	ORANG	80	80	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	LAYANAN DATA YANG DIBERIKAN KEPADA TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS TERLANTAR UNTUK DIUSULKAN MASUK DALAM DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS); LAYANAN PENGADUAN MERUPAKAN SARANA UNTUK MENERIMA DAN MENINDAKLANJUTI INFORMASI BERUPA PENGADUAN, KELUHAN, DAN/ATAU PERTANYAAN YANG DISAMPAIKAN OLEH MASYARAKAT KEPADA DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL						
	<b>2 . PENYEDIAAN LAYANAN KEDARURATAN/LAYANAN REAKSI CEPAT</b>	ORANG	49	49	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	LAYANAN KEDARURATAN/LAYANAN REAKSI CEPAT MERUPAKAN TINDAKAN PENANGANAN SEGERA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS						
	<b>3 . PENYEDIAAN PERMAKANAN</b>	ORANG	3	3	<b>0</b>	<b>100.00%</b>	
	(LAYANAN YANG DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DAN/ATAU DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN DAN DISESUAIKAN DENGAN						



INDEKS PERMAKAPAN/ORANG/HARI)					
<b>4 . PENYEDIAAN SANDANG</b> (BERUPA PEMBELIAN PAKAIAN, PEMBELIAN PERLENGKAPAN MANDI, PEMBELIAN KEBUTUHAN KHUSUS UNTUK PEREMPUAN DEWASA, BALITA, DAN YANG MENGALAMI BEDRIDDEN, PEMBELIAN ALAS KAKI DAN KEBUTUHAN LAINNYA)	ORANG	3	3	0	100.00%
<b>5 . PENYEDIAAN PERBEKALAN KESEHATAN</b> (OBAT UMUM, TIMBANGAN, PENGUKUR TINGGI BADAN, TERMOMETER DAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN)	ORANG	3	3	0	100.00%
<b>6 . PEMBERIAN BIMBINGAN FISIK, MENTAL, SPIRITUAL DAN SOSIAL</b> BIMBINGAN FISIK ADALAH KEGIATAN UNTUK MEMELIHARA DAN MENINGKATKAN KESEHATAN JASMANI PENERIMA PELAYANAN/OLAHRAGA/OUTBO UND/GYM; BIMBINGAN MENTAL DAN SPIRITUAL ADALAH KEGIATAN YANG DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN MENTAL DAN SPIRITUAL; BIMBINGAN SOSIAL ADALAH LAYANAN BANTUAN PSIKOLOGIS YANG DITUJUKAN MENGATASI MASALAH PSIKOSOSIAL AGAR DAPAT MENINGKATKAN KEBERFUNGSIAN SOSIAL (SEPERTI PEKERJA SOSIAL, ALAT PERAGA, ALAT TULIS)	ORANG	12	12	0	100.00%
<b>7 . PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA GELANDANGAN DAN PENGEMIS</b> (PEMBERIAN BIMBINGAN SOSIAL KEPADA KELUARGA GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA MASYARAKAT DILAKUKAN OLEH DINAS SOSIAL, DAN DIFASILITASI MELALUI LEMBAGA YANG DITETAPKAN OLEH DINAS SOSIAL DI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKEDUDUKAN DI	ORANG	1	1	0	100.00%



	DESA/KELURAHAN/NAMA LAIN, DAN/ATAU DI LINGKUNGAN KELUARGA/MASYARAKAT)					
	<b>8 . FASILITASI PEMBUATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, KARTU TANDA PENDUDUK, AKTA KELAHIRAN, SURAT NIKAH, DAN/ATAU KARTU IDENTITAS ANAK / BUKTI DOKUMEN KEPENDUDUKAN</b>	ORANG	10	10	0	100.00%
	<b>9 . AKSES KE LAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DASAR</b>	ORANG	1	1	0	100.00%
	(FASILITASI LAYANAN PENDIDIKAN SEKOLAH DAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS/KLINIK/RUMAH SAKIT)					
	<b>10 . PEMBERIAN PELAYANAN PENELUSURAN KELUARGA/BUKTI KEBERADAAN KELUARGA</b>	ORANG	34	34	0	100.00%
	(PENCARIAN KELUARGA GELANDANGAN DAN PENGEMIS UNTUK TUJUAN REUNIFIKASI)					
	<b>11 . PEMBERIAN PELAYANAN REUNIFIKASI KELUARGA</b>	ORANG	30	30	0	100.00%
	(PEMULANGAN DAN PENYATUAN KEMBALI GELANDANGAN DAN PENGEMIS DENGAN KELUARGA YANG DAPAT MEMBERIKAN PERAWATAN DAN/ATAU PENDAMPINGAN SEHINGGA BERADA DI LINGKUNGAN YANG TERLINDUNGI)					
	<b>12 . LAYANAN RUJUKAN</b>	ORANG	40	40	0	100.00%
	(LAYANAN YANG DIBERIKAN KEPADA GELANDANGAN DAN PENGEMIS YANG MEMBUTUHKAN LAYANAN LEBIH LANJUT DAN LAYANAN LAINNYA)					
<b>5 .</b>	<b>PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT TANGGAP DARURAT DAN PASKA BENCANA BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA</b>					100.00%
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)</b>		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>YANG BELUM</b>	<b>80.00%</b>



			YANG HARUS DILAYANI	YANG TERLAYANI	TERLAYANI		
	<b>A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI :</b>	ORANG	20	20	0	100.00%	
	<b>PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)</b>						<b>20.00%</b>
	<b>B. JUMLAH MUTU BARANG / JASA / SDM</b>		<b>JUMLAH MUTU YANG HARUS DILAYANI / DIPENUHI</b>	<b>JUMLAH MUTU YANG TERLAYANI / TERPENUHI</b>	<b>MUTU YANG BELUM TERLAYANI / TERPENUHI</b>	100.00%	
	<b>1 . PENYEDIAAN PERMAKINAN</b> (PENYEDIAAN PERMAKINAN SECARA KESELURUHAN UNTUK KORBAN BENCANA ALAM, BENCANA SOSIAL DAN BENCANA NON-ALAM DALAM BENTUK BAHAN MAKANAN DAN MAKANAN SIAP SAJI DAN/ATAU MAKANAN LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN)	ORANG	20	20	0	100.00%	
	<b>2 . PENYEDIAAN SANDANG</b> (PAKAIAN LAKI-LAKI DEWASA, PAKAIAN DAN KEBUTUHAN KHUSUS PEREMPUAN DEWASA, PAKAIAN ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN, PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH ANAK LAKI-LAKI, PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH ANAK PEREMPUAN, PAKAIAN LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN, SELIMUT, DAN/ATAU KIDWARE DAN PENYEDIAAN LAINNYA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN)	ORANG	1	1	0	100.00%	
	<b>3 . PENYEDIAAN TEMPAT PENAMPUNGAN PENGUNSI</b> (TENDA PENGUNSI, TENDA KELUARGA, TENDA DAPUR UMUM, TENDA GULUNG, TENDA LOGISTIK, VELTBED, MATRAS/TIKAR/ALAS TIDUR, DAN/ATAU KELENGKAPAN TEMPAT PENAMPUNGAN SEMENTARA LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN)	UNIT	1	1	0	100.00%	
	<b>4 . PENANGANAN KHUSUS BAGI KELOMPOK RENTAN</b>	ORANG	1	1	0	100.00%	



(MERUPAKAN BANTUAN KHUSUS YANG DIBERIKAN KEPADA LANJUT USIA, IBU HAMIL, PENYANDANG DISABILITAS, DAN ANAK SEPERTI POPOK, SUSU, TOILET KHUSUS DISABILITAS DSB.)					
<b>5 . PELAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL</b> (UPAYA/DUKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH INDIVIDU, KELOMPOK/KOMUNITAS DILUAR DIRI DALAM SEBUAH INTERAKSI SOSIAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI YANG PENUH KASIH SAYANG, CINTA, PERLINDUNGAN DAN MEMBANTU PENYESUAIAN DIRI TERHADAP MASALAH/SITUASI SULIT YANG DIHADAPI, SEPERTI TERAPI KEJIWAAN, EDUKASI ANAK, HIBURAN/TRAUMA HEALING, DSB.)	ORANG	5	5	<b>0</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : e SPM Kemendagri

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1 Indikator rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti  
Total capaian untuk tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100% berarti untuk indikator mutu .yang mendukung sudah tercapai sesuai target
- 2 Indikator rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti  
Total capaian untuk tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100% berarti untuk indikator mutu .yang mendukung sudah tercapai sesuai target.
- 3 Indikator rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti  
Total capaian untuk tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100% berarti untuk indikator mutu .yang mendukung sudah tercapai sesuai target
- 4 Indikator rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti.  
Total capaian untuk tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100% berarti untuk indikator mutu .yang mendukung sudah tercapai sesuai target
- 5 Indikator perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.  
Total capaian untuk tahun 2024 adalah 100% dengan capaian 100% berarti untuk indikator mutu .yang mendukung sudah tercapai sesuai target.



#### 4.6.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial pada Tahun 2024 sebesar 8.039.836.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KOTA KEDIRI	1,795,299,191,714
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	26,899,995,154
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	9,910,805,000
	<b>APBD</b>	9,910,805,000
	A. APBD MURNI	1,318,805,000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	8,592,000,000
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	<b>NON APBD</b>	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	<b>APBN</b>	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	<b>DANA LAINNYA</b>	0

#### 4.6.5 Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Kota Kediri tahun 2023 sejumlah 41 orang PNS dan 22 orang non PNS.



#### 4.6.6 Permasalahan dan Solusi

1. Jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti

Masalah

Beberapa Disabilitas yang ada di Kota Kediri dalam kondisi tidak potensial, dimana penderita disabilitas berat yang tidak memungkinkan di berikan upaya peningkatan kompetensi.

Solusi

Penyediaan biaya hidup bagi ODKB

2. Jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti

Masalah

Penemuan anak / bayi yang dibuang oleh orang tua.

Solusi

Pengiriman ke panti yang ada di Provinsi Jawa Timur

3. Jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti

Masalah

Lansia yang tidak punya keluarga dan dalam kondisi tidak bisa mandiri.

Solusi Penempatan di barak dan pengiriman ke Panti

4. Jenis layanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti

Masalah

Karakteristik Gelandangan dan pengemis yang berasal dari luar daerah dan tidak mempunyai identitas menyulitkan pemberian layanan kepada yang bersangkutan.

Solusi

Dinas Sosial Kota Kediri menjalin kerjasama dengan pemerintah kab/kota lain dan juga provinsi dalam penanganan gelandangan dan pengemis.

Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil juga menjadi strategi penanganan gepeng, khususnya yang berstatus T4.

Disamping itu, pemanfaatan shelter atau barak penampungan PMKS juga pendukung pemberian layanan bagi Gelandangan dan pengemis.

5. Jenis layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Masalah



Secara umum pada tahun 2024, di Kota Kediri tidak terjadi bencana alam maupun bencana sosial yang ditetapkan dengan status kejadian bencana oleh Walikota Kediri. Adapun yang diberikan layanan kebencanaan tahun 2024 berupa korban kebakaran, banjir insidental setelah turun hujan lebat dan pengantaran jenazah untuk keluarga miskin.

Solusi

Sebagai persiapan untuk penanganan kejadian bencana baik alam maupun sosial yang sewaktu waktu bisa terjadi, Dinas Sosial melakukan berbagai upaya mitigasi. Baik untuk pencegahan maupun penanganan kejadian darurat, terutama kesiapsiagaan tenaga atau relawan melalui peningkatan kapasitas tagana yang ada di Kota Kediri.

## 4.7 Program dan Kegiatan

### 4.7.1 Urusan Pendidikan

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				106,460,200,32	98,499,558,97	92.52%
				1	3		
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			106,460,200,32	98,499,558,97	92.52%	
				1	3		
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar K20240327110629		47,113,232,513	43,138,177,44	91.56%	
					9		
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%	
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	300,000,000	0	0%	
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	86,796,925	83,295,627	95.97%	
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%	
	5	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	370,000,000	370,000,000	100.00%	
	6	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%	
	7	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	998,925,197	848,292,682	84.92%	



	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	140,858,200	53,310,680	37.85%
	9	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	581,440,000	546,821,952	94.05%
	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	11	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
	12	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	13	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	14	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	900,000,000	881,188,200	97.91%
	15	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	0	0	0%
	16	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	110,000,000	106,707,200	97.01%
	17	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	1,108,656,000	1,047,639,472	94.50%
	18	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	4,802,700,000	4,678,793,000	97.42%
	19	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	31,800,000	31,506,780	99.08%
	20	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	524,204,002	502,392,100	95.84%
	21	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	23,849,662,330	23,844,428,186	99.98%
	22	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang	374,602,000	354,135,065	94.54%



	2 3	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	1,289,724,125	957,262,019	74.22%
	2 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang	0	0	0%
	2 5	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	2 6	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Orang	0	0	0%
	2 7	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	15,900,000	15,772,320	99.20%
	2 8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	15,900,000	15,772,320	99.20%
	2 9	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	15,900,000	15,772,320	99.20%
	3 0	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	391,260,000	387,429,800	99.02%
	3 1	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	417,466,825	358,105,523	85.78%
	3 2	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	3 3	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	3 4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	3 5	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	3 6	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	3 7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,224,250,500	1,190,311,386	97.23%



	3	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	3,778,000,000	3,241,097,589	85.79%
	8					
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	344,752,543	332,639,105	96.49%
	9					
	4	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	25,095,000	20,899,560	83.28%
	0					
	4	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	132,400,000	114,336,320	86.36%
	1					
	4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	5,282,938,866	3,140,268,243	59.44%
	2					
	JUMLAH INDIKATOR			47,113,232,513	43,138,177,449	91.56%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama K20240327110647		20,934,672,808	18,351,812,092	87.66%
	1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
	2	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	3	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	179,315,000	153,139,580	85.40%
	4	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	5	Pembangunan Laboratorium	Ruang	1,163,000,000	945,887,840	81.33%
	6	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	7	Pembangunan Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%
	8	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Unit	0	0	0%
	9	Pembangunan Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
	1	Pembangunan Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
	0					
	1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2,361,204,232	1,881,565,952	79.69%



	1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,132,118,400	2,282,204,301	72.86%
	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	111,899,800	44,713,524	39.96%
	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Ruang	1,010,103,400	569,400,232	56.37%
	1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjag a Sekolah	Unit	0	0	0%
	1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Unit	0	0	0%
	1 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Unit	0	0	0%
	2 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	496,422,396	297,925,172	60.01%
	2 1	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
	2 2	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	2 3	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	0	0	0%
	2 4	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	200,000,000	196,859,900	98.43%
	2 5	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	0	0	0%
	2 6	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	2 7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	285,850,000	251,915,210	88.13%



	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	297,809,600	279,645,945	93.90%
	29	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	2,456,700,000	2,397,531,000	97.59%
	30	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	21,800,000	21,506,160	98.65%
	31	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	97,300,000	87,944,400	90.38%
	32	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	5,712,900,000	5,712,900,000	100.00%
	33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang	35,400,000	34,436,300	97.28%
	34	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Ruang	335,398,610	276,277,655	82.37%
	35	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	0	0	0%
	36	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	37	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
	38	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	10,900,000	10,854,000	99.58%
	39	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	10,900,000	10,854,000	99.58%
	40	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	10,900,000	10,854,000	99.58%
	41	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan	Dokumen	17,200,000	16,193,440	94.15%



			Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan					
		4 2	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	5,200,000	4,931,460	94.84%	
		4 3	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%	
		4 4	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%	
		4 5	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%	
		4 6	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%	
		4 7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	93,800,000	89,078,120	94.97%	
		4 8	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%	
		4 9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	10,900,000	0	0%	
		5 0	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%	
		5 1	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	2,280,223,500	2,240,418,165	98.25%	
		5 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Unit	0	0	0%	
		5 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	597,427,870	534,775,736	89.51%	
		JUMLAH INDIKATOR			20,934,672,808	18,351,812,092	87.66%	
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) K20240327112412			18,399,808,600	17,646,332,350	95.90%	
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	561,894,000	557,767,219	99.27%	



	2	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Unit	840,082,600	619,834,098	73.78%
	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	104,132,000	102,830,003	98.75%
	4	Pengadaan Mebel PAUD	Paket	0	0	0%
	5	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Paket	0	0	0%
	6	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Paket	0	0	0%
	7	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta didik	0	0	0%
	8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	320,000,000	310,760,785	97.11%
	9	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	294,500,000	278,213,332	94.47%
	10	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	6,782,600,000	6,540,406,220	96.43%
	11	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	25,000,000	24,857,640	99.43%
	12	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	334,500,000	323,305,856	96.65%
	13	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	6,027,600,000	6,027,600,000	100.00%
	14	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang	40,000,000	36,302,580	90.76%
	15	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Unit	0	0	0%
	16	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang	0	0	0%



	17	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
	18	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	23,400,000	23,180,760	99.06%
	19	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	23,400,000	23,180,760	99.06%
	20	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	25,000,000	0	0%
	21	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	17,700,000	12,400,020	70.06%
	22	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	2,280,000,000	2,085,979,905	91.49%
	23	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	24	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	25	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	26	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	27	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	28	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
	29	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	30	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Ruang	0	0	0%
	31	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%



	32	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang	0	0	0%
	33	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	34	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
	35	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	36	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	700,000,000	679,713,172	97.10%
JUMLAH INDIKATOR				18,399,808,600	17,646,332,350	95.90%
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan K20240327112444			20,012,486,400	19,363,237,082	96.76%
	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
	2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	2,527,078,000	2,343,483,222	92.73%
	3	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Paket	44,670,000	44,440,350	99.49%
	4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	10,331,122,400	10,157,491,031	98.32%
	5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	5,000,000	0	0%
	6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	145,880,000	137,235,900	94.07%



	7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2,779,100,000	2,779,100,000	100.00%
	8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	9	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Unit	0	0	0%
	10	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang	0	0	0%
	11	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
	12	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
	13	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	14	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	5,200,000	0	0%
	15	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
	16	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Unit komunitas	0	0	0%
	17	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	18	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan	Orang	0	0	0%



		Nonformal/Kesetaraan				
	19	Penyediaan infrastruktur TIK	Paket	0	0	0%
	20	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang	0	0	0%
	21	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta didik	0	0	0%
	22	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	0	0	0%
	23	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
	24	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang	0	0	0%
	25	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
	26	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	75,000,000	74,632,659	99.51%
	27	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%
	28	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
	30	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
	31	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Paket	0	0	0%
	32	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	4,099,436,000	3,826,853,920	93.35%
	33	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang	0	0	0%
	34	Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	0	0	0%
	35	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	0	0	0%



	36	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				20,012,486,400	19,363,237,082	96.76%
JUMLAH PROGRAM				106,460,200,321	98,499,558,973	92.52%
KEGIATAN LAINNYA						
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA						

#### 4.7.2 Urusan Kesehatan

No	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				16,218,550,343	13,595,753,208	83.83%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				9,971,835,478	8,175,724,639	81.99%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota K2023237			9,971,835,478	8,175,724,639	81.99%
	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil		Orang	766,054,900	715,554,022	93.41%
	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin		Orang	292,106,900	290,529,667	99.46%
	3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir		Orang	1,446,526,308	300,790,233	20.79%
	4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita		Orang	747,265,800	723,731,489	96.85%
	5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		Orang	533,188,000	404,633,693	75.89%
	6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif		Orang	2,657,831,000	2,500,146,478	94.07%



		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	267,037,000	247,539,595	92.70%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	1,063,747,470	923,374,688	86.80%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	560,989,000	530,571,361	94.58%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	154,487,800	144,073,546	93.26%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	986,662,200	973,006,007	98.62%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	495,939,100	421,773,860	85.05%
	JUMLAH INDIKATOR				9,971,835,478	8,175,724,639	81.99%
	JUMLAH PROGRAM				9,971,835,478	8,175,724,639	81.99%
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINNYA						
		1	Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak		236,640,000	224,943,850	95.06%
		2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)		155,325,000	150,050,992	96.60%
		3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberculosis		123,100,000	119,654,293	97.20%



			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan		3,958,193,069	3,466,585,740	87.58%
		5	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman Fasilitas Kesehatan		78,672,600	73,907,364	93.94%
		6	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,694,784,196	1,384,886,330	81.71%

#### 4.7.3 Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	KOTA KEDIRI				18,464,622,500	15,455,480,500	83.70%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				1,440,000,000	1,048,193,500	72.79%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota K2023638			1,440,000,000	1,048,193,500	72.79%
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM		Dokumen	50,000,000	0	0%
	2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM		Dokumen	0	0	0%
	3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan		Liter/Detik	0	0	0%



	4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	0%
	6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	0	0	0%
	7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	0%
	8	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	0%
	9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0%
	11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	0%
	14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM	0	0	0%
	15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
	16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
	17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	0%
	18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%



19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	-	0	0	0%
20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	0%
21	Perbaiki SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	0%
22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
23	Peningkatan KapasitasKelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0%
24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	0	0	0%
25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Dokumen	0	0	0%
26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
27	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0%
28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Liter/Detik	0	0	0%
29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Unit	150,000,000	93,645,000	62.43%
30	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%



	31	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
	32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	1,240,000	954,548,500	76.98%
	33	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR				1,440,000	1,048,193,500	72.79%
JUMLAH PROGRAM				1,440,000	1,048,193,500	72.79%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			17,024,622,500	14,407,287,000	84.63%
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota K20240327112559			17,024,622,500	14,407,287,000	84.63%
	1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	0%



	7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0%
	9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	0%
	10	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	0%
	11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Dokumen	0	0	0%
	12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	0	0	0%
	13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0%
	14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0%
	18	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Unit	0	0	0%
	19	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Unit	0	0	0%
	20	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%



		Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat				
	21	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	22	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	24	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Unit	0	0	0%
	25	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	26	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Unit	0	0	0%
	27	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	28	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	29	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Unit	0	0	0%
	30	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%



	31	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	M <sup>3</sup> /Hari	16,684,100,000	14,208,739,900	85.16%
	32	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	0	0%
	34	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Desa	0	0	0%
	35	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Penyelenggara	50,000,000	34,427,200	68.85%
	36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	M <sup>3</sup> /Hari	0	0	0%
	37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit	0	0	0%
	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Unit	290,522,500	164,119,900	56.49%
	39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Rumah Tangga	0	0	0%
	40	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang	0	0	0%
	41	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			17,024,622,500	14,407,287,000	84.63%
	JUMLAH PROGRAM			17,024,622,500	14,407,287,000	84.63%
KEGIATAN LAINNYA						
3	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					



TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA

#### 4.7.4 Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN	
	-2	-3	-4		-6	-7		-8
	KOTA KEDIRI				0	0	0.00%	
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0	0	0.00%	
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023340			0	0	0.00%	
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
		2	Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan		Dokumen	0	0	0%
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani		Dokumen	0	0	0%
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana		Dokumen	0	0	0%
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus		Dokumen	0	0	0%
		7	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
		8	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
		9	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
		10	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Dokumen	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR					0	0	0.00%



2	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota K2023348			0	0	0.00%
	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
	3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha	0	0	0%
	4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	0	0	0%
	5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	7	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	8	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Rumah Tangga	0	0	0%
	9	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	10	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	11	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	12	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR			0	0	0.00%
	JUMLAH PROGRAM			0	0	0.00%
KEGIATAN LAINNYA						
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
TIDAK ADA DATA KEGIATAN LAINYA						



#### 4.7.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	-2	-3	-4		-5	-6	
	<b>KOTA KEDIRI</b>				<b>10,090,155,000</b>	<b>9,019,916,849</b>	<b>89.39%</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>789,805,000</b>	<b>682,313,639</b>	<b>86.39%</b>
	<b>1</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152</b>			<b>770,805,000</b>	<b>663,754,439</b>	<b>86.11%</b>
		<b>1</b>	<b>Penyediaan permakanan</b>	<b>Orang</b>	<u>201,625,000</u>	<u>188,125,143</u>	<b>93.30%</b>
		<b>2</b>	<b>Penyediaan sandang</b>	<b>Orang</b>	<u>15,000,000</u>	<u>0</u>	<b>0%</b>
		<b>3</b>	<b>Penyediaan alat bantu</b>	<b>Orang</b>	<u>60,000,000</u>	<u>0</u>	<b>0%</b>
		<b>4</b>	<b>Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga</b>	<b>Orang</b>	<u>5,000,000</u>	<u>0</u>	<b>0%</b>
		<b>5</b>	<b>Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial</b>	<b>Orang</b>	<u>444,230,000</u>	<u>435,632,856</u>	<b>98.06%</b>
		<b>6</b>	<b>Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat</b>	<b>Orang</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0%</b>
		<b>7</b>	<b>Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran,</b>	<b>Orang</b>	<u>0</u>	<u>0</u>	<b>0%</b>



			Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	0	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	44,950,000	39,996,440	88.98%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>770,805,000</b>	<b>663,754,439</b>	<b>86.11%</b>
	<b>2</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153</b>			<b>19,000,000</b>	<b>18,559,200</b>	<b>97.68%</b>
		1	Penyediaan makanan	Orang	9,000,000	8,880,000	98.67%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	6,000,000	5,794,200	96.57%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	0	0	0%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	4,000,000	3,885,000	97.13%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>19,000,000</b>	<b>18,559,200</b>	<b>97.68%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>				<b>789,805,000</b>	<b>682,313,639</b>	<b>86.39%</b>
<b>KEGIA TAN LAINN YA</b>							



2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA					
	1	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar, Sub Kegiatan Penjangkauan Anak Terlantar		5,000,000	2,878,550	57.57%
	2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial (Bansos ABH, Bansos ASLUT, Bansos BPNT-D, Bansos ODKB)		8,592,000,000	7,646,400,000	88.99%
	3	Program Penanganan Bencana, Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab./Kota		524,000,000	508,974,660	97.13%
	4	BTT		179,350,000	179,350,000	100.00%

#### 4.7.6 Urusan Sosial

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
	<b>KOTA KEDIRI</b>				<b>10,504,936,300</b>	<b>7,939,279,735</b>	<b>75.58%</b>
1	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>				<b>998,986,300</b>	<b>900,529,735</b>	<b>90.14%</b>



	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K2023152			530,000,000	435,755,407	82.22%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	329,470,800	297,280,454	90.23%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	0	0	0%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	4,000,000	2,400,000	60.00%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	11,698,000	11,583,906	99.02%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	83,302,000	81,895,210	98.31%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	4,000,000	0	0%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	15,529,200	14,646,080	94.31%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	12,000,000	4,000,000	33.33%



		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	4,500,000	0	0%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	65,500,000	23,949,757	36.56%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>530,000,000</b>	<b>435,755,407</b>	<b>82.22%</b>
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota K2023153			<b>468,986,300</b>	<b>464,774,328</b>	<b>99.10%</b>
		1	Penyediaan makanan	Orang	0	0	0%
		2	Penyediaan sandang	Orang	0	0	0%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	0	0	0%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	461,908,800	458,944,328	99.36%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7,077,500	5,830,000	82.37%
	<b>JUMLAH INDIKATOR</b>				<b>468,986,300</b>	<b>464,774,328</b>	<b>99.10%</b>
	<b>JUMLAH PROGRAM</b>				<b>998,986,300</b>	<b>900,529,735</b>	<b>90.14%</b>
<b>KEGIATAN LAINNYA</b>							
2	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA</b>						
		1	Penyediaan Alat Bantu dan Permakanan Belanja Tidak Terduga (BTT)		439,950,000	439,950,000	100.00%
		2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bansos BPNTD, Bansos ASLUT, Bansos ABH, Bansos ODKB)		9,066,000,000	6,598,800,000	72.79%



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dari penyelenggaraan urusan tersebut, dapat dilihat hasil dari capaian kinerja makro, Capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan baik urusan wajib dan pilihan, serta capaian kinerja fungsi penunjang Pemerintahan. Permasalahan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak tercapai dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan tahun anggaran 2024 menjadi masukan bagi penyelenggaraan pemerintahan tahun selanjutnya.

Pencapaian kemajuan-kemajuan tersebut diukur melalui hasil-hasil pembangunan Kota Kediri yang dapat dilihat dan dirasakan baik dalam perspektif pembangunan ekonomi maupun pembangunan manusia. Tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi secara makro dilihat dengan menggunakan indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pertumbuhan Pendapatan per Kapita, dan Tingkat Inflasi. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kita gunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia.

Jika dilihat dari hasil yang dicapai, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri selama tahun 2024 mencapai kinerja sangat baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, regulasi maupun anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kota Kediri mampu menunjukkan hasil kinerjanya yaitu dengan memperoleh penghargaan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional. Perolehan penghargaan tersebut tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerjasama dari berbagai pihak dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, serta seluruh lapisan masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan support dan partisipasi konstruktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kediri. Secara rinci, penghargaan yang telah diterima dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 5.1  
Penghargaan Tingkat Nasional dan Provinsi yang diterima oleh  
Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024

TAHUN 2024		
NO	Nama Penghargaan	Tingkat
1	10 besar Kota Toleran se-Indonesia Empat Tahun Berturut-turut menurut Setara Institut.	Nasional
2	Anugerah Pandu Negeri	Nasional
3	Sertifikat dan Piala Wahana Tata Nugraha	Nasional
4	Penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) Dalam Ajang Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 Indonesia Perlindungan Komsumen dan Tertib Niaga	Nasional
5	Top Hospitality Leader in Government and Public Policy pada ITTA Award	Nasional
6	Peringkat Pertama Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia dan Paling Berkelanjutan dalam Bidang Akses dan Mobilitas UI GreenCity Matric Award 2024	Nasional
7	penghargaan Universal Health Coverage Award Kategori Utama	Nasional
8	Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	Provinsi
9	Peringkat II Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di ajang e-Purchasing Awards Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur	Provinsi
10	Award Peduli Ketahanan Pangan Kategori Ketersediaan Pangan	Provinsi
11	peringkat 5 IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024	Provinsi



Diharapkan melalui dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Kediri Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan refleksi dan evaluasi terhadap tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Kediri sehingga dapat dilakukan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan dan anggota DPRD, seluruh *stakeholder*, serta seluruh jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri dan seluruh masyarakat Kota Kediri yang telah memberikan dukungan dan kerja keras dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan selama tahun 2024.

Demikian penyampaian LPPD Kota Kediri Tahun 2024 ini, Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi segala amal dan ikhtiar kita dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat Kota Kediri. *Aamiin. YRA*



# PEMERINTAH KOTA KEDIRI INSPEKTORAT

Jln. Sunan Ampel No. 1 Kel. Ngronggo Kec. Kota, Kota Kediri Jawa Timur  
Telp. (0354) 687305, Email : [inspektorat@kedirikota.go.id](mailto:inspektorat@kedirikota.go.id)

## LAPORAN HASIL REVIU

### ATAS

## LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)

### TAHUN 2024

Kepada : Yth. Walikota Kediri  
Dari : Inspektur Kota Kediri  
Tanggal : 6 Maret 2025  
Nomor : 700.1.2.8 / 383 / 419.060 / 2025  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.

Berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor : 100.3.3.3. / 33 / 419.033 / 2025 tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, dengan hormat dilaporkan hal - hal sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

##### A. Dasar Penugasan

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2029 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Surat Menteri Dalam Negeri No. 100.2.2.7/10582/OKDA Tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024.
8. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.1.7/1430/011.1/2025 Tanggal 13 Januari 2025 , perihal Penyusunan LPPD Kabupaten/Kota Tahun 2024.
9. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 100.3.3.3/31/419.003/2025 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Berbasis Risiko Tahun 2025;
10. Keputusan Walikota Kediri Nomor : 100.3.3.3. / 33 / 419.033 / 2025 tanggal 11 Pebruari 2025 tentang Tim Penyusun dan Tim Pereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024.
11. Surat dari Kepala Bagian Pemerintahan Kota Kediri Nomor : 100.1.6/126/419.011/ 2025 27 Februari 2025 perihal permohonan reviu LPPD Tahun 2024.
12. Surat Tugas Inspektur Kota Kediri Nomor : 700.1.2.8/343/419.060/ 2025 untuk melaksanakan reviu data dan dokumen pendukung atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

## B. Ruang Lingkup Reviu

- 1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
  - a. Capaian kinerja makro
    - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
    - Angka Kemiskinan
    - Angka Pengangguran
    - Pertumbuhan Ekonomi
    - Pendapatan Perkapita
    - Ketimpangan Pendapatan (GINI Ratio)
  - b. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan  
Diukur dari indikator kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - c. Capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah  
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 2) Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan



Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diterima oleh daerah kabupaten / kota dari pemerintah pusat dan / atau provinsi dari pemerintah daerah provinsi.

- 3) Capaian kinerja penerapan standar pelayanan minimal
  - a. Capaian penerapan standar pelayanan minimal
  - b. Kendala penerapan standar pelayanan minimal
  - c. Ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal

## II. Hasil Reviu

### A. Pencermatan kesesuaian materi dan sistematika draft LPPD

Berdasarkan hasil reviu kami pada draft dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2024, materi yang disajikan telah sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024 yang meliputi :

#### 1. Pada BAB I Pendahuluan

- Latar Belakang; 1.1.1. Penjelasan Umum; telah memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
  - a. undang - undang pembentukan daerah;
  - b. data geografis wilayah;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. jumlah kecamatan dan kelurahan;
  - e. jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah; dan
  - f. realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- 1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah, telah memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :
  - a. permasalahan strategis pemerintah daerah;
  - b. visi dan misi kepala daerah;
  - c. program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
  - d. kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan.
- 1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimal, telah memuat hal - hal terkait dasar pertimbangan penerapan standar pelayanan minimal, dasar penerapan standar pelayanan minimal, kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah



selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

## 2. Pada BAB II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

### – 2.1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro telah memuat capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

### – 2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan telah memuat gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah telah memuat data / informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing - masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data / informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

### – 2.3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah telah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat antara lain :

- a. target kinerja dalam perjanjian kinerja;
- b. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja;
- c. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya;
- d. pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah;
- e. analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai; dan
- f. analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

## 3. Pada Bab III Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan



Berisi tentang capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan yang diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program / kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

- 3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota Tugas pembantuan dari Kementerian / lembaga yang ditugaskan kepada daerah kabupaten / kota.
  - 3.1.1 Target Kinerja  
Target kinerja telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh Kementerian / lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen / lembar penugasan.
  - 3.1.2 Realisasi  
Realisasi telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten / kota atas pelaksanaan penugasan.
- 3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten / Kota Tugas pembantuan dari daerah provinsi yang ditugaskan kepada daerah kabupaten / kota.
  - 3.2.1 Target Kinerja  
Target kinerja telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh daerah provinsi atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan gubernur atau dokumen / lembar penugasan.
  - 3.2.2 Realisasi  
Realisasi telah memuat target program / kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh daerah kabupaten / kota atas pelaksanaan penugasan.
- 3.3. Permasalahan dan Kendala  
Permasalahan dan kendala sudah menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.
- 3.4. Saran dan Tindak Lanjut  
Saran dan tindak lanjut telah berisi masukan dan saran serta langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.



4. Pada Bab IV Penerapan Dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM). Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal pada Urusan Pendidikan; Urusan Kesehatan; Urusan Pekerjaan Umum; Urusan Perumahan Rakyat; Urusan Kententraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; Urusan Sosial dan urusan pada program serta kegiatan lainnya telah memuat antara lain :

#### 4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar telah memuat jenis - jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya oleh Pemerintah.

#### 4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian telah memuat target yang ditetapkan Pemerintah Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

#### 4.1.3. Realisasi

Realisasi telah memuat target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

#### 4.1.4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran telah memuat jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah, yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah.

#### 4.1.5. Dukungan Personil

Dukungan personil telah menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

#### 4.1.6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi telah menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

### 5. Penyajian Capaian Kinerja Makro

Penyajian capaian kinerja makro menggunakan indikator kinerja makro yang disajikan sebagai berikut :



No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,97	81,88	1,124
2	Angka Kemiskinan	7,15	6,51	-8,951
3	Angka Pengangguran	4,06	3,91	-3,695
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,92	3,43	78,646
5	Pendapatan Perkapita	541,07	565,84	4,578
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,4	0,337	-15,75

6. Penyajian Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan :

Materi yang disajikan pada IKK Keluaran, IKK Hasil dan IKK untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024.

7. Sedangkan untuk sistematika penyusunannya sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024, yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.1.1. Penjelasan Umum

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

1.1.3. Penerapan Standar Pelayanan Minimum

**BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

2.1 Capaian Kinerja Makro

2.1.1. Indeks Pembangunan Manusia

2.1.2. Angka Kemiskinan

2.1.3. Angka Pengangguran

2.1.4. Pertumbuhan Ekonomi

2.1.5. Pendapatan Perkapita

2.1.6. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

2.2.1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil



2.2.3. Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1. Tugas Pembantuan Pusat Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Kediri

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kota Kediri

3.3. Permasalahan Dan Kendala

BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1. Urusan Pendidikan

4.1.1. Jenis Pelayanan Dasar

4.1.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

4.1.3. Realisasi

4.1.4. Alokasi Anggaran

4.1.5. Dukungan Personil

4.1.6. Permasalahan dan Solusi

4.2. Urusan Kesehatan

4.2.1. Jenis Pelayanan Dasar

4.2.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

4.2.3. Realisasi

4.2.4. Alokasi Anggaran

4.2.5. Dukungan Personil

4.2.6. Permasalahan dan Solusi

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1. Jenis Pelayanan Dasar

4.3.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

4.3.3. Realisasi

4.3.4. Alokasi Anggaran

4.3.5. Dukungan Personil

4.3.6. Permasalahan dan Solusi

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1. Jenis Pelayanan Dasar

4.4.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah

4.4.3. Realisasi

4.4.4. Alokasi Anggaran



- 4.4.5. Dukungan Personil
- 4.4.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
  - 4.5.1. Jenis Pelayanan Dasar
  - 4.5.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
  - 4.5.3. Realisasi
  - 4.5.4. Alokasi Anggaran
  - 4.5.5. Dukungan Personil
  - 4.5.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.6. Urusan Sosial
  - 4.6.1. Jenis Pelayanan Dasar
  - 4.6.2. Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah
  - 4.6.3. Realisasi
  - 4.6.4. Alokasi Anggaran
  - 4.6.5. Dukungan Personil
  - 4.6.6. Permasalahan dan Solusi
- 4.7. Program Dan Kegiatan

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa materi dan sistematika pada draft Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 **sudah sesuai** dengan ketentuan yang berlaku dalam Pedoman Umum Penyusunan LPPD Tahun 2024.

### B. Pencermatan data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

- a. Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan
- b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan

Berdasarkan hasil reviu kami terhadap sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran data IKK didapatkan hasil sebagai berikut :



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.a.1	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD = 8202. Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 8706	94,210889	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.a.2	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 27854. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 27854	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.a.3	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 15469. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan = 15469	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.a.4	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang &nbsp;berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 1016. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 1016	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.1	Kesehatan	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1605. Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 301424	5,3247253	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.2	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 13. Jumlah RS di kabupaten/kota = 13	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.3	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 3659. Jumlah sasaran ibu bersalin di kabupaten/kota = 4669	78,367959	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.4	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 3821. Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 3821	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.5	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai	81,694608	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
		bayi baru lahir	standar = 3606. Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota = 4414				
1.b.6	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 16968. Jumlah balita di kabupaten/kota = 16968	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.7	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 39027. Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota = 39027	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.8	Kesehatan	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 193341. Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota = 193341	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.9	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 37476. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota = 40777	91,90475	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.10	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 18987. Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota = 18987	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.11	Kesehatan	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 8030. Jumlah penderita DM di kabupaten/kota = 8030	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.b.12	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 567. Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota = 567	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.b.13	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 7441. Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota = 7441	100	Ada	OK	sesuai
1.b.14	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 5280. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota = 5280	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 0. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha) = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m) = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 1.127. luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota = 1.708	65,983607	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.c.4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota. = 78.293. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 106.243	73,692384	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.5	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 78293. Jumlah rumah di Kabupaten A = 78293	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.6	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang sesuai peruntukannya = 42.916. Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku = 42.916	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.7	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 328.76. Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 388.2	84,688305	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.c.8.1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis = 128. Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota = 1.112	11510,791	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.c.8.2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 85. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 85	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.d.1	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 0. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.d.2	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.d.3	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	&nbsp; Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 10.57. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 137.61	7,6811278	Ada	OK	sesuai
1.d.4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1440. Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 59542	2,4184609	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.d.5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	&nbsp;Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 7158. Jumlah unit rumah kab/kota = 8172	87,591777	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.e.1	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani = 2124. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 2124	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.e.2	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 23. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 26	88,461539	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.e.3	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana = 9429. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan = 12987	72,603373	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.e.4	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana = 9.857. Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana = 12.987	75,898976	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.e.5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 27. Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana = 27	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.e.6	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota dalam tingkat = 84. Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota = 90	93,333333	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
1.e.7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	11,06	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.f.1	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti = 1421. Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis = 1421	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
1.f.2	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 20. Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota = 20	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.a.1	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota = 7	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.a.2	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 26380. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 33029	79,869206	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.a.3	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 94774080000. Jumlah tenaga kerja = 199426	47523432	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
2.a.4	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 51. Jumlah Perusahaan = 51	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.a.5	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari (pencari kerja) yang ditempatkan = 693. Jumlah pencari yang terdaftar = 1002	69,161677	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.g.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja operasi dan modal APBD = 354152986575. Jumlah seluruh belanja operasi dan modal APBD = 771890152018	45,881268	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.g.2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 19. Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 19	100	Ada	OK	sesuai
2.g.3	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 14. Jumlah penduduk perempuan = 151741	9,2262474	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.h.1	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota = 0. Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.i.1	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
2.i.2	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 0. Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.i.3	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) = 0. Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.i.4	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha; = 0. Jumlah penerima tanah obyek landreform = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.i.5	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah = 0. Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.i.6	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani = 0. Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan = 1	0	Ada	OK	Bukti telah sesuai
2.j.1	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		73,84	Ada	OK	Data telah sesuai
2.j.2	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 140160. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan kabupaten/kota = 141509	99,046704	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.j.3	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota = 0. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
2.k.1.1	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP = 225512. Jumlah penduduk 17 tahun ke atas = 225929	99,815429	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.k.1.2	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 79817. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 79846	99,96368	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.k.1.3	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 79997. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 80045	99,940034	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.k.1.4	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 19. Jumlah PD = 23	82,608696	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.l.1	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.l.2	Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun = 0. Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n) = 1	0	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.m.1	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)		0,69	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.m.2	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern = 25.654. Jumlah Pasangan Usia Subur = 37.432	68,534943	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.m.3	Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 2.981. Jumlah Pasangan Usia Subur = 37.432	7,9637743	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
2.n.1	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,67	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.n.2	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		0,51	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.o.1	Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 28. Jumlah PD = 28	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.o.2	Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 15. Jumlah Layanan Publik = 28	53,571429	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.o.3	Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 212.192. Jumlah penduduk = 301.424	70,396518	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.p.1	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 217. Jumlah seluruh koperasi aktif = 526	41,254753	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.p.2	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 10.035. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 10.035	100	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai
2.q	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n-jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota = 207271124050. Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota = 1347413778791	15,382886	Ada	OK	data / dokumen sudah sesuai







No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
3.c.1	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 21047. luas panen = 2605	807,94626	Ada	OK	Bukti telah sesuai
3.c.2	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = -21. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) = 868	-2,419355	Ada	OK	Bukti telah sesuai
3.d	Kehutanan			0	Ada	OK	Sesuai
3.e	Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin = 1. Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi = 1	100	Ada	OK	Sesuai
3.f.1	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 103. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota = 103	100	Ada	OK	Sesuai
3.f.2	Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi = 2096000. RDKK = 2880594	72,762771	Ada	OK	Sesuai
3.f.3	Perdagangan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 7395. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 10484	70,536055	Ada	OK	Sesuai
3.g.1	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 5.753. Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 13.125	43,832381	Ada	OK	Sesuai
3.g.2	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator		100	Ada	OK	Sesuai

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai Sertifikasi Elektronik

No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
		pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK					
3.g.3	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 14.57. Jumlah izin yang dikeluarkan = 15.154	96,146232	Ada	OK	Bukti sudah sesuai
3.g.4	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Ada	OK	Sesuai
3.g.5	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1	0	Ada	OK	Sesuai
3.g.6	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		100	Ada	OK	Sesuai
3.h	Transmigrasi			0	Ada	OK	Sesuai
4.a.1	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan;	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan = 257912087109. Jumlah APBD = 1558866792688	16,544845	Ada	OK	Sesuai
4.a.2	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Jumlah PAD = 389833521688.27. Jumlah Pendapatan pada APBD = 1507326107383.3	25,862587	Ada	OK	Sesuai
4.a.3	Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		3	Ada	OK	Sesuai



No. IKK	Urusan	IKK Outcome	Rumus	PEMDA		APIP	
				Capaian	File Bukti	Status	Keterangan
4.a.4	Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3	Ada	OK	Sesuai
4.a.5	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1268772383566. jumlah belanja APBD = 1558866792688	81,390687	Ada	OK	Sesuai
4.a.6	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan		9	Ada	OK	Bukti telah sesuai
4.b.1	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 7009	0	Ada	OK	Sesuai
4.b.2	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 6360. Jumlah seluruh pengadaan = 7002	90,831191	Ada	OK	Sesuai
4.b.3	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan = 278942374526. total belanja operasi dan modal = 1552783375558	17,964024	Ada	OK	Bukti sudah sesuai
4.b.4	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = -11645483515. Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) = 259644242327	-4,485169	Ada	OK	Sesuai







sesuai dengan pedoman penyusunan LPPD serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

#### **B. Rekomendasi**

Dari simpulan tersebut di atas kami merekomendasikan kepada Tim Penyusun LPPD Kota Kediri untuk segera merampungkan buku / dokumen LPPD Tahun 2024 dan disajikan sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024.

#### **IV. Penutup**

Kami menghargai atas upaya Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Kediri beserta Tim Penyusun LPPD dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024. Selanjutnya agar buku / dokumen LPPD Tahun 2024 segera diselesaikan dan disajikan sesuai Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024.

**INSPEKTUR KOTA KEDIRI**



**M. MUKLIS ISNAINI, SH**

**Pembina Tk. I**

**NIP. 19800128 200604 1 010**



**Balai  
Sertifikasi  
Elektronik**

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1: *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



## **RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KOTA KEDIRI TAHUN 2024**

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) adalah informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat, dipublikasikan melalui media cetak dan atau media elektronik di daerah yang merupakan kewajiban Kepala Daerah sesuai Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) ini disusun untuk menjelaskan tentang Capaian Kinerja Makro, Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar, Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya, Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah serta Inovasi Daerah, selama 1 (satu) tahun anggaran.

Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis katulistiwa berada antara 111o57'-112o 04' Bujur Timur dan 7o46'- 7o52' Lintang Selatan dengan luas 67,1995 km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Kediri terbagi menjadi 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Mojojoto, Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren, dan terdiri dari 46 Kelurahan, berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur : Kec. Wates dan Kec. Gurah
- Sebelah Barat : Kec. Banyakan dan Kec. Semen
- Sebelah Selatan : Kec. Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- Sebelah Utara : Kec. Gampengrejo, Kec. Ngasem dan Kec. Grogol

Secara administratif, penduduk Kota Kediri pada tahun 2024 tercatat berjumlah 301.424 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 149.683 dan 151.741 jiwa penduduk perempuan, atau naik 0,86 % jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 298.820 jiwa.

Pengembangan kapasitas bagian seluruh Aparatur Sipil Negara di Kota Kediri yang Tahun 2024 berjumlah 4.381 orang.



### A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

#### Capaian Indikator Makro Kota Kediri Tahun 2023 – 2024

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,97	81,88
2	Angka Kemiskinan	7,15	6,51
3	Angka Pengangguran	4,06	3,91
4	Pertumbuhan Ekonomi	1,92	3,43
5	Pendapatan Perkapita (juta rupiah)	541,11	565,84
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,400	0,337

### B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, yaitu urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat (Trantibunlinmas) serta Sosial. Penerapan SPM mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

#### 1. Urusan Pendidikan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Utama)</b>		<b>99,87%</b>
1.	Pendidikan Dasar Usia Dini	89,43 %
2.	Pendidikan Dasar	100 %



3.	Pendidikan Kesetaraan	100 %
----	-----------------------	-------

## 2. Urusan Kesehatan

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Utama)</b>		<b>100 %</b>
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100 %
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100 %
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100 %
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TB)	100 %
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %

## 3. Urusan Pekerjaan Umum

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Utama)</b>		<b>96,06 %</b>
1	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	92,12 %
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100 %

## 4. Urusan Perumahan Rakyat

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Paripurna)</b>		<b>100 %</b>
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %
2	Fasilitas Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kot	100 %

#### 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Utama)</b>		<b>92,81 %</b>
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	96,06 %
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	71,17%%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)	100 %
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	96,84%

#### 6. Urusan Sosial

Berpedoman pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, adalah sebagai berikut:



No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	Capaian Indikator SPM
<b>Indeks Pencapaian SPM (Kategori Tuntas Utama)</b>		<b>100 %</b>
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti	100 %
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	100 %
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100 %
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100 %
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100 %

Dari data di atas diperoleh Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar Pemerintah Kota Kediri Tahun 2024 yaitu 98,12%

**C. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya**

1. Hasil EPPD Pemerintah Kota Kediri

No.	EPPD	Skor	Status	Peringkat (Kota)	Ket.
1.	EPPD Tahun 2022 atas LPPD Tahun 2021	2,7	Sedang	39	Kepmendagri nomor: 100.2.1.3-1109 Tahun 2023
2.	EPPD Tahun 2023 atas LPPD Tahun 2022	3.2314	Sedang	35	Kepmendagri nomor: 100.2.1.7-6646 Tahun 2023



## 2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Tahun Laporan	Predikat Opini
1.	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2.	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

## 3. Ringkasan Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Realisasi Belanja Daerah Kota Kediri tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.558.866.792.688,00 atau 82,42 % dari anggaran yang ditetapkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.891.393.326.713,00. Rincian realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Kediri Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2024	Realisasi 2024	%
4	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.501.669.263.626,00</b>	<b>1.507.326.107.383,27</b>	<b>100,38</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,41
4.1.01	Pajak Daerah	142.673.378.814,00	149.065.798.766,00	104,48
4.1.02	Retribusi Daerah	18.859.545.160,00	23.209.113.784,11	123,06
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.800.182.066,00	2.800.182.066,32	100,00
4.1.04	Lain-Lain PAD yang Sah	185.571.749.739,00	214.758.427.071,84	115,73
4.2	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	1.151.764.407.847,00	1.117.492.585.695,00	97,02
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	991.078.222.730,00	980.101.086.258,00	98,89
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	160.686.185.117,00	137.391.499.437,00	85,50
4.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00



4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00
5	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.891.393.326.713,00</b>	<b>1.558.866.792.688,00</b>	82.42
<b>Kode</b>	<b>Uraian</b>	<b>Anggaran Tahun 2024</b>	<b>Realisasi 2024</b>	<b>%</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>	1.646.940.392.961,89	1.400.659.943.318,00	85,05
5.1.01	Belanja Pegawai	673.757.843.211,00	588.328.664.564,00	87,32
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	831.020.425.130,89	680.634.468.992,00	81,90
5.1.05	Belanja Hibah	128.977.154.620,00	124.642.393.262,00	96,64
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.184.970.000,00	7.054.416.500,00	53,50
5.2	<b>BELANJA MODAL</b>	236.927.658.251,11	152.123.432.240,00	64,21
5.2.02	Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	0,00	60,50
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.816.844.969,00	46.532.939.471,00	72,92
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.914.600.084,00	43.639.455.090,00	61,54
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	412.387.350,00	403.724.289,00	97,90
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00	0,00	0,00
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	6.879.850.000,00	5.498.896.830,00	79,93
6.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	389.724.063.087,00	389.724.063.086,56	100.00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	379.664.943.067,00	379.664.943.066,56	100.00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10.059.120.020,00	10.059.120.020,00	100.00
6.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	0,00	0,00	
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>389.724.063.087,00</b>	<b>389.724.063.086,56</b>	100.00



#### 4. Inovasi Daerah

Inovasi Daerah yang berhasil dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kota Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Urusan Pemerintah
1	Bantuan Modal	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Perindustrian dan Keuangan
2	GEMAR POSTING (GERAKAN MASYARAKAT PEDULI DAN SADAR STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
3	PEDULI STUNTING (PENANGANAN DINI UNTUK BALITA STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
4	DETAIL ( DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA DAN KANKER LEHER RAHIM DENGAN IVA MOBILE )	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
5	KOPER IMUT (KELOMPOK PEDULI IMUNISASI TERINTEGRASI)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
6	SI BIKI AMBON (kolaboraSI Bldan dan KAder kesehatan dalam upaya penurunan angka kematian iBu dan neONatus)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
7	SEGER DEK (SEGERA RESPON PENDATAAN DAN PELAPORAN KELUARGA SEHAT)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
8	ON KB (ON LINE KELUARGA BERENCANA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
9	GESIT SI ABAH ( GERAKAN INTEGRASI DETEKSI DINI RESPON PENYAKIT POTENSI WABAH)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan



10	PESONA CENDANA (PUSAT EDUKASI DAN INFORMASI SEPUTAR KESEHATAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
11	Aplikasi ASN Digital	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Komunikasi, informatika persandian dan kearsipan
12	Pendaftaran ONCE (Online, Nyaman, Cepat, Efektif)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
13	WELAS PIKIR (WADAH EDUKASI LINTAS SEKTOR DALAM PENINGKATAN KESEHATAN IBU DAN BALITA KOTA WILAYAH UTARA)	Inovasi pelayanan publik	Kesehatan pemberdayaan masyarakat dan Desa
14	MOBIL ANTEP ( MOBILE Ante Natal Care Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
15	KAMPUNG KEREN BANARAN WINATRA " WISATA IMPIAN NYAMAN TERINTEGRASI DAN ALAMI" KELURAHAN BANARAN	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa, pariwisata
16	ASTA SAE WARGA KOWILUT (Asuhan Mandiri (Asman) Pemanfaatan Toga dan Akupresur menuju Sejahtera Arungi Ekonomi Warga Puskesmas Kota Wilayah Utara)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
17	BULETIN PENTING (BUDAYA LOKAL EDUKASI DAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
18	Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu	Inovasi tata Kelola pemerintahan daerah	Kepegawaian
19	KAPTOPRIL (Kolaborasi Apoteker, Dokter dan Perawat Kontrol Kepatuhan Pasien Minum Obat Antihipertensi)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan



20	GempPhita (Gerakan Masyarakat Peduli Pangan Halal, Tyyib, Sehat, Aman)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
21	Pelik Speaking - Pelatihan Publik Speaking Bagi Pelaksana Pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan, Kecamatan Pesantren	Inovasi pelayanan publik	Pendidikan dan Pelatihan
22	TAWA (PENDAFTARAN MELALUI WA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
23	FAST SERVICE IMMUNIZATION	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
24	CENDINI (CEGAH STUNTING SEJAK DINI)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
25	Aplikasi Sitori	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	komunikasi dan informatika,Perencanaan
26	MASDARJI (MASYARAKAT SADAR KESEHATAN JIWA)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan,sosial
27	Pagelaran Budaya Sumber Banteng	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat,sosial
28	EMAS (English Massive)	Inovasi pelayanan publik	pendidikan,sosial,pemberdayaan masyarakat dan Desa,Pendidikan dan Pelatihan
29	Business Coaching (Peningkatan Kapasitas Dan Skill IKM Dalam Mengembangkan Bisnisnya Melalui Pendampingan Bisnis)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pemberdayaan masyarakat dan Desa,perindustrian
30	GERDU CAS TB (Gerakan Terpadu Pencarian Suspect TB)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
31	REGION DEWA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
32	Pakai Mata Cermat	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
33	OPM (Operasi Pasar Murni) Delivery	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	pangan,perdagangan



34	KUNIR BIDAN (KUNJUNGAN RISIKO TINGGI OLEH BIDAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
35	Marni (Makanan dan Minuman Rekomendasi Harmoni)	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika, pariwisata
36	Nuraini (Nongkrong Asik Rekomendasi Harmoni)	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika, pariwisata
37	Kusaini (Kuis Asyik Harmoni)	Inovasi pelayanan publik	komunikasi dan informatika, pariwisata
38	PEDAL KARET (PENDAMPINGAN IBU HAMIL OLEH KADER KESEHATAN)	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
39	Smart School Award (SSA) Dinas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2022	Inovasi pelayanan publik	pendidikan, komunikasi dan informatika
40	Cerdas Cermat Literasi Numerasi (CCLN) Tahun 2022	Inovasi pelayanan publik	pendidikan, komunikasi dan informatika
41	Lomba Website Pembelajaran	Inovasi pelayanan publik	pendidikan, komunikasi dan informatika
42	Sosis Pelik - Sosialisasi Produk Pelayanan Informasi dan Etika Pelayanan Publik	Inovasi pelayanan publik	pendidikan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika, Pendidikan dan Pelatihan
43	PADAMU DHIVA	Inovasi pelayanan publik	kesehatan
44	SI MANIS AUREL	Inovasi pelayanan publik	kesehatan



**5. Prestasi Daerah**

Penghargaan/Prestasi Daerah yang berhasil di raih oleh Pemerintah Kota Kediri yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat pada tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

TAHUN 2024		
NO	Nama Penghargaan	Tingkat
1	10 besar Kota Toleran se-Indonesia Empat Tahun Berturut-turut menurut Setara Institut.	Nasional
2	Anugerah Pandu Negeri	Nasional
3	Sertifikat dan Piala Wahana Tata Nugraha	Nasional
4	Penghargaan Pasar Tertib Ukur (PTU) Dalam Ajang Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen 2024 Indonesia Perlindungan Komsumen dan Tertib Niaga	Nasional
5	Top Hospitality Leader in Government and Public Policy pada ITTA Award	Nasional
6	Peringkat Pertama Kota/Kabupaten Paling Berkelanjutan di Indonesia dan Paling Berkelanjutan dalam Bidang Akses dan Mobilitas UI GreenCity Matric Award 2024	Nasional
7	penghargaan Universal Health Coverage Award Kategori Utama	Nasional
8	Terbaik II dalam Penilaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi	Provinsi
9	Peringkat II Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) di ajang e-Purchasing Awards Tahun 2024 Provinsi Jawa Timur	Provinsi
10	Award Peduli Ketahanan Pangan Kategori Ketersediaan Pangan	Provinsi
11	Peringkat 5 IBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) Award 2024	Provinsi



Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Kediri Tahun 2024. Pada kesempatan ini, Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, jajaran Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri, Masyarakat Kota Kediri, serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Kediri. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta penyampaian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024 ini terdapat kekurangan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan pertolongan bimbingan dan pertunjuk kepada kita semua Aamiin.

Kediri, 28 Maret 2025

WALIKOTA KEDIRI  
  
Wanda Prameswati, S.H., M.Kn.